

ANALISA

1981—6

TIMUR TENGAH

Pusaran Strategis



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

ANALISA



Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

Pemimpin Redaksi/

Penanggung jawab : Kirdi DIPOYUDO

Dewan Redaksi : Daoed JOESOEF, Rufinus LAHUR, J. PANGLAYKIM, A.M.W. PRANARKA, Pande Radja SILALAH, M. Hadi SOESASTRO, Harry TJAN SILALAH, Jusuf WANANDI dan Rin Purwani BUDI

Redaksi Pelaksana : Kirdi DIPOYUDO, Rin Purwani BUDI

STT: S.K. Menpen R.I. No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978, tanggal 28-8-1978
ISSN 0126-222X

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telepon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, Telepon 349489

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

PENGANTAR REDAKSI

460

ESKALASI PERTARUNGAN SUPERPOWER DI
TIMUR TENGAH

Kirdi DIPOYUDO

463

KAWASAN TELUK PARSİ PUSARAN STRATEGIS
KRISIS DUNIA

Saduran oleh B. WIROGUNO

474

IRAK KEKUATAN BARU DI TIMUR TENGAH

Kirdi DIPOYUDO

483

SELAT HORMUZ DAN KEAMANAN JALUR MINYAK
SUATU TANTANGAN BAGI STRATEGI AMERIKA
SERIKAT

Saduran oleh Bambang WALGITO

501

PERSEPSI REZIM IRAN MENGENAI PERANG
IRAK—IRAN

B. WIROGUNO

515

SITUASI DALAM NEGERI IRAN SEBELUM
PERANG DENGAN IRAK

B. WIROGUNO

522

PENGANTAR REDAKSI

Timur Tengah merupakan suatu kawasan yang memiliki arti strategi yang penting, bukan saja berkat letaknya pada titik pertemuan tiga benua, yaitu Eropa, Asia dan Afrika, serta kekayaan minyak dan petrodollarnya, tetapi terutama juga akibat ketergantungan negara-negara industri Barat dan Jepang pada minyak Timur Tengah itu. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bahwa kawasan ini menjadi sasaran pertarungan global antara Timur dan Barat dan pusat perhatian dunia.

Disadari bahwa ketergantungan pada minyak Timur Tengah itu merupakan titik lemah negara-negara Barat dan Jepang. Kehidupan dan perekonomian negara-negara itu akan lumpuh kalau suplai minyak itu dipotong. Apabila berhasil menguasainya, Uni Soviet akan dapat memeras dan menundukkan mereka. Sesuai dengan kesadaran itu, Uni Soviet meningkatkan usahanya untuk memperluas dan memantapkan pengaruhnya di kawasan dalam rangka mencapai kemampuan semacam itu. Selain itu dia ingin mengamankan suplai minyaknya sendiri karena sekitar 1985 dia akan terpaksa mengimpor minyak dalam jumlah yang besar.

Biarpun mengalami beberapa kegagalan, Uni Soviet mencapai kemajuan kemajuan strategis di kawasan dan berhasil memantapkan atau menanamkan pengaruhnya di beberapa negara yang berkat letak geografisnya mempunyai arti strategis yang penting, yaitu Yaman Selatan, Ethiopia, Irak dan Afghanistan. Selain itu sejak lama dia berhasil menempatkan satuan-satuan Angkatan Laut-nya di Laut Tengah dan Samudera Hindia dengan fasilitas fasilitas pelabuhan di beberapa negara sahabat. Karena dia juga bersahabat dengan Libia, maka lingkaran pengaruhnya mengepung Timur Tengah dengan ujungnya yang satu di Afghanistan dan ujungnya yang lain di Yaman Selatan dan Ethiopia. Dengan invasi dan pendudukan Afghanistan pada akhir 1979, kedudukan Soviet itu menjadi lebih kuat.

Negara-negara Barat dan sekutu-sekutu mereka di kawasan melihat perkembangan itu dengan cemas. Dalam persepsi mereka, invasi ke Afghanistan yang dibarengi dengan buildup militer di kawasan merupakan bagian strategi Uni Soviet untuk menguasai Timur Tengah. Khususnya Amerika Serikat melihatnya sebagai ancaman terhadap kepentingan-kepentingan vital Barat dan sehubungan dengan itu menyatakan akan melawan dengan segala cara setiap usaha yang dilakukan oleh suatu kekuatan dari luar untuk menguasai kawasan Timur Tengah dengan kekerasan.

Sesuai dengan itu Amerika Serikat menyusun suatu strategi pembendungan terhadap Uni Soviet. Dalam rangka itu dia meningkatkan kemampuan militernya di kawasan dan berusaha mendapatkan fasilitas-fasilitas pangkalan

di Oman, Somalia dan Kenya; meningkatkan pangkalan militernya di Diego Garcia; mengusulkan kerja sama keamanan kepada negara-negara kawasan yang terancam dan negara-negara yang bergantung pada minyak Timur Tengah; menyatakan akan membela Pakistan; berjanji akan menyelesaikan sengketa Arab-Israel yang menggajal hubungannya dengan negara-negara Arab; dan mempercepat pembentukan Pasukan Gerak Cepat yang akan bisa dikerahkan dengan cepat untuk menghadapi krisis-krisis di kawasan. Sebagai tanggapan, Uni Soviet juga meningkatkan kemampuan militernya di Samudera Hindia. Di samping itu lebih dari 20 kapal Angkatan Laut-nya berada di Laut Cina Selatan dan dalam waktu krisis dapat didatangkan untuk memperkuat armadanya itu. Dengan demikian pertarungan superpower di kawasan Timur Tengah dan perairan sekitarnya meningkat.

Kiranya sulit memperkirakan dengan tepat apa yang akan terjadi di kawasan selanjutnya karena terdapat begitu banyak faktor yang mengandung ketidakpastian. Timur Tengah adalah suatu kawasan yang secara politik mudah goyah dan ditandai dengan permusuhan-permusuhan historis dan negara-negara bangsa yang struktur-struktur sosialnya belum mampu mengatasi perubahan-perubahan politik, ekonomi dan sosial yang terlalu cepat.

Timur Tengah sebagai pusaran strategis krisis dunia itu adalah tema ANALISA Juni 1981 ini. Diturunkan enani karangan yang diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran untuk memahaminya dan memperkirakan arah perkembangannya. Karangan yang pertama membahas eskalasi pertarungan superpower di Timur Tengah. Hal itu merupakan suatu perkembangan yang perlu diamati dengan seksama karena taruhannya besar sekali. Dengan menguasai kawasan Teluk Parsi, Uni Soviet bukan saja akan mendapatkan sumber minyak yang berlimpah dan murah melainkan juga dapat memeras dan menundukkan negara-negara Barat. Sejauh mana Uni Soviet akan menyerbunya dengan maksud itu, belum dapat dikatakan. Akan tetapi Amerika Serikat telah memperhitungkan kemungkinan itu dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya.

Krisis yang kini melanda dunia dan mendapatkan suatu dimensi baru persaingan politik dan ideologi, adalah krisis energi. Pusaran strategis krisis itu terletak di Teluk Parsi dan kawasan Timur Tengah sekitarnya yang memiliki cadangan minyak yang luas. Keamanan suplai minyak dari kawasan ini adalah soal mati dan hidup bagi negara-negara industri Barat dan Jepang. Untuk menjaminnya Amerika Serikat rupanya perlu membangun suatu kemampuan militer di Samudera Hindia sebagai imbalan bagi kekuatan darat Uni Soviet yang ditempatkan di wilayah yang berbatasan di sebelah utaranya. Hal itu dibahas dalam karangan yang kedua dan berjudul "Kawasan Teluk Parsi Pusaran Strategis Krisis Dunia".

Sebagai suatu negara kawasan Teluk Parsi dan Timur Tengah yang berkembang potensinya yang besar dapat tampil ke muka sebagai suatu kekuatan baru dan di bawah pimpinan Presiden Saddam Hussein yang tegas dan dinamis berusaha mewujudkan ambisinya untuk menjadi pemimpin kawasan, Irak perlu mendapatkan perhatian istimewa. Sejauh mana dia akan berhasil mencapai maksudnya itu belum begitu jelas, karena Pemerintah Irak sekarang ini menghadapi serangkaian masalah politik dan keamanan yang segi-segi internal dan eksternalnya berkaitan satu sama lain. Hal itu dibahas dalam karangan berikutnya yang berjudul "Irak Kekuatan Baru Di Timur Tengah".

Selanjutnya, guna mengamankan arus minyak lewat Selat Hormuz yang sempit tetapi amat padat lalu lintasnya diperlukan langkah-langkah diplomasi, ekonomi dan militer. Uni Soviet menyadari arti penting jalur air ini sebagai urat nadi negara-negara Barat dan Jepang, dan bisa tergoda untuk menguasai atau mengganggunya. Oleh sebab itu Amerika Serikat sebagai pemimpin negara-negara itu kiranya perlu mengambil langkah-langkah untuk menjamin keamanan selat itu bersama-sama dengan negara-negara yang bersangkutan. Itulah tema karangan yang keempat dan berjudul "Selat Hormuz dan Keamanan Jalur Minyak Suatu Tantangan Bagi Strategi Amerika Serikat".

Perang Irak—Iran masih berlangsung terus dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Pemimpin-pemimpin Iran membatasi perang ini secara abstrak dan antara lain menyebutnya "perang Islam melawan musuh Islam". Sesuai dengan persepsi ini mereka percaya akan berhasil mengalahkan Irak dan mengajukan syarat-syarat perdamaian yang keras. Walaupun di antara mereka terdapat berbagai pendapat, pendekatan ideologi terhadap perang itu menjurus ke radikalisasi dan memperkecil kemungkinan berakhirnya perang melalui meja perundingan dalam waktu dekat ini. Masalah itu disoroti dalam karangan yang kelima, "Persepsi Rezim Iran Mengenai Perang Irak—Iran".

Dalam hubungan ini kiranya juga perlu membahas situasi dalam negeri Iran sebelum perang dengan Irak. Hal ini akan menolong kita untuk memperkirakan arah perkembangan Iran yang tidak menentu itu. Di gelanggang politik negara itu terdapat tiga kelompok utama yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, yaitu kelompok agama Islam, kelompok sayap kiri dan kelompok liberal royalis. Sebagai akibat terus berlangsungnya perebutan kekuasaan itu, maka terjadi krisis kepemimpinan dan anarki di seluruh negeri. Sejauh ini Ayatullah Khomeini berhasil mencegah pecahnya perang saudara, akan tetapi dikuatirkan bahwa setelah dia tiada hal itu akan terjadi. Pecahnya perang dengan Irak tidak berhasil menghentikan perebutan kekuasaan itu, tetapi memperkuat kedudukan Presiden Bani Sadr.

ESKALASI PERTARUNGAN SUPER-POWER DI TIMUR TENGAH

Kirdi DIPOYUDO

Salah satu perkembangan penting dan berbahaya di Timur Tengah waktu belakangan ini ialah meningkatnya pertarungan superpower. Amerika Serikat menilai invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada akhir 1979 dan buildup militer Soviet di Timur Tengah yang menyertainya sebagai ancaman serius terhadap kepentingan-kepentingan vital Barat. Sesuai dengan itu Washington menyatakan tekadnya untuk menangkis setiap usaha dari luar untuk menguasai kawasan Teluk Parsi dan sejak itu mengambil langkah-langkah untuk melaksanakannya. Dengan demikian perebutan pengaruh Timur-Barat di kawasan yang sejak lama berlangsung meningkat dan ini bukan saja mengancam kestabilan dan keamanan kawasan, melainkan juga kepentingan-kepentingan lain-lain negara yang mempunyai banyak hubungan dengan Timur Tengah.

ARTI TIMUR TENGAH

Timur Tengah menjadi rebutan negara-negara besar itu karena mempunyai arti strategi yang penting. Hal ini adalah berkat letaknya pada titik pertemuan Eropa, Asia dan Afrika, jalur-jalur komunikasi yang menghubungkan ketiga benua itu, kekayaan minyak dan petrodollarnya, dan ketergantungan negara-negara industri Barat dan Jepang pada kekayaan minyak itu. Khususnya hal yang terakhir ini sangat penting dalam pertarungan global Timur-Barat sekarang ini.¹

¹ Lebih lanjut lihat Edgar O'Ballance, *The Security of Middle East Oil* (London: Foreign Affairs Research Institute, 10/1979); lihat juga James E. Schlesinger, "The Strategic F Vortex", dalam *The Washington Quarterly*, Winter 1980; dan Richard Nixon, *The Real War* (New York: Warner, 1980), khususnya hal. 91-95

Akibat ketergantungan itu, Timur Tengah khususnya kawasan Teluk Parsi merupakan kepentingan vital Barat seperti dinyatakan oleh Presiden Carter dalam *State of the Union Address* 23 Januari 1980. Ketergantungan serupa itu adalah titik lemah (Achilles' heel) negara-negara Barat dalam menghadapi strategi global Uni Soviet. Apabila berhasil mencapai kemampuan untuk menguasai kawasan itu, Uni Soviet akan dapat menundukkan dan memeras negara-negara Barat. Tanpa minyak Timur Tengah negara-negara ini akan lumpuh industri, kehidupan dan angkatan bersenjatanya.¹ Selain itu dengan menguasai Timur Tengah, Uni Soviet akan mendapatkan sumber minyak yang dekat dan murah. Menurut perkiraan, pada tahun 1985 dia akan terpaksa mengimpor banyak minyak.² Dengan demikian Timur Tengah mempunyai arti yang khusus bagi Uni Soviet.

Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bahwa Uni Soviet mengincar Timur Tengah dan berusaha sekuat tenaga untuk menguasainya dengan memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka baginya dan menciptakan peluang-peluang lain lewat subversi dan kudeta. Mereka yang meragukan hal itu, dapat membaca kata-kata Leonid Brezhnev kepada Presiden Siad Barre dari Somalia: "Maksud kami adalah menguasai kedua gudang kekayaan tempat Barat bergantung - gudang kekayaan energi Teluk Parsi dan gudang kekayaan mineral Afrika bagian tengah dan selatan."³

STRATEGI TIMUR TENGAH UNI SOVIET

Menyusul Perang Dunia II Stalin berusaha mendapatkan beberapa daerah Turki maupun Iran, tetapi gagal akibat sikap tegas kedua negara itu dan Amerika Serikat. Selanjutnya dia kurang berminat dengan negara-negara Arab. Revolusi Nasser tahun 1952 misalnya tidak mendapat perhatian besar. Akan tetapi setelah Stalin meninggal dunia (1953), terjadi suatu perubahan. Pemimpin-pemimpin Soviet menjadi sadar bahwa Dunia Ketiga adalah gudang anti Barat yang dapat diajak bekerjasama melawan imperialisme Amerika Serikat. Dengan kesadaran itu mereka berusaha mendekati negara-negara Dunia Ketiga dan berusaha menjalin hubungan baik dengan mereka. Trend ini diperkuat oleh Konferensi Bandung tahun 1955. Sesuai dengan itu pula Uni Soviet mendukung gerakan-gerakan pembebasan nasional.⁴

1 Lihat antara lain Audrey Parry, *The Growing Vulnerability of Oil Supplies* (London: Foreign Affairs Research Institute, 18/1978); dan Richard Nixon, *op. cit.*, hal. 91

2 Lihat Bridget Gail, "The West's Jugular Vein: Arab Oil", *Armed Forces Journal*, Agustus 1978

3 Dikutip oleh Richard Nixon, *op. cit.*, hal. 23

4 Lihat Wynfred Joshua, *Soviet Penetration into the Middle East* (New York, 1971), hal. 1-5; *Soviet Objectives in the Middle East. An ISC Special Report* (London; 1974), hal. 5-6; dan Kurt Muller, *The Foreign Aid Programs of the Soviet Bloc and Communist China: An Analysis* (New York, 1967), hal. 28-33

Dalam rangka itu pula Uni Soviet berusaha memasuki Dunia Arab untuk mengusir pengaruh Barat dan menanamkan pengaruhnya sendiri. Dengan maksud itu dia menawarkan bantuan militer, ekonomi, teknis dan politik kepada negara-negara Arab. Sengketa Arab-Israel yang berlarut-larut memberinya suatu peluang baik. Untuk menghadapi Israel, negara-negara Arab mencari senjata, tetapi negara-negara Barat tidak bersedia menjual senjata kepada mereka. Oleh sebab itu mereka menyambut baik tawaran bantuan militer Soviet itu. Pada tahun 1955 terjadi transaksi senjata Cekoslowakia-Mesir, yang segera disusul transaksi-transaksi senjata lain antara Blok Komunis dan negara-negara Arab (Mesir, Suriah dan Irak). Dengan demikian Uni Soviet tampil ke muka sebagai pembela kepentingan Arab dan memasuki Timur Tengah. Pada tahun 1967 dia memutuskan hubungan diplomasinya dengan Israel yang semula didukungnya.¹

Dalam proses itu Uni Soviet berhasil mencapai perjanjian persahabatan dengan Mesir (1971), Irak (1972), Somalia (1974), Afghanistan (1978), Yaman Selatan (1979) dan Suriah (1980).

Tetapi Uni Soviet mengalami juga kemunduran-kemunduran: putus hubungan dengan Mesir (1972 dan 1976), dengan Sudan (1977), Somalia (1977). Hubungan dengan Irak juga menjadi dingin. Sejak petro dollar mengalir berkat kenaikan harga minyak tahun 1973, Irak berusaha mengurangi ketergantungannya pada Uni Soviet dan berpaling ke Barat.

Namun sebagai keseluruhan Uni Soviet mencapai kemajuan-kemajuan dan kini mempunyai hubungan baik dengan Libia (sejak 1974), Suriah (sejak 1955), Yaman Selatan (sejak 1967), Ethiopia (sejak 1977) dan Afghanistan (sejak 1978). Kedudukannya sangat kuat di Yaman Selatan, Afghanistan dan Ethiopia. Selain itu berhasil membangun gudang senjata di Libia dan Yaman Selatan.

Uni Soviet juga berhasil menempatkan kapal-kapal perangnya di Laut Tengah (sejak 1964) dan Samudera Hindia (sejak 1968). Armadanya di Laut Tengah kini besar (lebih dari 70 kapal). Demikianpun di Samudera Hindia (sekitar 30 kapal).

¹ Lihat George Lenczowski, *Soviet Advances in the Middle East* (Washington, 1972), hal. 55-144; dan Walter Laqueur, *The Struggle for the Middle East* (London, 1969), hal. 63-117. Mengenai strategi Uni Soviet di Timur Tengah lebih lanjut lihat karangan *Soviet Strategy in the Middle East* (London: Foreign Affairs Research Institute, 6/1979); David Lynn Price, "Moscow and the Persian Gulf", *Problems of Communism*, Maret-April 1979; dan Robert O. Freedman, *Soviet Policy Toward the Middle East Since 1970* (New York, 1978), hal. 11-39

Secara demikian Uni Soviet berhasil menciptakan suatu daerah pengaruh yang mengepung kawasan Teluk Parsi, dengan ujungnya yang satu di Afghanistan dan ujungnya yang lain di Ethiopia dan Yaman Selatan.¹

Kedudukan yang kuat itu menjadi lebih kuat dengan invasi Soviet ke Afghanistan pada akhir 1979 dan buildup militer di Timur Tengah, khususnya di Suriah, Yaman Selatan dan Ethiopia. Dalam rangka buildup militer ini, Uni Soviet mengirimkan lebih banyak senjata dan menempatkan pangkalan-pangkalan yang tersedia baginya di Irak, Yaman Selatan dan Ethiopia dalam keadaan siap siaga. Didatangkan pula tambahan tenaga militer sebagai penasehat atau perawat perlengkapan. Secara demikian diciptakan suatu kerangka untuk meningkatkan kehadiran militer Soviet dengan cepat bila perlu.²

Hal ini menimbulkan kecemasan di kalangan negara-negara kawasan yang moderat dan pro-Barat. Khususnya Arab Saudi merasa benar-benar dikepung oleh Uni Soviet dan kekuatan-kekuatan radikal setempat.³

TANGKISAN AMERIKA SERIKAT

Itulah juga persepsi Barat, khususnya Amerika Serikat. Sebagai tanggapan, Presiden Carter dalam *State of the Union Address* 23 Januari 1980 menegaskan bahwa Amerika Serikat bila perlu akan menggunakan kekuatan militernya untuk menangkis setiap usaha dari luar untuk menguasai Timur Tengah: "Suatu usaha oleh kekuatan luar dengan cara kekerasan untuk menguasai kawasan Teluk Parsi akan dianggap sebagai suatu serangan terhadap kepentingan vital Amerika Serikat. Dan serangan serupa itu akan dilawan dengan segala cara, termasuk kekuatan militer."⁴ Pernyataan ini berarti suatu ultimatum. Amerika Serikat akan berperang kalau suatu negara dari luar kawasan menyerang Teluk Parsi untuk menguasainya.

Sehubungan dengan itu dia menegaskan bahwa kawasan yang sangat strategis itu terancam oleh usaha Uni Soviet untuk menguasai Afghanistan dan menempatkan tentaranya pada jarak 300 mil dari Samudera Hindia dan dekat dengan Selat Hormuz yang merupakan *urat nadi* negara-negara Barat dan

1 Lebih lanjut lihat Rodney Tasker, "Facing Moscow's Pincer Movement", *Far Eastern Economic Review*, 9 Mei 1980; dan karangan "Kemajuan Strategis Soviet di Ethiopia, Yaman Selatan dan Afghanistan", *Analisa*, Januari 1979

2 Lihat *Foreign Report*, 16 Januari 1980

3 Lihat *Time*, 18 Pebruari 1980; dan Rodney Tasker, *loc. cit.*

4 *Washington Viewpoint on Current International Issues*, (Jakarta). 25 Januari 1980

Jepang. Untuk menghadapinya, dia menyerukan kerja sama dengan negara-negara yang bergantung pada minyak Timur Tengah dan berkepentingan dengan perdamaian serta stabilitas dunia, dan dengan negara-negara kawasan yang merasa terancam.

Untuk menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh dengan pernyataan itu, Presiden Carter memerintahkan langkah-langkah berikut:

- (1) meningkatkan kekuatan militer Amerika Serikat di perairan sekitarnya, yang telah diperkuat sejak terjadinya krisis dengan Iran;
- (2) meningkatkan pangkalan militer di Diego Garcia;
- (3) merundingkan hak menggunakan fasilitas-fasilitas pangkalan dengan Oman, Somalia dan Kenya;
- (4) menghidupkan kembali pendaftaran wajib militer sebagai persiapan untuk melaksanakan wajib militer bila perlu;
- (5) meningkatkan anggaran pertahanan 5% setahun selama lima tahun;
- (6) mempercepat pembentukan Pasukan Gerak Cepat.¹

PASUKAN GERAK CEPAT

Gagasan Pasukan Gerak Cepat itu muncul bulan Agustus 1977 ketika Presiden Carter mengeluarkan suatu perintah untuk membentuk "suatu pasukan mobil yang dapat menanggapi perang-perang lokal tanpa mengalihkan pasukan-pasukan Amerika dari teater-teater tradisionalanya di Eropa dan Asia". Akan tetapi perintah ini terkatung-katung sampai Amerika Serikat kehilangan pos pengaruhnya di kawasan akibat Revolusi Islam Iran dan Uni Soviet menyerbu Afghanistan.

Menurut rencana semula Pasukan Gerak Cepat itu akan terdiri atas 110.000 orang marinir dan pasukan para, yang berpangkalan di Amerika Serikat dan Asia Timur, tetapi siap untuk diangkut lewat udara dan dikerahkan untuk mengatasi krisis-krisis luar negeri yang mengancam kepentingan-kepentingan vital Barat. Suplai dan perlengkapan berat mereka akan siap di kapal-kapal yang ditempatkan dekat tempat-tempat krisis dan tidak jauh dari fasilitas-fasilitas udara di mana pasukan-pasukan akan didaratkan dengan pesawat-pesawat transpor.

Jumlah pasukan itu kini telah melampaui 200.000 orang dan rupanya masih akan ditambah lagi. Divisi Lintas Udara 82, Divisi Mobil Udara 101, Divisi Infantri Bermotor 24 dan Brigade Amfibi Marinir 7 (12.000 orang) ditunjuk sebagai ujung tombak Pasukan Gerak Cepat itu.

¹ Lihat karangan "Drawing a Line Around the Persian Gulf", *Newsweek*, 4 Pebruari 1980

Markas Besarnya adalah sebuah bunker di pangkalan udara MacDill Tampa, Florida. Bulan Desember 1979, sebulan setelah pecah krisis Amerika Serikat - Iran, Letjen Marinir Kelly ditunjuk sebagai Panglima-nya. Dia tidak menguasai pasukan-pasukan secara langsung, tetapi dalam waktu krisis akan meminjam satuan-satuan dari lain-lain komando. Agar Pasukan Gerak Cepat itu dapat berfungsi dengan baik, maka satuan-satuan ini harus mengadakan latihan-latihan, baik sendiri-sendiri maupun dalam koordinasi satu sama lain. Pasukan harus beroperasi sebagai satu satuan.¹

Sejak peringatan keras Presiden Carter tersebut, Pentagon bekerja keras untuk membangun Pasukan Gerak Cepat itu. Pasukan-pasukan dan perlengkapan mereka disiapkan. Satuan-satuan mengadakan latihan-latihan untuk operasi di padang gurun. Senjata-senjata berat dikumpulkan dan dimuat dalam kapal-kapal barang yang akan ditempatkan di Samudera Hindia dekat dengan Teluk Parsi.

Pasukan Gerak Cepat itu dimaksud untuk mendahului pasukan-pasukan Soviet ke setiap tempat di kawasan Teluk Parsi yang akan diserang oleh pasukan-pasukan ini. Amerika Serikat memilih kekuatan laut serta kecepatan, dan bukan keunggulan militer, untuk membuat Uni Soviet berpikir dua kali sebelum memulai suatu petualangan. Ini merupakan suatu strategi konfrontasi yang berani. Sementara orang meragukan keefektifannya, tetapi langkah ini menyatakan tekad Amerika Serikat untuk membela kawasan Teluk Parsi sebagai kepentingan vital negara-negara Barat.²

Untuk memperbaiki logistik bagi Pasukan Gerak Cepat itu, Amerika Serikat memperluas pangkalan laut dan udaranya di Diego Garcia dan merundingkan fasilitas-fasilitas pelabuhan serta lapangan udara dengan Oman, Somalia dan Kenya. Soalnya bukanlah semata-mata mendatangkan pasukan-pasukan di tempat-tempat krisis, melainkan juga mensuplainya secara terus menerus selama operasi berlangsung. Akan tetapi Amerika Serikat sangat jauh dari kawasan Teluk Parsi, sedangkan kemampuan suplainya lewat udara kurang memadai.

Bersamaan dengan itu Amerika Serikat meningkatkan kemampuan militernya di kawasan. Sejak Revolusi Islam Iran berhasil menumbangkan kekuasaan Shah Iran, Washington menempatkan suatu armada kuat di Laut Arab. Menyusul invasi Soviet ke Afghanistan armada itu diperkuat.

1 Lihat karangan "A U.S. Buildup in the Gulf", *Newsweek*, 14 Juli 1980. Lebih lanjut lihat Victor H. Krulak, "The Rapid Deployment Force: Criteria and Imperatives", *Strategic Review*, Spring 1980; John J. Fialka, "The Rapid Deployment Force", *Strategic Digest*, Agustus 1980; dan Michael Getler, "Rapid Deployment Force-II", *Strategic Digest*, September 1980

2 Lihat karangan "A U.S. Buildup in the Gulf", *loc. cit.*

Sementara itu Pentagon mencari 7 kapal barang dan kapal tanki untuk ditempatkan di Samudera Hindia dengan senjata berat dan suplai dua minggu untuk satu brigade marinir 12.000 orang dan beberapa skuadron pesawat pemburu.¹

Buildup militer itu berjalan linear dan kini kekuatan yang dapat dikerahkan untuk membela Timur Tengah terhadap ancaman Uni Soviet adalah sebagai berikut:

- Suatu armada sekitar 30 kapal termasuk 2 kapal induk dengan lebih dari 150 pesawat tempur ditempatkan di Samudera Hindia, biarpun sebagai akibatnya kekuatan militer Amerika Serikat di Laut Tengah dan Pasifik berkurang.
- Pasukan marinir 1.800 orang dan 5 kapal ditempatkan di kawasan dengan satuan-satuan bergiliran dari Laut Tengah dan Samudera Pasifik.
- Tujuh kapal barang yang memuat eukup perlengkapan dan suplai dua minggu untuk satu brigade marinir 10.000 orang dan beberapa skuadron pesawat pemburu ditempatkan di Diego Garcia.
- Pangkalan udara dan laut di Diego Garcia telah diperluas untuk melayani semuanya itu.
- Pesawat-pesawat pemburu dan pengintai elektronis (AWAC) beroperasi dari lapangan-lapangan terbang di Mesir dan Arab Saudi untuk mendapatkan pengalaman setempat.
- Gugus tugas Timur Tengah yang berpangkalan di Teluk Parsi ditingkatkan dari 3 menjadi 5 kapal.
- Telah dicapai persetujuan dengan Oman, Somalia dan Kenya yang mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pelabuhan-pelabuhan dan lapangan-lapangan terbang dalam waktu krisis. Demikianpun Mesir telah menawarkan pangkalan-pangkalan.
- Pentagon mendapat jaminan bahwa pesawat-pesawatnya dalam penerbangan dari Amerika Serikat ke kawasan dapat melintasi negara-negara Laut Tengah dan Pasifik atau mendarat untuk mengisi bahan bakar.
- Negara-negara NATO menerima baik pemberitahuan Amerika Serikat bahwa sumbangannya bagi pertahanan Eropa berkurang dan mengambil langkah-langkah penyesuaian.²

KONFRONTASI SUPERPOWER

Secara demikian berlangsung suatu konfrontasi superpower di Timur Tengah dan perairan sekitarnya. Armada Amerika Serikat jelas menguasai

1 *Ibid.*

2 Lihat karangan Michael Getler, *loc. cit.*

perairan. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan armada musuh, khususnya karena dua kapal induk dengan lebih dari 150 pesawat tempur berpatroli di situ dengan kelompok tempurnya yang lengkap yang terdiri atas kapal-kapal penjelajah rudal, perusak, frigat, kapal-kapal minyak dan lain-lain kapal pendukung. Selain itu bertugas pula sejumlah kapal selam. Kapal-kapal itu ditempatkan dalam keadaan siap siaga yang tinggi dan secara teratur mengadakan latihan-latihan untuk menghadapi segala kemungkinan. Sementara pesawat tempur kapal induk bisa tinggal landas dalam waktu lima menit setelah dibunyikan tanda bahaya. Lain-lain dapat menyusul dalam 15-30 menit. Dalam rangka kesiap-siagaan itu masing-masing kapal induk secara teratur menerbangkan sejumlah pesawatnya, untuk mengadakan latihan tempur atau melakukan pengintaian.

Berhadapan dengan kekuatan militer Amerika Serikat di Samudera Hindia itu adalah suatu armada sekitar 30 kapal Uni Soviet, termasuk kapal induk Minsk, kapal-kapal penjelajah rudal, perusak, frigat dan pendukung. Untuk menunjang operasi kapal-kapal itu, Uni Soviet mempunyai pangkalan-pangkalan laut di Aden dan Pulau Sokotra yang menguasai Teluk Aden dan Selat Bab el Mandeb. Kapal-kapal itu terus menerus membayang-bayangi armada Amerika Serikat. Selain itu helikopter-helikopternya mengadakan pengintaian dari udara. Demikianpun pesawat-pesawat pengintai Soviet Il-38 yang berpangkalan di Aden atau Ethiopia. Selanjutnya lebih dari 20 kapal Soviet berada di Laut Cina Selatan dan dalam waktu krisis dapat dikerahkan ke Samudera Hindia untuk memperkuat tugas tersebut.¹

Sebaliknya armada Amerika Serikat dapat mengidentifikasi dan melacak setiap kapal Soviet sampai jarak 300 mil. Karena masing-masing armada mampu menangkap siaran radio pihak lawan, segala pesan dikirimkan dengan kode. Tetapi ada kalanya kedua pihak berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan lampu atau bendera.

Kedua armada itu terlibat dalam suatu permainan yang berbahaya karena merupakan suatu konfrontasi superpower di laut bebas (lihat peta). Panglima Angkatan Laut Soviet, Laksamana Sergei Gorshkov pernah mengatakan bahwa "cepat atau lambat Amerika Serikat harus mengerti bahwa dia tidak lagi menguasai laut-laut". Akan tetapi Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Thomas Hayward mengatakan bahwa gugus tugas 70 menunjukkan bahwa Amerika Serikat "mempunyai kekuatan yang memadai untuk mengambil inisiatif kalau kita merasa berkepentingan untuk melakukannya. Dan ini dapat dilakukan sekarang, tanpa ditunda-tunda".²

1 Lihat karangan "Confrontation at Camel Station", *Newsweek*, 18 Pebruari, 1980

2 *Ibid.*



Selain itu sekutu-sekutu Amerika Serikat menempatkan satuan-satuan Angkatan Laut di Samudera Hindia. Inggris mempunyai 5 kapal perang dan 3 kapal pendukung, sedangkan Perancis 5 kapal perang dan 9 kapal pendukung. Dengan demikian pihak Barat mempunyai keunggulan.¹

KEMUNGKINAN PERANG

Mengenai kemungkinan invasi Soviet ke Iran dan pecahnya konfrontasi terbuka Amerika Serikat - Uni Soviet tiada sepakat kata. Menurut sementara pengamat kemungkinan itu kecil, terutama setelah Amerika Serikat menyatakan tekadnya untuk membela Timur Tengah. Akan tetapi pengamat-pengamat lain berpendapat bahwa kemungkinan itu tidak boleh diabaikan. Disadari bahwa dengan menguasai Timur Tengah, Uni Soviet mempunyai senjata ampuh untuk menundukkan Barat dan mengamankan suplai minyaknya sendiri, lagi pula mewujudkan ambisi historis Rusia untuk mempunyai pelabuhan di perairan panas yang terbuka sepanjang tahun.

Pendapat yang kedua ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan berikut. Pertama, Uni Soviet telah memusatkan kekuatan yang besar di sepanjang perbatasan dengan Iran, sekitar 24 divisi. Kedua, Uni Soviet telah berhasil menduduki Afghanistan sehingga juga dapat menyerbu Iran dari negara ini. Ketiga, sejak bulan Januari 1980 tersebar selebaran-selebaran di Azerbaijan Iran yang memuat himbauan rakyat Iran kepada kekuatan-kekuatan progresif, khususnya bangsa sosialis yang besar (maksudnya Uni Soviet), untuk membantunya melawan imperialisme Amerika Serikat. Selebaran-selebaran ini ternyata dicetak di Uni Soviet dan rupanya dimaksud untuk menyiapkan jalan bagi suatu invasi dengan memberi dalih "membantu rakyat Iran atas seruannya sendiri". Uni Soviet berusaha membenarkan invasinya ke Afghanistan dengan mengatakan bahwa hal itu dilakukan atas undangan Pemerintah Afghanistan. Keempat, kemungkinan besar polarisasi kekuatan kanan-kiri di Iran yang sejak April 1980 menimbulkan bentrokan-bentrokan berdarah akan meningkat menjadi perang saudara setelah Khomeini tiada. Adu kekuatan serupa itu juga bisa terjadi antara golongan fundamentalis Islam dan golongan moderat di bawah Presiden Bani Sadr, yang sejak beberapa waktu terlibat dalam suatu perebutan kekuasaan yang sengit. Bila hal itu terjadi, Uni Soviet bisa memanfaatkannya untuk turun tangan dan membantu golongan kiri sesuai dengan Doktrin Brezhnev.²

1 Lihat karangan "A U.S. Buildup in the Gulf", *loc. cit.*

2 Lihat *Foreign Report*, 16 Januari 1980

Rupanya Amerika Serikat telah menyadari adanya kemungkinan campurtangan Soviet serupa itu dan menyusun suatu rencana untuk menghadapinya (contingency plans), seperti pernah disiarkan antara lain oleh TV Indonesia. Menurut rencana itu, Amerika Serikat akan berusaha menangkis serbuan Soviet serupa itu dengan sejumlah tindakan:

- mengerahkan pesawat-pesawat kapal induk;
- menerjunkan pasukan-pasukan divisi lintas udara 82 dan 101;
- mengerahkan kapal-kapal gudang senjata dari Diego Garcia ke pantai Iran untuk mendaratkan senjata-senjata berat dan suplai;
- mendatangkan 1.500 marinir dari Diego Garcia, 1.500 marinir dari Laut Tengah dan 4.000 marinir dari Pasifik;
- mendatangkan beberapa skuadron pesawat tempur dari Eropa Barat;
- mengangkut lewat udara Brigade Amfibi Marinir ke-7 ke daerah krisis di mana senjata beratnya telah didaratkan oleh kapal-kapal tersebut di atas;
- mendatangkan Divisi Infanteri Bermotor ke-24 yang telah siap di Amerika Serikat.¹

PENUTUP

Boleh jadi semuanya itu sudah merupakan suatu deterrence yang efektif, sehingga Uni Soviet tidak akan melakukan petualangan serupa itu karena bukan saja mahal tetapi juga mengandung resiko besar. Uni Soviet tidak akan gegabah melakukan sesuatu yang bisa mengobarkan perang nuklir yang akan menghancurkan industri-industrinya yang dibangunnya dengan susah payah dan banyak pengorbanan sekian lamanya. Akan tetapi bila pecah perang saudara di Iran antara golongan kanan dan kiri, godaan bisa menjadi terlalu besar bagi Uni Soviet untuk tidak memanfaatkan kesempatan itu. Dalam keadaan itu dia bisa menyerbu Iran dengan harapan dapat menguasainya dengan cepat sebelum Amerika Serikat bisa berbuat sesuatu untuk menggagalkannya. Kemungkinan ini tidaklah besar karena Pasukan Gerak Cepat dapat mendahului kedatangan pasukan-pasukan Soviet. Suatu invasi memerlukan persiapan-persiapan yang dapat diketahui dengan alat-alat mutakhir. Namun kemungkinan serupa itu tidak boleh diabaikan karena taruhannya besar sekali. Seperti diutarakan di atas, dengan menguasai kawasan Teluk Parsi, Uni Soviet bukan saja mendapatkan sumber minyak murah yang berlimpah-limpah tetapi juga dapat menundukkan negara-negara Eropa Barat.

¹ Lihat *Newsweek*, 4 Februari 1980; lihat juga John J. Fialta, *loc. cit.*

KAWASAN TELUK PARSİ PUSARAN STRATEGIS KRISIS DUNIA*

The World Crisis adalah judul buku Winston Churchill tentang sejarah Perang Dunia I. Ditinjau dari jaman kita, perang itu tampak sebagai suatu pergulatan Eropa yang bersifat lokal, biarpun akhirnya memerlukan intervensi ekstern untuk menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh negara-negara Eropa. Catatan serupa kiranya dapat dibuat mengenai Perang Dunia II dan Perang Dingin. Sejak 1945 diperlukan investasi kekuatan Amerika yang tidak ragu-ragu untuk mempertahankan stabilitas dan kemerdekaan Eropa Barat, Jepang dan negara-negara lain yang lebih dahulu disebutkan sebagai Dunia Bebas. Tanpa kekuatan Amerika, negara-negara bebas lainnya tidak lagi suatu entitas yang secara geostrategi bisa berdiri sendiri.

Sejak 1945 dunia mengalami suatu krisis yang terus menerus, yang membuat kecil krisis sebelumnya yang digambarkan oleh Churchill itu - suatu krisis yang muncul dalam berlanjutnya konflik antara Uni Soviet dan Amerika Serikat serta sekutu-sekutu mereka. Mungkin unsur krisis energi yang paling penting, seperti berkembang sejak awal 1970-an, adalah bahwa krisis itu memberikan suatu dimensi baru kepada persaingan politik dan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet - suatu dimensi yang secara dramatis diungkapkan oleh tindakan-tindakan dan ancaman-ancaman Soviet selama Perang Timur Tengah tahun 1973. Dimensi yang lebih luas itu menempatkan soal-soal seperti kekurangan bahan bakar dan prestasi ekonomi dalam proporsi sebenarnya karena mempunyai kemampuan untuk menentukan nasib politik umat manusia.

* Diambil dari James R. Schlesinger, *The Strategic Vortex*, catatan-catatan perpisahan di depan National Press Club di Washington, pada 16 Agustus 1979, yang kemudian dimuat dalam *The Washington Quarterly*, Winter 1980, oleh B. Wiroguno.

Dewasa ini kita menghadapi *suatu krisis dunia yang jauh lebih luas* daripada krisis yang dilukiskan oleh Churchill setengah abad yang lalu, dan yang menjadi lebih berbahaya akibat masalah-masalah minyak.

Pusaran strategis krisis itu kini terletak di Teluk Parsi dan kawasan Timur Tengah sekitarnya yang memiliki cadangan minyak yang luas. Dengan demikian krisis itu terpusat di suatu kawasan yang secara politik mudah goyah dan ditandai permusuhan-permusuhan historis dan negara-negara bangsa yang struktur-struktur sosialnya belum mempunyai cukup perlengkapan untuk menangkis pukulan-pukulan perubahan politik, ekonomi dan sosial yang cepat. Namun Barat, semua negara bebas, dan kemerdekaan itu sendiri, untuk masa di depan kita ini tetap *bergantung pada akses ke sumber-sumber daya minyak kawasan volatil* (mudah goyah) ini.

Tidak ada orang yang mengantisipasi sepenuhnya munculnya ketergantungan ini dan kerawanan ekornya. Dalam arsitektur sesudah Perang Dunia II, NATO merupakan sokoguru utama keamanan Barat. Namun organisasi ini hanyalah suatu aliansi pertahanan tradisional yang dimaksud untuk mem-bela *keutuhan wilayah* negara-negara penandatangannya. Sehubungan dengan perkembangan-perkembangan berikutnya, NATO kini *bukan basis yang cukup bagi keamanan Barat* karena tidak memberikan perlindungan bagi sumber-sumber daya energi yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup kolektif Barat.

Sampai belakangan ini rasa takut yang ditimbulkan oleh kekuatan Amerika Serikat merupakan deterrence terhadap invasi dari luar maupun minimum kestabilan politik di kawasan. Sesudah 1945 tekanan Amerika mampu menekan Stalin untuk menarik pasukan-pasukan Soviet dari Iran Utara. Kini tekanan dari Brezhnev mengalir ke arah sebaliknya. Panorama geostrategis telah berubah secara dramatis. Runtuhnya Lingkaran Utara, kekacauan politik di Yaman Utara dan Selatan, dan di Tanduk Afrika, dan kerawanan lain-lain negara kawasan Teluk; semuanya itu menunjukkan *perlu nya suatu tanggapan yang baru dan efektif.*

Bahkan dalam arti perimbangan militer, arah perkembangannya mence-maskan. Uni Soviet dekat dan mengawasi kawasan yang diinginkan oleh Rusia sejak jaman Peter Agung. Kemampuan militernya terus meningkat, khususnya dalam bentuk mobilitas strategis dan kekuatan divisi-divisi lintas udaranya. *Di kawasannya itu sendiri tiada kekuatan imbalan.* Angkatan bersenjata Shah kiranya bisa mengadakan suatu pertahanan yang lemah, tetapi kini keamanan beralas pada perlindungan Allah. Kekuatan Barat di kawasan adalah kecil dan pada akhir garis-garis suplai yang panjang. Cadangan-cadangan militer Barat yang besar jauh dengan segala implikasinya

bagi suatu tanggapan cepat. Di kawasan tiada kehadiran militer Amerika Serikat yang berarti, suatu kenyataan yang pasti dipikirkan oleh penduduk kawasan kalau mereka mengamati kehadiran yang menakutkan di sebelah utara itu.

Untuk banyak orang Amerika yang sejak Vietnam percaya bahwa kelemahan militer merupakan suatu bentuk keutamaan dan kekuatan moral, keadaan itu tidak menimbulkan kecemasan. Akomodasi diam-diam adalah satu-satunya pertahanan serupa itu, dan petunjuk-petunjuk masuk akal nya pandangan ini selalu dapat ditemukan. Baru-baru ini Georgi Arbatov, yang kaitannya dengan KGB mungkin tidak begitu dikenal seperti kemampuannya untuk mempengaruhi dan mendamaikan kaum elite Amerika, mengatakan dalam suatu wawancara bahwa Uni Soviet "pasti tidak akan mengganggu suplai minyak Barat" karena gangguan serupa itu "adalah tindakan-tindakan bermusuhan yang dekat dengan suatu pernyataan perang". Tidak diragukan bahwa sementara orang merasa jaminan itu cukup. Saya hanya mencatat bahwa episode itu merupakan suatu kunci bagi opsi-opsi yang dipikirkan oleh Uni Soviet dan yang harapan saya ditolaknya, paling tidak untuk waktu sekarang.

Bagi mereka yang kurang puas, implikasi-implikasi di bawahnya adalah kuat. *Penguasaan Soviet atas keran minyak di Timur Tengah akan berarti akhir dunia seperti kita kenal sejak 1945 dan akhir perhimpunan negara-negara bebas.*

Itu jelas berarti bahwa Barat tidak dapat lama membiarkan keunggulan regional kekuatan militer Soviet. Tuntutan minimum ialah diciptakannya di kawasan suatu perimbangan kekuatan militer yang kasar. Tanpa perimbangan serupa itu tidak akan ada kekuatan deterrent yang mampu menangkis tekanan-tekanan jangka panjang Soviet dan itu akan berarti erosi pengaruh Barat secara terus menerus. Karena kehadiran Soviet di seberang perbatasan adalah masif, *demilitarisasi Samudera Hindia akan melumpuhkan Barat.* Tindakan serupa itu tidak boleh dipikirkan lebih lanjut karena akan mencegah penempatan kekuatan laut yang besar di kawasan dan secara demikian menutup jalan untuk memperbaiki ketidakseimbangan sekarang ini.

Tidaklah cukup mengidentifikasi "suatu pelengkungan krisis". Barat juga harus menangani keadaan sekarang ini secara efektif. Di masa mendatang hal ini akan menguji kecerdasan dan kekuatannya.

Bahkan kalau tidak terjadi hal yang paling buruk, dan kalau keran minyak tidak menjadi unsur yang menentukan dalam pertarungan Timur-Barat - berkat kesabaran Soviet atau deterrence yang efektif - kesulitan-kesulitan

tetap besar. *Keunggulan dan dekatnya kekuatan militer Soviet meningkatkan kemampuan Soviet untuk mempengaruhi dan melakukan subversi.* Di Iran, munculnya kembali Partai Tudeh (khususnya dalam organisasi ladang-ladang minyak) dan semakin kuatnya golongan kiri pro-Soviet secara terbuka maupun diam-diam merupakan perkembangan-perkembangan penting selama tahun yang lalu. Orang dapat merasa bahwa infrastruktur disiapkan secara berangsur-angsur untuk *suatu kudeta mendatang* - sejalan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di Afghanistan pada tahun-tahun belakangan ini. Belum lama ini Irak berhasil mengatasi suatu perebutan kekuasaan, yang ditandai oleh unsur-unsur baru skisma keagamaan yang mengisyaratkan bahwa *ketidakstabilan akan berlangsung terus* - menyusul suatu perjuangan jangka panjang dan berlanjut untuk menguasai ancaman komunis internnya.

Bahkan kalau kita lupakan kesempatan-kesempatan untuk gangguan dari luar serupa itu, *arus minyak dari negara-negara OPEC belum bisa dianggap dapat diandalkan sepenuhnya.* Sistem dunia untuk produksi dan distribusi minyak telah sangat dibebani. Prospek perbaikan adalah kecil, kalau ada. Setiap gangguan berat - akibat keputusan politik, ketidakstabilan politik, aksi-aksi teroris, atau masalah-masalah teknis yang besar - akan mengakibatkan kekacauan gawat.

Dalam suatu pasaran seketat itu, sementara produsen akan bermain kucing-kucingan karena alasan-alasan ekonomi (untuk mempertahankan harga-harga tunai - spot prices - tinggi), alasan-alasan politik, atau karena kesewenang-wenangan belaka. Tindakan-tindakan yang baru-baru ini diambil atau ancamannya untuk mengurangi atau mengalihkan produksi, oleh negara-negara tertentu seperti Nigeria, Libia dan Aljazair, mengungkapkan ketatnya pasaran itu dan terus berlangsungnya kerawanan negara-negara konsumen.

Selain itu Iran terus berada di tepi anarki. Suatu gangguan ekspor Iran yang baru akan mempunyai akibat-akibat yang sangat buruk. Dan akhirnya, bahkan gangguan-gangguan terbatas dalam arus minyak serupa itu bersandar pada premis terus berlangsungnya stabilitas dan sikap mendukung Arab Saudi. Karena sumbangan Saudi bukan saja menentukan, melainkan juga terus meningkat. Kalau kita mengakui bahwa *hari depan dekat energi bergantung pada kestabilan politik Arab Saudi*, kita juga harus mengakui bahwa kerajaan itu kini *rawan terhadap ragi perubahan sosial*. Di negara ini kepekaan terhadap korupsi meningkat secara dramatis menyusul kejadian-kejadian di Iran. Dan kalau kita tidak mengakui kemungkinan relevansi perkembangan-perkembangan di Iran, kita cukup kembali kepada pandangan Tocqueville mengenai dampak perubahan ekonomi atas struktur-struktur sosial tradisional. Soal ini adalah begitu delikat sehingga bahkan jarang disebutkan, namun hal ini tidak boleh mengisyaratkan bahwa soalnya tidak sangat penting.

Komentar-komentar mengenai hal ini hanya menggarisbawahi bahwa arus minyak OPEC adalah tak tentu dan bisa mengalami kejutan-kejutan yang berat dan tak dapat diramalkan. Namun bahkan kalau kita beruntung dan tiada gangguan-gangguan suplai yang berseling-seling, arus minyak serupa itu kiranya tidak akan meningkat.

Kemampuan produksi negara-negara OPEC kiranya tidak akan meningkat. Ramalan itu mengungkapkan keputusan-keputusan politik yang kiranya akan diambil mengenai menariknya tambahan investasi dalam kemampuan produksi maupun keterbatasan sumber dayanya. Produksi OPEC tidak akan naik bahkan sebanyak 10% dari tingkat sekarang ini - dan kiranya bahkan akan menurun pada tahun-tahun mendatang. Produksi non OPEC mungkin akan meningkat dengan prosentase tinggi, tetapi dari dasar yang relatif rendah. Secara mutlak peningkatan non OPEC itu akan kurang berarti - mungkin 10% dari konsumsi Dunia Bebas sekarang ini - dan untuk sebagian besar itu akan diserap oleh negara-negara berkembang dan lain-lain negara industri. Produksi minyak sedunia - dan konsumsi - tidak akan pernah jauh melebihi 65 juta barrel per hari, dan kita sudah sangat dekat dengan tingkat itu. Minyak, bahan bakar pilihan, yang telah mendorong perluasan ekonomi yang luas sejak Perang Dunia II, tidak akan lebih lama tersedia dalam jumlah yang semakin meningkat untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut dari ekonomi dunia.

Harga-harga secara tak terhindarkan akan mengungkapkan meningkatnya tekanan permintaan terhadap suplai yang terbatas. Kedudukan Arab Saudi untuk mengerem meningkatnya harga-harga dalam tubuh OPEC sudah sangat berkurang. Dengan sedikit kelebihan produksi atau tanpa kelebihan sama sekali, harga-harga pasti akan naik, kecuali kalau terjadi suatu resesi dunia.

Dalam keadaan itu dapat dimengerti, dan telah menjadi mode, bahwa orang mencaci maki kartel OPEC. Sudah barang tentu hal itu memuaskan emosi. Tetapi Barat harus mengerti sepenuhnya bahwa caci maki atau ancaman betapa banyakpun kiranya tidak akan mengubah kenyataan-kenyataan suplai dan harga. Negara-negara OPEC memiliki sekitar 80% cadangan minyak Dunia Bebas yang terbukti - dan prosentase itu kiranya akan meningkat. Lagi pula kekuatan-kekuatan pasar kini menguasai perkembangan-perkembangan harga dan mau tak mau *mendorong harga minyak internasional ke atas*. Dalam kenyataan, Kanada dan Meksiko, dan para produsen Laut Utara telah menetapkan harga-harga yang jauh lebih tinggi daripada harga-harga OPEC. Telah tiba saatnya bagi Barat untuk mengakui kenyataan, betapa pahitpun hal itu.

Hari depan energi adalah suram dan kiranya akan semakin suram dalam dasawarsa mendatang. Kalau Barat mengambil tindakan-tindakan koreksi

yang tegas dan inteligen, hari depan bisa menjadi kurang suram. Namun, di bawah sinar harapan-harapan sejarah tindakan-tindakan koreksi serupa itu hanya akan berfungsi sebagai obat peringan penyakit dan bukan penyembuhnya.

Betapa stabil, betapa tahankah dasar politik domestik Amerika Serikat pada waktu dia menghadapi kesulitan-kesulitan keamanan dan ekonomi nasional akibat kerawanan dan hambatan-hambatan dalam suplai energi? Pasti terdapat cukup alasan untuk prihatin. Sesudah Vietnam, persoalan-persoalan politik luar negeri dan keamanan militer tidak menarik bagi rakyat Amerika Serikat. Sesudah Watergate, semua institusi dicurigai secara luas.

Banyak orang Amerika mengatakan percaya bahwa kekurangan energi tidaklah sungguh-sungguh. Mungkin ini merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dikembangkan untuk menyingkirkan gagasan pahit bahwa perubahan tidak dapat dihindari yang menyembunyikan suatu kesadaran yang mendalam kalaupun tidak sadar bahwa masalah itu nyata. Tetapi banyak orang siap untuk menghibur dengan mengisyratkan bahwa suatu alat institusional bisa mengatasi masalah energi. Golongan Kiri menyalahkan industri minyak. Golongan Kanan menyalahkan pemerintah. Tetapi tingkah laku serupa itu hanya mengungkapkan tendensi sesudah Watergate untuk menyerang institusi-institusi. Ini hanyalah cara lain untuk menghindari masalahnya dan kiranya tidak akan menghasilkan lebih banyak minyak mentah.

Fantasi yang tersebar luas bahwa Amerika Serikat mempunyai cadangan minyak terbukti yang besar sekali, yang disembunyikan dan tidak dilaporkan, adalah sesuatu yang sulit dimengerti. Ini mungkin termasuk psikopatologi. Tetapi fantasi ini alat yang baik bagi mereka yang ingin menyalahgunakan harapan-harapan dan ketakutan rakyat Amerika, yang dengan berbagai cara mengisyratkan bahwa di tempat tertentu terdapat simpanan minyak yang besar sekali yang akan menghilangkan kesulitan-kesulitan. Demagogi kiranya tidak akan menjadi ganti minyak mentah yang efektif.

Apa yang harus dilakukan untuk meringankan masalah suplai energi dan reperkusinya? Pertama, orang harus mengakui masalah ini dalam kedalaman dan kegentingannya - tanpa memutar lidah. Kedua, orang harus menyingkirkan segala panasea yang biasa - gambaran arus minyak baru dari Arab Saudi, Meksiko, Cina, timbunan-timbunan dalam negeri yang dirahasiakan atau, belakangan ini, bahan-bahan bakar sintetis. Ketiga, orang harus meninjau kembali segala praanggapan: kemungkinan suplai, harga-harga yang dapat diterima, bahan-bahan bakar yang dapat diterima, resiko-resiko yang dapat diterima, dan peraturan-peraturan lingkungan dan lain-lain yang dapat dilaksanakan.

Produksi minyak mentah dalam negeri, orang harus mengakuinya, tidak akan meningkat dan kiranya bahkan akan menurun dalam dasawarsa mendatang ini. Dekontrol hanya akan menurunkan laju kemunduran itu. Kalau bekerja sangat keras dan sangat beruntung di bidang-bidang frontier, Amerika Serikat mungkin mampu mempertahankan produksi minyak mentah dekat tingkat sekarang ini. Bagaimanapun Amerika Serikat dewasa ini menghasilkan minyak sebanyak Arab Saudi. Tetapi dia memompa cadangan terbuktinya enam kali lebih cepat. Itu tidak dapat berlangsung lama.

Prospek produksi gas alam dalam negeri untungnya lebih menggembirakan. Tetapi Amerika Serikat selama dasawarsa mendatang ini kiranya tidak akan menghasilkan lebih banyak gas alam daripada sekarang ini. Oleh sebab itu secara keseluruhan Amerika tidak akan melihat tambahan suplai dalam negeri. Kalau impor minyak menjadi mantap dengan 8,5 juta barrel per hari lewat pembatasan impor atau terbatasnya persediaan, dia harus mengarahkan pandangannya ke jurusan lain untuk memungkinkan perekonomian tumbuh terus. Kendati efisiensi konservasi yang berarti dan menggembirakan, tambahan energi akan dibutuhkan terus untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kebutuhan energi untuk setiap persen pertumbuhan GNP kini telah berhasil diturunkan menjadi 0,5 atau 0,6%. Ini harus dipertahankan dan kiranya usaha itu akan berhasil. Namun penggunaan batubara dan tenaga nuklir harus bersama-sama dinaikkan - dengan laju 6% setahun untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sedang.

Soalnya adalah sesederhana itu. Karena tersedianya hidrokarbon pada dasarnya stabil, *batubara dan tenaga nuklir harus meningkat prosentasenya dengan cepat* dari dasarnya yang relatif rendah dewasa ini. Tetapi penggunaan batubara tidak akan meningkat cukup cepat selama mekanisme *Clear Air Act* tidak diubah. Sedangkan dipertahankannya standar mutu udara lingkungan dapat didukung, pertumbuhan penggunaan batubara yang diperlukan tidak dapat dicapai dengan adanya hambatan-hambatan mekanis dan legislatif sekarang ini. Hambatan-hambatan psikologis dan prosedural terhadap pembangunan pusat-pusat pembangkit tenaga nuklir yang terkenal itu juga harus diatasi. Secara terus-terang, kalau tidak dapat dicapai penggunaan batubara dan tenaga nuklir yang lebih besar selama dasawarsa mendatang ini, masyarakat Amerika Serikat mungkin tidak akan dapat mempertahankan tingkat kesejahteraannya sekarang ini.

Untuk jangka panjang, *produksi bahan-bahan bakar sintetis harus dimulai*. Akan tetapi bahan-bahan bakar sintetis tidak akan banyak mempengaruhi ekuasi dalam dasawarsa mendatang ini. Pada tahun-tahun 1990-an produksi serupa itu dapat berarti suatu tambahan suplai yang bermanfaat. Dia bukan panacea (obat segala penyakit). Namun seandainya program serupa itu

dimulai satu dasawarsa yang lalu, pasaran minyak sekarang ini tidak akan begitu ketat dan riskan, dan harga minyak mungkin akan beberapa dollar lebih rendah daripada sekarang ini.

Dilemanya sangat jelas. Harus digunakan lebih banyak batubara dan tenaga nuklir, dengan teknologi yang tersedia kini, atau sebagai alternatif, masyarakat harus menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan tingkat pengangguran yang memingkat. Reperkusi-reperkusi politik dari stagnasi ekonomi serupa itu akan mengalihkan perhatian dari kesulitan-kesulitan internasional Amerika Serikat dan menambahnya.

Pendek kata, Amerika Serikat harus menangani masalah energinya secara efektif, menerima suatu penyesuaian, bahkan suatu penurunan, harapan-harapan historisnya. Bagaimana masyarakat Amerika Serikat akan menanggapi revolusi menurunnya harapan-harapan? Kami tidak tahu. Akan tetapi kami tahu ini: hanya suatu masyarakat dengan ketahanan dan percaya diri akan mampu mengatasi masalah-masalah yang sulit ini tanpa perubahan-perubahan radikal dalam institusi-institusi sosialnya.

Dan kembali ke uraian kami di atas mengenai tantangan-tantangan di gelanggang internasional, hanya suatu masyarakat yang percaya diri dapat terus memikul tanggungjawab internasional Amerika Serikat secara efektif.

Dapat dikatakan lebih banyak lagi. Tetapi kami ingin mengakhiri uraian ini dengan hal mendasar ini: masalah energi harus ditinjau sebagai bagian suatu kanvas strategis yang lebih luas. Energi menuntut kepada Barat untuk memusatkan perhatiannya pada kawasan-kawasan dunia di luar perhatian tradisionalnya. Tantangan-tantangannya tak terbilang banyaknya. Di satu pihak, Amerika Serikat harus cepat menyesuaikan perekonomiannya dengan suatu keadaan kekurangan kronis dalam suplai energi tradisionalnya. Di lain pihak, dia harus menghindari keadaan di mana sumber-sumber daya energi yang dibutuhkan jatuh di bawah kekuasaan suatu kekuatan musuh. Pada keberhasilannya, bergantung kelangsungan hidup ekonomi dan politik Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya - dan mungkin kelangsungan kebebasan itu sendiri.

Amerika Serikat telah menghadapi tantangan-tantangan serupa itu sebelumnya. Sesudah Perang Dunia II, negara ini mempunyai visi untuk menanamkan kekuatan dan prestisenya guna memperkuat Eropa Barat. Berkat tindakan-tindakan itu dicapai rehabilitasi dan keamanan ekonomi. Dewasa ini keadaannya dan sementara tantangannya berbeda. Namun sekali lagi Amerika Serikat harus menanamkan kekuatan dan prestisenya untuk memperkuat negara-negara Teluk Parsi melawan ancaman dari luar. Itulah

syarat mutlak strategis untuk melalui periode transisi energi ini dengan baik.

Sejarah menakdirkan bangsa Amerika untuk menjadi superpower -bahkan satu-satunya superpower yang besar di antara bangsa-bangsa bebas. Kalau Amerika Serikat gagal dalam tanggungjawabnya, akan tampil lain-lain negara, yang jauh kurang baik sikapnya, yang akan siap untuk menggunakan kesempatan-kesempatan yang terbuka - dan sebagai akibatnya negara-negara bebas akan kehilangan warisan kebebasannya.

Kalau bangsa Amerika Serikat memutar punggungnya, sejarah tidak akan memaafkannya.

IRAK KEKUATAN BARU DI TIMUR TENGAH

Kirdi DIPOYUDO

Setahun setelah Saddam Hussein berkuasa sebagai Presiden Irak, kiranya bermanfaat untuk membuat suatu neraca sementara dari hasil-hasil maupun kegagalan-kegagalan negarawan yang pragmatis, ambisius, agresif dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan ini yang memimpin suatu negara yang memiliki potensi ekonomi, militer dan tenaga ahli serta kedudukan strategis seperti Irak. Sewaktu masih menjabat sebagai Wakil Presiden, dia telah diju-luki "orang kuat" Irak, tetapi selama tahun 1979 dia memperoleh kedudukan terkemuka di Dunia Arab dan berhasil memperkuat kedudukan internasional-nya sebagai seorang negarawan kunci di Dunia Arab dan Nonblok.

Premis dasar kita dalam membahas kedudukan Irak setahun setelah Sad-dam Hussein berkuasa ialah bahwa terdapat kaitan jelas antara kejadian-kejadian dalam negeri dan politik luar negeri Irak. Walaupun premis ini berlaku bagi banyak negara, kalau tidak semua negara, dalam hal Irak ini sangat menyolok. Yang dimaksud bukan saja kenyataan bahwa sumber-sumber daya Irak memungkinkannya mengembangkan politik luar negeri yang ambisius dan dinamis, tetapi juga kenyataan bahwa dia harus menghadapi serangkaian masalah politik dan keamanan yang segi-segi intern dan eksternnya berkaitan satu sama lain. Misalnya keresahan umat Shia di Irak Selatan dikobarkan oleh Revolusi Khomeini di Iran, sedangkan hubungan Irak—Iran dipengaruhi oleh politik rezim Irak terhadap umat Shia. Misal lain ialah mendinginnya hubungan antara Irak dan Uni Soviet (dengan latar belakang aspirasi-aspirasi regional Uni Soviet dari Tanduk Afrika sampai Afghanistan) yang tercermin dalam politik Irak terhadap Partai Komunis Irak dan kesediaan golongan komunis untuk ke luar dari kerja samanya dengan Partai Baath. Sikap anti komunis Irak, tidak peduli apakah sikap itu akibat atau salah satu sebab politiknya terhadap Uni Soviet, meningkatkan kemampuannya untuk mengadakan manuver politik di kawasan Teluk dan membantunya dalam usahanya untuk mendapatkan suatu kedudukan terkemuka.

IRAK



Diambil dari *The Middle East Annual Review 1980* (Saffron Walden, 1980), hal. 223

1. KEADAAN DALAM NEGERI

Perkembangan-perkembangan dalam negeri Irak mempunyai bermacam-macam ciri yang tidak selalu baru. Di bawah ini kita akan berusaha menguraikan ciri-ciri yang paling menonjol dalam periode Saddam Hussein menjabat sebagai presiden.

Kegiatan Oposisi

Kegiatan oposisi berbagai unsur berulang kali meningkat, lebih sering daripada di masa lampau. Unsur-unsur itu dapat dibagi dalam dua kategori: pusat-pusat oposisi tradisional di luar pemerintahan - umat Shia, suku Kurdi dan kaum komunis - dan unsur-unsur oposisi atau semi oposisi dalam kelompok yang berkuasa - unsur-unsur dalam angkatan bersenjata yang menantang kepemimpinan presiden yang untuk pertama kalinya selama 22 tahun tidak berasal dari tentara, dan unsur-unsur dalam Partai Baath dan dalam sektor sipil di mana tampak tanda-tanda pembangkangan.

Selama tahun 1979 pergolakan di antara golongan Shia yang merupakan 50-60% penduduk Irak sebanyak 13 juta rupanya meningkat. Faktor-faktor permanen oposisi Shia Irak diperkuat oleh suatu faktor lain yang membakar, yaitu Revolusi Khomeini di Iran yang memberikan segala bantuan yang mungkin kepada kelompok-kelompok bawah tanah di antara umat Shia Irak. Ini adalah akibat cara-cara represif rezim dan kurangnya koordinasi di antara kelompok-kelompok Shia. Partai Daawa yang didukung Iran adalah yang paling menonjol. Pemerintah Baath mengambil tindakan-tindakan tegas: melarang Partai Daawa, secara fisik melenyapkan pemimpin-pemimpinnya termasuk Imam Mohamed Bakr Sadr, mengusir 30.000 orang Shia keturunan Iran dan lain sebagainya. Pada waktu yang sama, rezim Irak seperti semua tiran, memberikan isyarat-isyarat konsiliatoris, berjanji akan memperbaiki taraf hidup golongan Shia, dan berusaha mengambil hati kepala-kepala suku Shia dengan membagi-bagikan hadiah dan lain-lain bujukan. Pada hemat kami, ancaman Shia yang membayangi setiap rezim Sunni di Bagdad, kiranya tidak akan menjadi sangat besar di masa mendatang ini, paling tidak selama konfrontasi Irak—Iran tidak melampaui bentuknya yang terbatas dan dikendalikan sekarang ini. Dalam suatu konfrontasi total Bagdad akan menganggap ancaman Shia lebih berat.

Menyusul beberapa tahun ketenangan di Kurdistan Irak, kegiatan Kurdi muncul kembali, biarpun terbatas, akibat dorongan Iran di bawah Khomeini. Secara formal, orang-orang Kurdi yang merupakan 18% penduduk masih

merupakan anggota dalam Front Nasional Progresif, suatu aliansi di mana Partai Baath mempunyai suara mayoritas yang sangat besar. Implementasi otonomi Kurdi berjalan terus dan pemilihan dewan otonomi Kurdi diharapkan. Akan tetapi dua faksi, yaitu faksi Barazani (Partai Demokrasi Kurdi) dan faksi Tabalani (Persatuan Nasional) aktif di daerah perbatasan Irak—Iran. Keduanya beroperasi dari wilayah Iran dan faksi Tabalani menerima bantuan dari Suriah. Kegiatan Kurdi di luar negeri, khususnya di Eropa Barat, berlangsung terus seperti biasanya, dengan suatu inovasi, yaitu kerja sama dengan orang-orang komunis Irak dalam pengasingan. Adanya bantuan Soviet tidak begitu jelas, tetapi ada petunjuk-petunjuk bahwa Uni Soviet memberikan dukungan. Selama enam bulan pertama rezim Saddam Hussein, orang-orang komunis melarikan diri ke Utara dan sementara di antara mereka bergabung dengan pejuang-pejuang Kurdi.

Rezim Saddam Hussein berusaha memajukan isu otonomi dengan cara-cara luar biasa seperti menghimbau orang-orang Kurdi dalam pengasingan agar kembali ke Irak, di mana mereka akan mendapat pengampunan dan direhabilitasi; memberikan ampun kepada orang-orang Kurdi di penjara-penjara Irak dan lain sebagainya. Sebaliknya orang-orang Kurdi tetap menuntut implementasi otonomi kebudayaan maupun politik; pemukiman kembali orang-orang Kurdi yang dibuang ke luar negeri atau dikirimkan ke Selatan di Kurdistan; bagian pendapatan minyak wilayah Kurdi (Mosul) dan seterusnya.

Pendek kata, masalah Kurdi tetap merupakan suatu faktor ketidakstabilan rezim Irak, dan sepertiga tentara Irak ditempatkan di Kurdistan atau di dekatnya untuk menghadapi setiap perkembangan negatif.

Hubungan golongan komunis dengan rezim Baath di Bagdad adalah suatu krisis permanen yang manifestasi-manifestasinya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Menyusul tindakan-tindakan penindasan yang keras (digantungnya 21 orang aktivis) pada musim semi tahun 1978 dan meningkatnya pengawasan atas kegiatan pemimpin-pemimpin partai, mereka ini menyadari kedudukan mereka yang lebih lemah dalam pertarungan dan memutuskan ke luar dari kerja sama resmi dengan Partai Baath (termasuk ke luar dari pemerintah koalisi) dan bergerak di bawah tanah (Mei 1979). Kegiatan resmi partai dibekukan sama sekali. Pemimpin-pemimpin dan para aktivis ditampung di ibukota-ibukota Eropa Timur dan Yaman Selatan dengan bantuan Soviet. Karena partai bergerak di bawah tanah, maka sulit bagi pemerintah untuk mengawasinya dan rupanya hal itu mendorong rezim untuk mengajak para aktivis partai membuka kembali dialog dan muncul dari bawah tanah. Sejauh ini kaum komunis, rupanya dalam koordinasi dengan Moskwa, menolak untuk kembali ke Front Nasional Progresif. Penolakan mereka untuk ikut dalam pemilihan Majelis Nasional belum lama berselang menunjukkan bahwa

mereka bermaksud meneruskan perjuangan rahasia mereka setelah muncul unsur-unsur tambahan di front dalam negeri.

Mengenai unsur-unsur oposisi dalam kelompok yang berkuasa itu sendiri, di bawah ini diuraikan ciri-cirinya atas dasar informasi parsial yang bobotnya berbeda-beda.

Sepanjang tahun dalam pembahasan ini ada laporan-laporan mengenai adanya ketidakpuasan di kalangan para perwira profesional. Perwira-perwira senior, atau sementara di antara mereka, sudah kurang puas dengan Saddam Hussein ketika dia Wakil Presiden Bakr, tetapi pada waktu itu rasa hormat mereka untuk presiden melunakkan sikap mereka. Pengunduran diri, atau penyingkirannya, pada bulan Juli 1979 rupanya membangkitkan kembali permusuhan yang laten terhadap presiden yang baru. Selain itu, tampilnya Saddam Hussein sebagai Kepala Negara dibarengi pembersihan pada eselon-eselon atas angkatan darat, termasuk eksekusi Panglima yang terkenal Jenderal Walid Mohamed Sirat, yang dituduh terlibat dalam "komplotan Suriah". Lain-lain perwira dimasukkan penjara. Pada bulan-bulan pertama pemerintahannya, presiden baru itu memindahkan hampir 2.000 perwira dan bintara, rupanya sebagai tindakan pengamanan. Dia juga memerintahkan agar setiap orang yang dicurigai tidak loyal terhadap Partai Baath dipensiun, dan lebih banyak lagi ditempatkan di bawah pengawasan yang terus menerus. Dengan demikian tidaklah mengherankan bahwa perwira-perwira Irak meninggalkan Irak (misalnya ke Iran pada bulan September 1979). Alasan lain ketidakpuasan korps perwira ialah penunjukan ipar Saddam Hussein, Adnan Khairallah, sebagai Menteri Pertahanan, biarpun dia termasuk muda dan kurang pengalaman.

Biarpun tidak cukup informasi mengenai hal itu, adalah masuk akal untuk menyimpulkan bahwa pembersihan itu memperkuat kekuasaan presiden atas angkatan darat, tetapi tidak diragukan bahwa hal itu juga menimbulkan lebih banyak ketidakpuasan yang telah memancing dan akan memancing usaha-usaha untuk menantang kekuasaan Saddam Hussein atas angkatan darat dan kedudukannya sebagai presiden. Laporan mengenai eksekusi perwira-perwira pada akhir 1979 dan bulan-bulan pertama 1980 mungkin merupakan buktinya. Rezim rupanya sadar akan adanya ketidakpuasan dalam Angkatan Darat itu dan mungkin itulah yang telah mendorongnya untuk memberikan tunjangan-tunjangan kepada perwira-perwira dan bintara-bintara tahun 1979.

Ada alasan untuk berpendapat bahwa kepemimpinan politik yang tampaknya kohesif tidak mengungkapkan keadaan dalam negeri. Dalam tahun pertamanya sebagai presiden, Saddam Hussein mengambil serangkaian langkah yang menunjukkan adanya persaingan dan bahkan mungkin perebutan kekua-

saan dalam tubuh pimpinan. Misalnya pengangkatan Izzat Ibrahim Al-Douri, pemuji presiden dan seorang tanpa warna, sebagai wakil presiden untuk memblokir orang-orang yang berkuasa seperti Taha Yassin Ramadhan, Wakil Perdana Menteri I, dan Saadam Ghaidan, seorang bekas jenderal dan sekarang Menteri Perhubungan. Ramadhan kini dilukiskan sebagai orang kuat Irak sesudah Saddam Hussein. Dia mempunyai basis kekuasaan dan pengaruhnya sendiri dan kedudukannya dalam partai adalah kuat. Kalau benar laporan-laporan dan penilaian bahwa Saddam Hussein, ketika terbongkar suatu rencana kudeta terhadapnya tahun 1979, juga ingin menyingkirkan Ramadhan tetapi tidak berani melakukannya, maka hal itu bisa membawa ke perkembangan-perkembangan lebih lanjut. Bagaimanapun, bahkan di puncak piramide presiden tidak mempunyai pilihan kecuali mengandalkan lingkungan kecil orang-orang yang loyal padanya, yang umumnya berasal dari kota kelahirannya Takrit, seperti Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Intelijen, yang tak lain ialah saudara tirinya Barazan Takriti.

Penangkapan beberapa orang partai tak lama setelah Saddam Hussein menjadi presiden mungkin merupakan suatu petunjuk besarnya ketidakstabilan dalam tubuh partai selama 1979. Di antara mereka yang ditangkap itu adalah Dr. Munif Al-Razaz, seorang Sunni keturunan Jordania yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komando Nasional. Bahwa Michel Aflaq, pendiri Partai Baath, meninggalkan Bagdad menyusul penangkapan rekan-rekannya rupanya adalah untuk memprotesnya. Ada orang yang menafsirkan langkah-langkah itu sebagai reaksi Saddam Hussein terhadap kecaman yang dilontarkan oleh rekan-rekan separtainya terhadap politik pintu terbukanya untuk Barat.

Pada musim dingin tahun 1979/1980 diketahui bahwa pejabat-pejabat tinggi pemerintah dipenjarakan dan dijatuhi hukuman mati. Latar belakangnya tidak diketahui, tetapi mungkin mempunyai segi ideologi. Bagaimanapun, tidak diragukan bahwa kejadian-kejadian itu juga merupakan faktor ketidakstabilan dalam pemerintahan itu sendiri.

Selama tahun 1979 juga ada laporan-laporan mengenai penangkapan aktivis-aktivis menyusul kegiatan-kegiatan seperti penyebaran selebaran atas nama "kaum independen dari Partai Baath".

Sebagai ringkasan, Partai Baath Irak bukan suatu organisasi homogen yang secara otomatis memihak presiden, tetapi suatu lembaga yang sampai batas-batas tertentu pecah selama bertahun-tahun dalam berbagai aliran, kelompok dan oknum yang saling bersaing, yang memaksa Saddam Hussein mengawasi dengan ketat apa yang terjadi di dalamnya.

Gaya Operasi Rezim

Khususnya dapat dicatat sentralisasi dan sifat kekerasan rezim presiden-sial, yang menganut politik suatu negara polisi. Biarpun media massa memuat sedikit informasi mengenai hal ini, tahun pertama Saddam Hussein sebagai presiden rupanya tahun pencekakan politik di Irak. Tahun itu adalah tahun keresahan di mana tangan besi presiden lebih brutal dari waktu sebelumnya dan sudah mulai terasa pada hari-hari pertama Presiden Saddam Hussein ketika pejabat-pejabat partai dan pemerintah dijatuhi hukuman mati. Kekerasan brutal adalah bagian politik Saddam Hussein. Dibandingkan dengan pendahulunya Presiden Bakr, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Saddam Hussein tidak mempunyai akibat pemantapan kehidupan politik karena kepribadian, gaya operasi, motif-motif, impuls-impuls dan ambisi-ambisinya. Kenyataannya ada kesan bahwa dia gagal memperluas basis kekuasaannya.

Usaha Memperbaiki Citra Saddam Hussein

Selama enam bulan kedua kepresidenannya, setelah berhasil memperkuat kedudukannya dan mengatasi ancaman-ancaman terhadapnya, Saddam Hussein memalingkan perhatiannya untuk mengadakan kontak langsung dengan rakyat, untuk memperkuat kepercayaan umum akan rezimnya dan memperbaiki citranya yang bernoda. Maka di samping menunjukkan suatu tangan besi, dia mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki nasib orang-orang dan masyarakat sebagai keseluruhan dengan meningkatkan gaji pegawai negeri sipil dan militer, memperbaiki keadaan pangan di kota-kota, menggalakkan perdagangan swasta, menindak kaum birokrat yang membuat rakyat menderita, secara pribadi mendengarkan keluhan-keluhan orang-orang, dan menunjukkan toleransi dan secara positif menyebutkan Islam dan tradisi, dan seterusnya. Media massa Irak secara luas memberitakan kegiatan Saddam Hussein dan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam proyek-proyek ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, seperti pemberantasan buta huruf, membuka peluang-peluang ekonomi, sosial dan politik bagi kaum wanita Irak, mengadakan pemilihan parlemen (Majelis Nasional) yang tidak diadakan selama satu generasi, dan lain sebagainya.

Sementara pengamat melihat persamaan antara kultus pribadi yang berkembang di Irak dan kultus pribadi yang terdapat di Uni Soviet pada masa Stalin, dan cukup banyak orang mencap cara-cara Saddam Hussein seperti cara-cara Stalin. Bahkan dapat dikatakan bahwa di Irak negara didahulukan di atas perorangan. Akan tetapi bahkan kalau langkah-langkah rezim untuk

rakyat jelas mengungkapkan keinginannya untuk memperbaiki nama baik dan citranya, kita tidak boleh memperkecil arti sumbangan yang diberikan langkah-langkah itu untuk memajukan masyarakat Irak.

Buildup Militer

Di bawah Saddam Hussein buildup militer berlangsung terus, antara lain sebagai sarana untuk mencapai sasaran-sasaran politik di kawasan, di Dunia Arab dan di Dunia Ketiga. Unsur-unsur yang menonjol dari buildup militer itu ialah berlanjutnya pembelian perlengkapan militer secara besar-besaran di Timur dan Barat, dan pembentukan kerangka-kerangka yang disertai usaha-usaha untuk mengatasi masalah tenaga ahli dan memperbaiki kemampuan tentara untuk beroperasi dekat maupun jauh dari Irak (tentara ekspedisi ke "Front Timur" melawan Israel, peningkatan Angkatan Laut).

Biarpun hubungan dengan Moskwa menjadi dingin, Uni Soviet tetap merupakan pemasok utama tentara Irak. Arus senjata Soviet terus mengalir selama tahun 1979 dan meliputi sistem-sistem senjata yang telah dimiliki Irak maupun yang baru - tank T-72, meriam mobil 122 mm dan 152 mm. Pada akhir 1978 sejumlah helikopter tempur Mig-24 dan pesawat angkut Il-76 tiba di Irak.

Pada waktu yang sama pintu ke Barat dibuka lebih lebar sebagai bagian kebijaksanaan diversifikasi sumber-sumber senjata Irak. Kebijakan ini diambil sesudah perang 1973 dengan maksud untuk mengurangi ketergantungan Irak pada suplai dari Uni Soviet, mendapatkan senjata yang ditolak oleh Uni Soviet, dan meningkatkan persenjataan tentara Irak dengan teknologi Barat yang maju. Khususnya dapat dicatat kontrak-kontrak senjata dengan Perancis (pesawat Mirage F-1 termasuk persenjataan yang rumit, panzer Panhard M3 dengan misil Hot), Brasilia (panzer Cascavel dan Urutu), Jerman Barat (pengangkut tank) dan Italia (kapal-kapal). Kontrak-kontrak itu juga meliputi latihan kader-kader di negara-negara itu.

Di samping perbaikan kerangka-kerangka itu, pada tahun 1979 dilakukan usaha untuk menggunakan senjata-senjata baru dari Timur maupun Barat untuk mengisi kekurangan-kekurangan dalam kerangka-kerangka yang ada dan membentuk kerangka-kerangka baru. Pembentukan divisi panzer keempat (no. 9) telah selesai. Juga mungkin telah dibentuk kerangka-kerangka untuk dua brigade panzer baru (belum jelas apakah yang dimaksud ini adalah penyelesaian Divisi 9, pembentukan brigade panzer yang independen, atau basis bagi pembentukan divisi yang kelima). Irak juga telah menyelesaikan

persiapan-persiapan organisasi untuk suatu divisi infanteri baru (divisi pengawal tapal batas, divisi infantri, atau divisi pegunungan). Seluruhnya kini terdapat 12-13 kerangka divisi lawan 6-7 menjelang tahun 1973.

Yang menyolok dari buildup tahun 1979 ialah tambahan 100 pesawat pemburu (sehingga seluruhnya berjumlah 550), tambahan 500 tank (menjadi 3.000), diperkuatnya satuan-satuan anti tank yang mobil (udara dan darat), dan peningkatan mobilitas angkatan darat. Transaksi Mirage F-1 belum termasuk karena implementasinya baru saja mulai.

Pembentukan suatu satuan SAM tingkat brigade pada H-3 telah selesai. Satuan ini meliputi 7 batterij SA-2/3 dan satu brigade SA-6 yang mobil. Di lapangan terbang H-3 ditempatkan satu skuadron Mig-23 dan 8 Mig-21. Bahwa Irak memandang daerah H-3 penting bukan hal baru dan kenyataannya rezim Saddam Hussein hanya meneruskan implementasi suatu rencana lama untuk menjadikan daerah H-3 suatu batu loncatan bagi pasukan-pasukan yang dimaksud untuk Front Timur. Kegiatan di daerah ini juga sesuai dengan rayuan Irak terhadap Jordania di bidang militer (koordinasi pengawasan udara, kunjungan-kunjungan dan seterusnya).

Buildup militer itu juga meliputi Tentara Rakyat yang sering disebut Tentara Partai yang tugas pokoknya ialah melindungi rezim. Tentara Rakyat ini meliputi dinas pra-militer dan berjumlah sekitar 150.000 orang. Menurut laporan, tentara ini juga menerima senjata-senjata sedang.

Pengembangan kemampuan nuklir Irak berlangsung sejak Bagdad menandatangani suatu transaksi minyak-untuk-atom dengan Perancis pada tahun 1975. Perkembangan yang paling baru ialah suplai uranium yang diperkaya oleh Perancis untuk Irak.

Pembangunan Ekonomi

Salah satu kebijaksanaan Saddam Hussein selama tahun 1979 ialah memperkuat perekonomian Irak. Kebijakan ekonomi dalam negeri Irak bercirikan usaha untuk memperbaiki taraf hidup kelas-kelas rendah, termasuk golongan Shia.

Produksi minyaknya meningkat. Pada tahun 1979 produksi rata-rata ialah 3,7 juta barrel per hari. Dengan demikian Irak adalah penghasil minyak yang kedua sesudah Arab Saudi. Dapat dicatat bahwa Irak menganut suatu politik minyak yang masuk akal; dia tidak lagi termasuk kelompok keras dalam

OPEC mengenai harga dan dia berkeberatan terhadap penggunaan minyak sebagai senjata tanpa dukungan konsensus Arab.

Pendapatan minyak tahun 1979 sebesar US\$ 20 milyar digunakan untuk mengembangkan industri minyak - pabrik-pabrik kilang, pabrik-pabrik petrokimia dan pupuk. Banyak diantaranya menggunakan gas alam, hasil sampingan minyak. Proyek-proyek ini dan proyek-proyek lain dibangun dengan kerja sama perusahaan-perusahaan Barat yang meningkat, terutama perusahaan-perusahaan Jepang, Perancis dan Italia. Ini juga berlaku bagi lain-lain proyek industri.

Perdagangan dengan Barat berkembang lebih cepat daripada perdagangan dengan Uni Soviet dan Eropa Timur. Irak juga menandatangani banyak kontrak dengan negara-negara Dunia Ketiga. Persetujuan-persetujuan ini meliputi pinjaman-pinjaman yang disubsidi yang tidak sepenuhnya mengganti kerugian akibat meningkatnya harga minyak.

II. POLITIK LUAR NEGERI

Saddam Hussein menganut suatu politik luar negeri pragmatis yang memperjuangkan sasaran-sasaran nasional sesuai dengan urutan prioritas yang ditentukannya sendiri. Bagdad di bawah Saddam Hussein bukan lagi ibukota suatu negara yang terpencil. Bagdad mendapat kedudukan kunci di Dunia Arab dan menjadi salah satu fokus Dunia Ketiga. Dia adalah tujuan perjalanan para presiden, perdana menteri dan menteri dari semua benua dan blok. Berikut ini adalah ciri-ciri politik luar negeri Irak dalam periode yang kita tinjau.

Antar Arab

Konfrontasi Irak dengan Iran dilukiskan sebagai usaha untuk mencegah Revolusi Iran meluas ke Dunia Arab. Walaupun kebanyakan alasan bagi konfrontasi ini menyangkut hubungan antara kedua negara itu, Bagdad berhasil mendapat dukungan politik sekelompok negara konservatif, termasuk Arab Saudi, Jordania dan Emirat-Emirat Teluk. Pendapat umum ialah bahwa Irak tidak bermaksud meningkatkan konfrontasi dengan Iran itu, walaupun dia mengambil langkah-langkah untuk menghadapi kemungkinan eskalasi.

Usaha untuk mencapai hegemoni di kawasan Teluk dengan alasan-alasan militer, ekonomi dan politik menyusul jatuhnya rezim Shah Iran jelas

terungkap dalam gerak-gerak Irak sepanjang 1979. Irak berusaha membangun suatu kehadiran di semua forum Teluk dan apabila dilakukan usaha untuk mengabaikan ambisi ini - misalnya pada Konperensi Menteri Luar Negeri Teluk di Taif pada musim gugur tahun 1979, Irak mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar hal itu tidak terulang. Biarpun curiga, para penguasa negara-negara Teluk dan Arab Saudi mengakui kedudukan militer dan politik Irak yang lebih kuat. Ketakutan mereka akan Revolusi Khomeini tetap besar dan Irak berusaha memanfaatkannya untuk maksud-maksudnya sendiri. Irak menunjuk dirinya sebagai pejuang tuntutan dikembalikannya ketiga pulau di Teluk yang direbut oleh Iran pada tahun 1971 dari Uni Emirat Arab dan menawarkan untuk membantu Bahrain, Kuwait dan Emirat Teluk lain manapun yang terancam oleh Iran (perlu diperhatikan bahwa sebagian terbesar minyak Irak diangkut lewat Teluk). Politik Irak terhadap Iran, di samping pragmatisme Saddam Hussein seperti terungkap dalam mendinginnya hubungan dengan Moskwa, penindasan kaum komunis, partisipasi pada Konperensi Islamabad melawan invasi Soviet ke Afghanistan, pemutusan hubungan dengan Yaman Selatan, pembukaan pintu terhadap Eropa Barat, diperkuatnya aliansi dengan Pemerintah Jordania dan Arab Saudi, ikut membuat Irak diterima sebagai partner senior oleh negara-negara Teluk. Pendek kata, kepemimpinan Irak mungkin tidak diakui secara formal, tetapi Irak jelas adalah yang pertama di antara sesama negara.

Pengembangan hubungannya dengan negara-negara Arab konservatif bagi Irak merupakan semacam suatu pendalaman politik yang semakin jelas terungkap dalam munculnya koalisi segi tiga Irak-Jordania-Arab Saudi. Masing-masing dari ketiga negara itu mempunyai perbatasan bersama dengan kedua negara lainnya; mereka mempunyai kepentingan bersama sehubungan dengan Iran di satu pihak dan gerak-gerak Soviet dari Tanduk Afrika sampai Afghanistan di lain pihak; mereka kurang senang dengan politik Yaman Selatan terhadap blok Soviet; mereka juga kurang senang dengan Suriah, dan merupakan sokoguru Pertemuan Puncak Bagdad, sasaran-sasaran dan motif-motifnya. Fakta-fakta itu, di samping citra Irak yang lebih baik, merupakan latar belakang yang selaras bagi konsultasi dan koordinasi taktis antara mereka sebelum konperensi-konperensi antar Arab. Dewasa ini hubungan Bagdad—Amman tampak lebih kuat dan lebih penting daripada hubungan Bagdad—Riyadh atau hubungan Riyadh—Amman. Saddam Hussein berhasil menjalin hubungan cukup erat dengan Raja Hussein dan memberinya isi ekonomi dengan harapan hal itu dapat mendatangkan hasil-hasil penting dalam lingkungan antar Arab dan mungkin juga dalam lingkungan sengketa Arab—Israel. Pada tahap ini rupanya Irak mendapat lebih banyak manfaat dari segi tiga politik ini. Hubungan-hubungannya dalam segitiga ini merupakan contoh cemerlang keluwesan dan pragmatisme suatu negara yang pada prinsipnya dibimbing oleh Doktrin Baath - suatu doktrin yang meramu

komponen-komponen sosialisme, atheisme, sekularisme dan Pan Arabisme yang semuanya asing bagi kerajaan Jordania maupun Arab Saudi dan lebih cocok untuk Suriah dan Yaman Selatan.

Mengingat apa yang dikemukakan di atas, tidaklah mengherankan bahwa Irak relatif mudah berhasil menduduki tempat sentral di Dunia Arab setelah Mesir dipencilkan. Pertemuan Puncak Tunis (musim gugur 1979) dan Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri dan Ekonomi di Amman (Juli 1980) mengukuhkan keberhasilan Irak menarik garis politik dan ekonomi bagi kebanyakan Negara Arab. Hasil-hasilnya bahkan lebih menyolok kalau dibandingkan dengan hasil-hasil "front keteguhan" yang bertemu di Tripoli pada musim semi 1980, menyusul keretakan yang terjadi pada waktu Konperensi Para Menteri Luar Negeri Islam di Islamabad (Januari 1980) - keretakan yang untuk sebagian adalah akibat keputusan Irak untuk ikut serta dalam konperensi ini yang mempunyai watak anti Soviet ketika direncanakan.

Perasaan Bagdad memiliki kekuatan yang semakin besar membawa ke usul untuk menerima Piagam Nasional (8 Desember 1979), yang dalam kenyataan merupakan usaha pribadi Saddam Hussein untuk memaksakan suatu Doktrin Nonblok Arab dan memperlemah hubungan negara-negara Arab dengan blok-blok global. Bagaimanapun tahun 1979 menunjukkan bahwa adalah koalisi pimpinan Bagdad yang memberikan kepemimpinan politik di Dunia Arab, dan bukan "front keteguhan" pimpinan Suriah yang tidak dapat mengandalkan dukungan penuh Aljazair, PLO atau bahkan Yaman Selatan.

Hubungan-hubungan politik Irak dengan Suriah memburuk dan Irak rupanya ikut mendalangi pergolakan di Suriah. Di lain-lain bidang, hubungan Irak dengan Suriah lebih sedikit biasa. Minyak Irak masih mengalir ke dan lewat Suriah. Perbatasan kedua negara masih terbuka untuk lalu lintas orang dan barang. Lagi pula, baru-baru ini Irak menunjuk seorang Dubes baru untuk Damaskus menyusul kekosongan beberapa bulan, dan memenuhi komitmen-komitmen keuangannya menurut resolusi-resolusi Bagdad dan Tunis. Pendek kata, Irak rupanya berhasil memencilkan Suriah di Dunia Arab tanpa meningkatkan konfrontasi antara kedua negara, dan mungkin itulah maksud Irak sejak semula, yaitu menetralisasi Suriah dan mencegahnya merintangi Irak dalam usahanya untuk memimpin Dunia Arab.

Dalam konteks ini juga harus disebutkan pendekatan kembali antara Irak dan Maroko dan perbaikan hubungan Irak dengan Somalia, Sudan dan Oman, yang tetap ragu-ragu antara Mesir dan "front Bagdad".

Internasional

Semakin kuatnya kedudukan antar Arab-nya, potensi ekonominya dan kedudukannya dalam OPEC meningkatkan arti penting Irak di mata Barat, Timur dan Dunia Ketiga.

Hubungannya dengan Barat, terutama Eropa Barat, dilihat oleh Irak sebagai pengumpul (lever) ekonomi maupun politik. Sepanjang tahun 1979 Irak berhasil meningkatkan hubungannya dengan Italia, Jerman, Jepang, Spanyol, Skandinavia dan khususnya dengan Perancis. Lebih dari 75% impor Irak berasal dari Eropa Barat dan Jepang (perlengkapan militer, teknologi industri, knowhow nuklir dan seterusnya). Politik Irak terhadap Barat rupanya dibimbing oleh keinginannya untuk menciptakan suatu perimbangan politik dalam hubungannya dengan blok-blok dunia. Hubungannya dengan Barat bisa membantunya membebaskan dirinya dari ketergantungannya pada Uni Soviet khususnya dalam bidang suplai senjata dan memungkinkannya menganut politik nonblok yang dilihatnya sebagai suatu penyelesaian bagi masalah-masalah keamanan nasionalnya.

Sepanjang tahun 1979 hubungan Irak—Soviet, yang mulai memburuk pada pertengahan tahun 1978, tetap dingin, biarpun menjelang akhir tahun pertama Saddam Hussein sebagai presiden ada sedikit perbaikan.

Alasan-alasan nasional yang berkaitan dengan perkembangan antar Arab dan regional membuat Irak menjauhkan diri dari Uni Soviet. Berbagai unsur Barat - jurubicara-jurubicara kementerian luar negeri dan media massa di belakang mereka - membuat pernyataan-pernyataan jangkauan jauh mengenai usaha Irak untuk melepaskan diri dari Moskwa, tetapi pada hemat kami pernyataan-pernyataan itu berlebih-lebihan. Memang, gerak-gerak Soviet di Tanduk Afrika, Yaman Selatan dan Afghanistan membangkitkan ketakutan Irak bahwa gerak-gerak itu bisa membawa Uni Soviet dekat Teluk. Ketakutan ini terungkap dalam politik Irak menyusul invasi Soviet ke Afghanistan (kutukan umum invasi dan partisipasi Islamabad mengenai soal itu) dan dalam pembocoran-pembocoran ke pers Kuwait mengenai kemungkinan Irak membatalkan perjanjian persahabatan Irak—Soviet tahun 1972. Sikap mendua Uni Soviet dalam konfrontasi Irak—Iran dan dorongan yang diberikannya kepada kaum komunis Irak dan mungkin juga kepada orang-orang Kurdi juga tidak berbuat sesuatu untuk memperbaiki hubungan Irak—Soviet. Pada semuanya itu harus ditambahkan menurunnya hubungan perdagangan antara kedua negara.

Di lain pihak kita tidak boleh mengabaikan letak geografi Uni Soviet dekat bagian utara Irak dan Kurdistan, kekuatan lautnya di Samudera Hindia, dan

ketergantungan Irak pada suplai senjata Soviet termasuk perawatan, suku cadang dan sebagainya. Irak benar-benar sadar akan kenyataan-kenyataan itu dan selama beberapa bulan yang lalu dia tampak memperlambat keterasingannya dari Uni Soviet, dan kritik anti Soviet awal 1980 pelan-pelan menghilang. Selain itu, Bagdad tidak memboikot Olimpiade Moskwa, menerima Menteri Luar Negeri Afghanistan, bertukar delegasi ekonomi dengan Uni Soviet, mengadakan transaksi dengannya, menyatakan bersedia membaharui dialog dengan dia, terus mengembangkan hubungan erat dengan negara-negara blok Soviet dan memperbaiki hubungannya dengan Bulgaria. Juga ada trend untuk memperbaiki hubungan dengan Yaman Selatan.

Irak kelihatan ingin membatasi perselisihannya dengan Uni Soviet untuk menghindari resiko-resiko yang tak perlu, mendapatkan sebanyak mungkin dari Uni Soviet, dan pada waktu yang sama mempertahankan kebebasan bertindak.

Tahun pertama Saddam Hussein sebagai Presiden Irak adalah tahun kegiatan intensif dalam gerakan nonblok. Irak adalah aktif pada Pertemuan Puncak di Kuba (1979) dan berkat meningkatnya kedudukannya diberi privilese untuk menjadi tuan rumah Pertemuan Puncak tahun 1982. Kegiatan Irak di antara negara-negara nonblok mempunyai dua tujuan: keamanan nasional, yaitu mencegah kawasan geostrategisnya diubah menjadi suatu kawasan konfrontasi superpower; dan tujuan politik, yaitu memperkuat kedudukannya di Asia, Afrika dan Amerika Latin lewat bantuan, pinjaman yang disubsidi dan berbagai hibah. Pinjaman-pinjaman yang disubsidi yang merupakan bagian transaksi-transaksi minyak menciptakan suatu afinitas politik ekonomi dengan banyak negara Dunia Ketiga, misalnya Kenya, Tanzania dan Bangladesh.

Sepanjang 1979 terjadi peningkatan besar dalam bantuan keuangan, militer dan teknis yang diberikan Irak kepada banyak Negara Afrika. Sebagian bantuan ini dikombinasikan dengan transaksi-transaksi senjata dengan Uni Soviet. Antara lain diketahui bulan Pebruari 1980 bahwa perlengkapan militer Soviet lama dikirimkan lewat udara dari Irak ke Zambia via Zaire. Sebagai imbalan perlengkapan lama ini, Irak menerima perlengkapan baru dari Uni Soviet. Di sementara negara yang terlibat terdapat pula instruktur-instruktur Irak. Sudah barang tentu bantuan ini merupakan bagian usaha Irak untuk mendapatkan kedudukan pimpinan di Dunia Nonblok.

Puluhan pejabat tinggi dari negara-negara nonblok di seluruh dunia, termasuk presiden, perdana menteri, menteri dan kepala staf, telah mengunjungi Irak untuk mendapatkan bagian kekayaannya. Sebaliknya pemimpin-pemimpin Irak jarang meninggalkan Irak dan hampir selalu hanya untuk

mengunjungi Arab Saudi. Satu-satunya kesempatan Saddam Hussein mengunjungi suatu ibukota di luar Dunia Arab sebagai presiden adalah ketika dia menghadiri upacara pemakaman pendiri terakhir gerakan nonblok - Marsekal Tito dari Yugoslavia. Tidak tanpa alasan Saddam Hussein disebut Tito Arab. Walaupun Irak dekat dengan Blok Timur bukan saja secara geografis tetapi juga ideologis, pertimbangan-pertimbangan politik keamanan mendorong Irak untuk menganut suatu netralisme seperti Tito, yang seperti Abdul Nasser dikagumi oleh Saddam Hussein dan dalam segi-segi tertentu ditirunya.

Sengketa Arab—Israel

Sengketa Arab—Israel tidak menempati prioritas tinggi dalam tahun pertama Saddam Hussein sebagai presiden. Pada tahap ini Israel tidak merupakan suatu medan tempur bagi Irak. Paling banyak Israel adalah sebuah alat untuk memperkuat kepemimpinan Irak di Dunia Arab. Dalam konsep Irak seperti diutarakan oleh seorang jurubicara Israel yang berwibawa, tidak ada ruang untuk membicarakan suatu alternatif politik bagi persetujuan Camp David selama Israel memiliki keunggulan militer terhadap negara-negara Arab berkat bantuan Amerika Serikat. Maksud Irak ialah secara simultan bergerak ke dua arah: pertama, membangun kekuatan militer dan teknologi, termasuk kekuatan nuklir; dan kedua, melancarkan suatu ofensif politik untuk merongrong ikatan-ikatan Israel dengan Eropa dan mendorong komitmen Amerika terhadap Israel lewat suatu Eropa yang tunduk pada tekanan-tekanan Arab.

Sesuai dengan itu Irak menyambut baik pernyataan kesembilan negara di Venesia sebagai suatu langkah ke arah yang tepat walaupun tidak cukup. Irak mengakui bahwa dewasa ini negara-negara Arab tidak mampu mengalahkan Israel dan oleh sebab itu mengakui kenyataan-kenyataan dan menyetujui dibentuknya suatu Negara Palestina di "bagian Palestina manapun yang dibebaskan dari pendudukan Israel", sambil melakukan persiapan-persiapan untuk tahap di mana negara-negara Arab akan memiliki keunggulan militer terhadap Israel. Perlu dicatat bahwa sikap ini, yang untuk pertama kalinya dinyatakan bulan Juni 1980, merupakan suatu pergeseran dalam politik Irak yang menentang didirikannya suatu Negara Palestina di samping Israel, bahkan dengan alasan-alasan taktisipun.

Selaras dengan garis itu, Irak secara konsisten tidak mau terlibat dalam segala gerak yang bisa membawanya berhadapan dengan Israel sebelum siap. Ketika ketegangan antara Suriah dan Israel meningkat bulan Januari 1980, menyusul perpindahan pasukan-pasukan di Libanon, Irak tidak menyatakan

mendukung Suriah, jangankan bersedia membantu Suriah apabila terjadi konfrontasi dengan Israel.

Kendati segala usaha negara-negara Barat untuk menemukan suatu tanda perlunakan sikap Irak terhadap Israel, Irak tetap menolak eksistensi Israel yang disebutkan sebagai "entitas Zionis" oleh Saddam Hussein dalam pidatonya tanggal 8 Pebruari 1980 ketika dia mengajukan usul Piagam Nasional. Irak juga menolak resolusi Dewan Keamanan 242, mendukung aksi-aksi teroris melawan Israel dan bahkan terlibat (misalnya dalam serangan terhadap Misgav Am bulan April 1980), dan mengenakan tekanan-tekanan ekonomi atas negara-negara Barat dan Dunia Ketiga agar menerima asas-asas pandangan Arab dan merugikan Israel, misalnya sehubungan dengan soal pemulihan hubungan diplomasi antara negara-negara Afrika dan Israel. Irak adalah ujung tombak perang politik pada lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional.

III. PENUTUP

Sebagai penutup disajikan ringkasan dan evaluasi keadaan dalam negeri dan politik luar negeri Irak dalam tahun pertama Saddam Hussein sebagai presiden.

Keadaan Dalam Negeri

Bahaya paling besar yang bisa mengancam rezim Saddam Hussein datang dari koalisi semua kekuatan oposisi, tetapi kemungkinan ini tidak besar.

Mengenai unsur-unsur oposisi di luar pemerintahan/kelompok yang berkuasa, pemerintah sangat takut bahwa pergolakan di kalangan umat Shia akan meningkat dengan dukungan Iran. Bila pecah perang antara Irak dan Iran, masalah ini bisa meningkat menjadi suatu front dalam negeri melawan rezim.

Suatu pemberontakan Kurdi pada tahap ini rupanya tidak besar kemungkinannya. Rezim Baath dapat dianggap mampu untuk menghadapi krisis Kurdi dan membendung bahayanya. Selama Revolusi Iran bersengketa dengan golongan Kurdi Iran, kiranya mudah bagi rezim Bagdad untuk menumpas suatu pemberontakan Kurdi di bagian utara negara.

Dalam jangka menengah tidak diperkirakan akan terjadi pergolakan dalam pimpinan sekarang ini. Gaya memerintah Saddam Hussein dan cara-

cara Stalinisnya - dari kultus pribadi dan banyaknya hukuman mati termasuk hukuman mati pejabat-pejabat senior angkatan darat, partai dan pemerintah sipil - menaburkan benih-benih komplotan melawan dia. Akumulasi kekuasaan di tangan Wakil PM I Taha Hussein Ramadhan dan permusuhan tersembunyi antara dia dan Saddam Hussein bisa menjurus ke suatu perebutan kekuasaan. Ada alasan-alasan untuk menyimpulkan bahwa akan terjadi perubahan dalam pimpinan Irak dalam dua tahun mendatang ini.

Kemampuan Saddam Hussein untuk bertahan dalam kekuasaan sebagian besar bergantung pada tingkat kontrol yang bisa dipertahankannya atas angkatan darat. Setiap usaha untuk menantang pemerintahan Saddam Hussein harus datang dari tubuh angkatan darat atau dilakukan dalam kerja sama dengan unsur-unsur pentingnya.

Untuk memperkuat kedudukannya, Saddam Hussein akan meningkatkan kampanye popularitasnya di seluruh negeri dan akan berusaha membuktikan bahwa dia memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Kekayaan sumber daya Irak yang berlimpah akan membantunya dalam usaha itu.

Dalam kebijaksanaan dalam negeri, Saddam Hussein harus meneruskan garis pragmatisnya dan melepaskan berbagai asas Baath, dan secara demikian mengambil resiko munculnya suatu oposisi ideologi dalam partai itu sendiri.

Kebijaksanaan pembangunan militer dan ekonomi akan diteruskan dengan maksud untuk memperkuat rezim dan memungkinkannya mewujudkan ambisi-ambisi Irak di Dunia Arab dan Dunia Ketiga. Irak akan terus mengurangi ketergantungannya pada suplai senjata Soviet, mempercepat transformasinya menjadi suatu kekuatan laut dan mungkin meningkatkan kerja sama militernya dengan Jordania.

Politik Luar Negeri

Rezim Baath Irak diperkirakan akan terus mempertahankan sasaran-sasaran strategi yang diperjuangkannya sejak berkuasa pada tahun 1968, yaitu unifikasi bangsa Arab di bawah pimpinan Irak. Caranya ialah secara bertahap berusaha mencapai hegemoni di kawasan Teluk dan berusaha memanfaatkan kedudukan ini di lingkungan Arab. Bagdad berkepentingan untuk menyelesaikan gerak-geraknya secara cepat selama Mesir terkucil di Dunia Arab. Irak jelas berkepentingan dengan isolasi Mesir, dan Saddam Hussein akan berusaha mempertahankan dan bahkan memperluas hasil-hasil yang dicapainya pada Pertemuan Puncak Bagdad.

Kita tidak boleh mengabaikan kemungkinan bahwa Saddam Hussein akan lebih senang membantu mempercepat tersingkirnya Presiden Assad dengan maksud untuk memulihkan poros Irak—Suriah sebagai satu-satunya kekuatan efektif melawan Mesir, tetapi sementara itu usaha untuk mengucilkan Suriah akan berlangsung terus.

Konfrontasi dengan Iran kiranya akan berlangsung terus selama Khomeini berkuasa di Iran. Irak diduga akan mempertahankan format/tingkat konfrontasi sekarang ini sambil mencari kesempatan yang baik untuk memberikan suatu pukulan yang menentukan kepada Iran.

Di lingkungan internasional, Irak akan berusaha mencapai suatu perimbangan dalam hubungan-hubungannya dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat agar mampu mempertahankan jarak dengan Uni Soviet dan pada waktu yang sama mengambil keuntungan dari hubungan militer dengan Uni Soviet, paling tidak selama dia masih bergantung secara militer padanya. Dengan maksud itu dia akan memperluas dan meningkatkan ikatan-ikatannya dengan Eropa Barat dan berusaha untuk tidak menjadi terlalu dekat dengan Amerika Serikat. Politik ini juga sesuai dengan usaha Irak untuk menjadi pemimpin nonblok.

Mengenai Israel, Irak tetap menolak eksistensinya. Pemimpin-pemimpin Irak bisa menunjukkan sedikit keluwesan taktis dan semantis untuk menimbulkan kesan yang lebih moderat bagi Barat. Akan tetapi Israel tidak mempunyai pilihan selain menafsirkan pernyataan-pernyataan mereka mengenai keharusan historis untuk mematahkan keunggulan militer dan teknologi Israel sebagai suatu pembukaan bagi suatu perang total.

Pendek kata, kendati politik pragmatis Irak, menurut penilaian kita ada unsur-unsur di Dunia Arab yang berusaha untuk mencegahnya mewujudkan ambisi-ambisinya itu. Dapat diduga bahwa Bagdad akan mengalami kekecewaan dan kemunduran akibat ketakutan dan kecurigaan negara-negara Arab lain, termasuk negara-negara yang bersedia membentuk suatu koalisi pragmatis dengan Irak. Ini berlaku untuk Jordania dan Arab Saudi dan pasti juga untuk Suriah, saingannya di kawasan Bulan Sabit (Fertile Crescent). Ketiga negara ini, yang semuanya berbatasan dengan Irak, akibat watak, kepentingan-kepentingan dan struktur mereka tidak mampu membantu mewujudkan visi Irak, yang bagaimanapun hanya akan menjadikan mereka negara-negara vasal Irak dan mungkin bahkan korban pengambilalihan oleh Irak yang dibarengi kekerasan yang merupakan ciri temperamen Irak dan mengejawantah dalam diri Saddam Hussein Al-Takriti.

SELAT HORMUZ DAN KEAMANAN JALUR MINYAK SUATU TANTANGAN BAGI STRATEGI AMERIKA SERIKAT*

Seperti cula badak yang menikam sisi bawah Benua Asia yang tampak agak surut ke belakang, suatu bagian Jazirah Arab menjorok ke utara ke pantai Iran untuk memisahkan Teluk Parsi dan Teluk Oman dan membentuk Selat Hormuz. Lalu lintas di perairan sempit ini, yang pada tempat-tempat tertentu hanya sedikit lebih dari 20 mil lebarnya, padat sekali. Kapal-kapal tanki yang sarat dengan minyak mentah dari Teluk Parsi tak henti-hentinya hilir mudik untuk memenuhi kebutuhan minyak industri dan transportasi Dunia Barat.

Sheik Ahmad Zaki Yamani, Menteri Perminyakan Arab Saudi,¹ mengemparkan Dunia Barat dengan ramalannya bahwa kaum teroris PLO mungkin akan menenggelamkan sebuah kapal tanki di perairan yang sempit ini dan dengan demikian memblokir 60% minyak yang dibutuhkan Dunia Barat. Sebagai tanggapan Perusahaan Asuransi Lloyd di London mengatakan bahwa akan diperlukan suatu asuransi perang yang khusus bagi kapal-kapal yang mengarungi Teluk Parsi.² Pemerintah Amerika Serikat memperingatkan kapal-kapal yang berlayar di selat ini agar lebih waspada dan berjaga terhadap kemungkinan serangan teroris atau pembajak.³

Dengan pecahnya Revolusi Islam yang menumbangkan kekuasaan Shah Iran, Amerika Serikat kehilangan sebagian kecil impor minyaknya. Sebagai akibatnya bensin dan minyak solar yang dibutuhkan para pekerja, pengemudi

* Diambil dari Richard Earl Hansen, "The Strait of Hormuz and Secure Oil Routes: A Challenge to U.S. Strategy", *Conflict*, No. 2, 1980, oleh Bambang Walgito

1 *The Wall Street Journal*, 2 Agustus 1979, hal. 36

2 *Ibid.*

3 *Ibid.*

truk dan petani menjadi langka, sehingga pemerintah merasa perlu untuk turun tangan mengadakan penjatahan minyak dan menetapkan prioritas-prioritas. Kalau kekurangan impor minyak yang relatif kecil itu saja sudah mampu menggoncangkan kehidupan ekonomi Amerika Serikat, bayangkan apa yang akan terjadi pada industri dan perekonomiannya seandainya dilancarkan suatu "blokade Berlin" di Selat Hormuz, entah oleh Uni Soviet atau PLO, yang menghentikan hampir separuh minyak impornya. Jawabannya adalah kekacauan.

Kepentingan nasional Amerika Serikat menuntut agar hal semacam itu tidak pernah terjadi. Akan tetapi sudahkan Amerika Serikat mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi kepentingan nasionalnya itu dengan mengambil suatu kebijaksanaan yang tepat, mengembangkan strategi, dan menyusun rencana-rencana implementasinya untuk tindakan-tindakan diplomasi, militer dan ekonomi guna mencegah ditutupnya selat itu? Sejauh ini belum kelihatan suatu pernyataan kebijaksanaan Amerika Serikat yang jelas dan pasti.

Dalam kenyataan catatan tindakan-tindakan Pemerintah Amerika Serikat dalam rangka melindungi jalur-jalur minyak benar-benar dicurigai. Misalnya, di sisi lain Jazirah Arab terletak Selat Bab el Mandeb, yang seperti Selat Hormuz merupakan perairan sempit yang dilewati kapal-kapal tanki dari Laut Arab menuju Laut Merah dalam pelayaran mereka ke Dunia Barat lewat Terusan Suez. Pemerintah Amerika Serikat ragu-ragu, padahal Uni Soviet mendapatkan tempat-tempat berpijak yang sangat penting dalam Pemerintah Ethiopia dan Yaman Selatan, yang pantainya menguasai kedua sisi Selat Bab el Mandeb ini.

Kapal-kapal tanki raksasa, yang tidak dapat melewati Terusan Suez karena airnya kurang dalam, harus mengelilingi Afrika dan Tanjung Harapan, yang merupakan bagian dari Republik Afrika Selatan. Akan tetapi Pemerintah Amerika Serikat melakukan banyak hal untuk menjauhkan Pemerintah Afrika Selatan atas nama hak-hak asasi manusia, yang sebenarnya merupakan masalah dalam negeri yang harus diselesaikan oleh rakyat Afrika Selatan sendiri. Sementara itu dengan kegagalannya memahami dan menangani secara positif kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang lebih mendesak, yaitu melindungi dan mengamankan lalu lintas minyak sepanjang pantai Afrika, Pemerintah Amerika Serikat mengabaikan kepentingan nasional rakyat Amerika yang sejati dan utama. Di pantai timur dan barat Afrika kini terdapat negara-negara langganan Soviet yang memiliki pangkalan-pangkalan militer dan laut yang merupakan ancaman potensial bagi jalur-jalur minyak Amerika Serikat.

Secara buta Pemerintah Amerika Serikat menolak tawaran Afrika Selatan agar pangkalan-pangkalan militernya digunakan oleh Angkatan Laut

Amerika untuk melindungi jalur-jalur minyak.¹ Hal ini jelas menunjukkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat belum memberikan prioritas kepada arti strategi jalur-jalur minyaknya yang penting sekali dalam percaturan politik dunia, baik dalam hal jalur pelayaran kapal tanki lewat Selat Bab el Mandeb maupun sekitar Afrika dan Tanjung Harapan. Kesalahan-kesalahan dalam hubungan luar negeri ini sedikit sekali menghibur mereka yang takut bahwa akan timbul kekacauan dalam perekonomian Amerika Serikat seandainya Selat Hormuz ini ditutup ataupun dibatasi lalu lintasnya, entah akibat suatu tindakan sabotase, teror dan perang entah akibat meningkatnya pengaruh Uni Soviet di negara-negara yang berbatasan dengan selat itu.

Suatu dimensi tambahan arti pentingnya kebebasan lalu lintas minyak Teluk Parsi ialah bahwa dalam dasawarsa mendatang Uni Soviet akan menjadi pengimpor minyak karena kebutuhan dalam negerinya semakin meningkat sedangkan sumber-sumber minyaknya sendiri terbatas. Dalam suatu pidato tahun 1977, John C. Stetson, bekas Sekretaris Angkatan Udara Amerika Serikat, berkata:

"Selama bertahun-tahun Uni Soviet swasembada minyak sama sekali. Dia bahkan mampu mengekspor sebagian besar minyaknya ke lain-lain negara Pakta Warsawa. Namun situasinya telah berubah Sebelum akhir dasawarsa mendatang, Uni Soviet sendiri akan terpaksa berpalang ke luar negeri untuk secara ekonomis memenuhi kebutuhan minyaknya yang semakin meningkat Prospek untuk mendapatkan minyak yang murah dari Teluk Parsi dengan ancaman ataupun kekuatan militer dan kemudian menghentikan suplai minyak dunia bebas pastilah sudah masuk pikirannya....."²

Suatu wawancara yang dilakukan oleh koresponden Murray Gart dengan Yasser Arafat dan dimuat dalam majalah *Time*, 20 Agustus 1979,³ kiranya dapat memperjelas persoalan itu. Pimpinan PLO itu menjawab pertanyaan-pertanyaan Gart sebagai berikut:

- P. Apakah minyak Arab terikat pada masalah Palestina?
- J. Pasti. Dan jangan lupa bahwa pada tahun 1982, menurut informasi Amerika Serikat, negara-negara sosialis akan membutuhkan minyak.
- P. Uni Soviet?
- J. Ya, pada tahun 1982 krisis energi akan berlipat ganda.
- P. Apakah anda bermaksud mengatakan bahwa Amerika Serikat dan mungkin juga negara-negara lain tak lagi mendapat minyak kalau negara Palestina gagal didirikan?
- J. Bukan begitu. Kalau begitu saya kan tolol sekali. Coba ingat, setiap kom-

1 Sidang Pertama Kongres ke-96, April 1979, Komite Senat Urusan Hubungan Luar Negeri, *United States Foreign Policy Objectives and Overseas Military Installations*

2 John C. Stetson, bekas Sekretaris Angkatan Udara, Siaran Pers No. 977, Sekretaris Biro Informasi Angkatan Udara Amerika Serikat, Washington D.C., 7 Desember 1977, hal. 5 dan 6

3 *Time*, 20 Agustus 1977, hal. 27

plikasi bagi perjuangan Palestina akan berarti suatu komplikasi bagi krisis Timur Tengah, bahkan komplikasi-komplikasi yang tidak dapat diramalkan oleh komputer Amerika sekalipun, termasuk komplikasi-komplikasi Soviet. Apakah anda berkepentingan mengambil resiko itu hanya sekedar untuk terus memanjakan Israel bayi anda yang nakal itu?

Uni Soviet jelas memahami fungsi sangat penting yang dimainkan oleh jalur-jalur air seperti Selat Hormuz itu dalam ekuasi strategi total. Dalam majalah *Voyennaya Mysl* Mayjen. V. Kruchinin menulis: "Pelaksanaan misi-misi strategis dan pencapaian tujuan-tujuan strategis akan sering memaksa komando menunjuk kekuatan-kekuatan yang diperlukan guna merebut pulau-pulau, kepulauan-kepulauan, selat-selat dan lain-lain wilayah dan sasaran-sasaran yang mempunyai suatu arti strategi yang penting."¹ Dalam majalah yang sama, yang merupakan organ resmi Departemen Pertahanan Uni Soviet dan suara Staf Umum Soviet di bidang teori militer, industri minyak dinilai sebagai sasaran strategis yang paling penting sesudah pusat pembangkit tenaga listrik. Uni Soviet secara lebih konsisten melakukan gerak-gerak strateginya lewat negara lain (misalnya Kuba) daripada melakukan intervensi langsung ataupun mengerahkan angkatan perangnya, dan dengan demikian menangani dan memudahkan kritik-kritik.

Mengenai kemampuan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menghadapi petualangan Uni Soviet di lautan, Kapten John Moore, bekas Wakil Direktur Dinas Intelijen Angkatan Laut Inggris, dan kini redaktur *Jane's Fighting Ships*, mengatakan dalam kata pengantar edisi ke-82 yang baru terbit sebagai berikut:

"Sebagai akibat keragu-raguan dan salah hitung banyak negara nonkomunis, telah timbul suatu keadaan di mana tak ada kapal-kapal secukupnya untuk mengawasi armada Uni Soviet, jangankan untuk turun tangan.

Dengan membuang perisai keamanan laut, para pemimpin Barat telah memperlemah posisi mereka sedemikian rupa hingga mereka sendiri menjadi rawan terhadap pemerasan. Apakah akibat-akibat pemerasan itu? *Hilangnya bahan mentah*, pasaran dan kemerdekaan sahabat-sahabat yang memang tidak cukup kuat untuk menjamin keamanan mereka sendiri, adalah beberapa di antaranya.

Di Amerika Serikat keadaan ini ternyata berasal dari tiadanya kesatuan dalam pengambilan keputusan

Dengan makin meningkatnya kebutuhan akan impor, khususnya impor bahan mentah, *maka kebebasan untuk mencapai sumber-sumber bahan mentah itu dan kelancaran lalu lintasnya lewat laut adalah sangat penting*. Angkatan Laut Amerika Serikat lebih dari mampu untuk melaksanakan tugas itu asal diberi alat-alatnya. (Tekanan ditambahkan)."²

1 Joseph D. Douglass, Jr. dan Amoretta M. Hoeber, *Soviet Strategy for Nuclear War*, Hoover Institution Press, Stanford, California, 1979, hal. 83. (Terjemahan dari *Voyennaya Mysl*, Oktober 1963)

2 *Jane's Fighting Ships*, Edisi ke-82, New York: Franklin Watts, 1979

Menurut *Wall Street Journal*,¹ Sultan Qabus dari Oman kuatir jangan-jangan Amerika Serikat kehilangan keberanian dalam permainan taruhan tinggi dengan Uni Soviet dan secara demikian mendorongnya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dia menegaskan: "Saya percaya bahwa Amerika Serikat harus menggunakan bobotnya secara politik terhadap pihak lain (Uni Soviet) guna meyakinkan orang-orang bahwa mereka tidak boleh bermain api." Selanjutnya *Journal* itu melaporkan bahwa "Sultan dengan cemas mengamati bagaimana Ethiopia berputar ke kiri di Tanduk Afrika, Yaman Selatan semakin dekat dengan Uni Soviet, Afghanistan jatuh ke dalam kekuasaan kaum Marxis, dan Iran meledak dalam suatu revolusi yang mengguncangkan".

Suatu lokakarya tentang strategi energi alternatif yang disponsori Institut Teknologi Massachusetts menghasilkan sebuah laporan yang menyelidiki prospek energi dunia sampai tahun 2000.² Laporan ini dibatasi peringatan: "Walaupun demikian, di dunia nyata ini banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diantisipasi, yang tidak boleh diabaikan Dalam dua puluh lima tahun mendatang anda dapat melihat misalnya: inflasi dan depresi yang terus melaju; perang-perang lokal dan regional maupun kudeta-kudeta; bencana akibat krisis energi; atau gerakan-gerakan teroris. Andaikata salah satu peristiwa itu betul-betul terjadi, maka masa depan kita akan berlainan sekali jadinya." Tim ahli internasional yang ikut dalam lokakarya Institut Teknologi Massachusetts ini berkesimpulan bahwa kebutuhan akan minyak *di dunia nonkomunis* akan melampaui batas potensi produksi minyak pada akhir dasawarsa 1980-an rata-rata 1,9 juta barrel sehari per tahun - *dan akan terus meningkat*. Jadi jelaslah, kejadian-kejadian yang tidak dapat diramalkan yang tidak masuk perhitungan studi ini dapat membawa akibat-akibat yang dalam dan merugikan sekali bagi perekonomian negara-negara nonkomunis yang sangat saling bergantung jauh lebih awal daripada ramalan kita. Pentinglah kenyataan bahwa studi ini belum mencakup situasi perminyakan di dunia komunis, yang menurut Yasser Arafat akan melipat gandakan krisis.

Bahkan sekiranya ada suatu bangsa yang amat bijaksana, yang dengan rencana rapi beralih menggunakan sumber energi alternatif, rencana energi bangsa itupun akan gagal berantakan akibat peristiwa-peristiwa luar yang terjadi di kawasan penghasil minyak atau pada jalur-jalur komunikasi minyak kalau tidak diadakan persiapan-persiapan lebih dahulu yang tepat untuk menanggulangi kejadian-kejadian semacam itu secara efektif dan tepat. Salah satu hal yang akibat langsungnya akan paling merugikan perekonomian dunia

1 *Op. cit.*, catatan 1

2 *Energy: Global Prospects 1985-2000*, Laporan Lokakarya Strategi Energi Alternatif, yang disponsori oleh Institut Teknologi Massachusetts, New York, 1977, hal. 265

dan Amerika Serikat ialah penutupan Selat Hormuz atau bahkan blokade parsialnya.

Bagaimanakah sebenarnya keadaan geografi, cuaca dan kenyataan-kenyataan militer maupun politik selat yang vital pada jalur minyak ini? Pertama-tama, marilah kita lihat medan sekitar selat itu dan kemudian selat itu sendiri yang pada tempat-tempat paling sempit lebarnya hanya sekitar 20 mil. Bentuk selat itu dapat kita bayangkan dengan membayangkan bentuk cula badak dan kemudian suatu bagan paralel di atasnya. Andaikata anda seorang kapten kapal tanki, yang sedang meninggalkan Teluk Parsi dengan muatan penuh minyak mentah, anda akan berlayar ke utara dari mata badak ke ujung cularnya lewat selat yang sempit ini dan kemudian berbelok ke selatan lewat moncongnya ke Teluk Oman untuk memasuki laut lepas. Daratan Asia di sebelah utara dan timurnya adalah Iran, sedangkan sisi Arab Selatan adalah daratan yang menonjol bagaikan sebuah cula dengan Uni Emirat Arab dan Kesultanan Oman di pantai selatannya. Di sisi Teluk Parsi di sebelah barat selat ini, perairannya penuh dengan pulau, anjungan minyak dan pipa minyak. Pantainya tidak lurus, pada waktu air surut seringkali penuh dengan gumpalan-gumpalan tanah kosong. Dalamnya selat ini dari lumpur rawa-rawa garam dan hutan bakau di kedua sisi sampai kedalaman di tengah berkisar antara 20 dan 50 depa (fathom). Kapal-kapal tanki raksasa tidak melalui tempat-tempat dengan kedalaman rata-rata, tetapi tempat-tempat dalam yang aman bagi mereka dalam keadaan bermuatan penuh. Kapal-kapal yang lebih besar, dari kelas Universe ke atas, kalau bermuatan penuh paling tidak membutuhkan kedalaman sampai 81 kaki (sekitar 13 depa). Kapal-kapal tanki ini bagian atasnya adalah jauh di atas garis air, sehingga kalau tenggelam di tempat-tempat yang lebih dangkal akan merupakan rintangan jalan, dengan bagian-bagian kabin, cerobong dan tiangnya di atas permukaan air.

Di daratan Iran, sampai 15 mil dari pantai terdapat puncak-puncak karang yang tidak rata, yang tingginya sampai 7.700 kaki. Sepanjang pantai ini banyak terdapat pulau dan batu padas. Yang paling besar di antaranya, yang terbentang dari Timur ke Barat, ialah Pulau Qeshm yang panjangnya 60 mil dengan bukit-bukit yang tingginya sampai 1.300 kaki dan paralel dengan pantai Iran. Di dekat Qeshm ini ada tiga pulau lagi yang berjarak 5 sampai 7 mil, yaitu Pulau Hengan di bagian selatan selat yang sempit, Pulau Larak di sebelah timur dan Pulau Hormuz, suatu kubah garam yang spektakuler, yang berhadapan dengan pantai daratan.

Dua kali Marco Polo berlabuh di Pulau Hormez. Terakhir kalinya sekitar tahun 1292 sewaktu kembali dari Cina. Dari negeri ini dia mulai perjalanannya pulang ke Venesia, hampir seluruhnya lewat darat.

Kemudian pada abad ke-16, Alfonso de Albuquerque, Raja Muda Portugis di India, merebut Pulau Hormuz dalam tahun 1515. Di situ dia mendirikan sebuah benteng, yang-puing-puingnya masih dapat dilihat. Albuquerque adalah pencipta suatu strategi yang membangun serangkaian benteng kuat yang mengamankan lalu lintas perdagangan laut dari Timur ke Portugal untuk sekitar 100 tahun lamanya. Orang-orang Portugis merupakan pelopor orang-orang Inggris yang menguasai kawasan itu sampai abad ini. Ada petunjuk-petunjuk bahwa Uni Soviet telah belajar dari Albuquerque dan Amerika Serikat kiranya dapat belajar mengambil manfaat dari kecerdasan Albuquerque itu. Selain benteng di Hormuz, Albuquerque mempunyai benteng-benteng di Selat Malaka, di Goa di India dan di pantai Afrika bagian selatan. Dengan demikian sama sekali tidaklah aneh kalau tempat-tempat itu sekarang juga sangat penting untuk pengamanan jalur lalu lintas minyak.¹

Di pantai utara terletak kota Bandar Abbas, yang terlindung dari selat karena adanya Pulau-pulau Qeshm, Larak dan Hormuz. Kota ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang dibangun oleh Iran di bawah bekas Shah Mohammed Reza Pahlevi. Walaupun belum pernah digunakan secara penuh akibat buruknya hubungan darat dengan daerah-daerah industri di Iran Utara, pada tahun 1969 endapan-endapan krom di sebelah utara Bandar Abbas menghasilkan lebih dari 44.000 ton krom setahun, yang amat langka di dunia dan dibutuhkan untuk membuat baja. Cadangan krom di tambang-tambang itu diperkirakan lebih dari sejuta ton. Ribuan ton krom itu diangkut melalui pelabuhan itu dan ini menunjukkan potensinya.

Pantai selatan selat ini adalah wilayah Oman; walaupun di atas disamakan dengan suatu cula badak, dari dekat selat ini sama sekali tidaklah halus, tetapi penuh dengan puncak-puncak karang yang menonjol dari laut. Ru'us al Jebal (puncak gunung) yang pada peta navigasi tampak seperti laba-laba yang dengan kaki-kaki berbulunya nongkrong di atas cula itu menguasai ujung utara Jazirah Musandam dari Oman. Jazirah gersang yang hanya dihuni sedikit orang dari suku Shihuh yang umumnya masih tergolong pengembara dan mempunyai bahasa tersendiri ini sama sekali terpisah dari lain-lain daerah Oman karena terpotong oleh Uni Emirat Arab. Ujung Jazirah Musandam yang dikuasai Oman ini hanya dapat dicapai dari Oman lewat laut atau udara. Dua lapangan terbang kecil yang belum dibeton terletak di Limahon di sebelah timur dan di Khasab di sebelah utara, dekat dengan jalur lalu lintas kapal-kapal tanki. Iklimnya kering dan panas sekali, kecuali pada musim hujan Juni-September yang membawa awan tebal dari Samudera Hindia dan banyak hujan ke pantai timur.

¹ *Encyclopedia Britannica*, 1979, Vol. V, juga Volume 13: 566, 14: 758, 14: 869, 16: 198

Berhadapan dengan pos luar Kesultanan Oman ini adalah Uni Emirat Arab, suatu konfederasi lemah negeri-negeri Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras al Khaima Khaima, Umm al Qawain, Ajman di sebelah barat dan Fujairah di sebelah timur. Tak satupun dari negeri-negeri ini, yang kebanyakan hampir tidak lebih dari satu kota, secara sendiri-sendiri maupun kolektif mempunyai penduduk atau angkatan bersenjata yang mampu menjaga ladang-ladang minyak mereka, jangankan selat yang menurut *Encyclopedia Britannica* "mempunyai arti strategi dan ekonomi yang penting". Tetapi Abu Dhabi, Dubai dan Sharjah masing-masing mempunyai pelabuhan udara jet yang dapat menunjang angkatan udara yang membelanya, maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan bagi angkatan-angkatan laut yang kecil.

Di Teluk Parsi terdapat banyak pulau kecil yang berhadapan dengan dan di sebelah utara dan barat Uni Emirat Arab. Di antara pulau-pulau yang diklaim oleh Iran, dua mempunyai lapangan udara yang cukup panjang untuk melayani pesawat terbang jenis C-130, yaitu Pulau Sirri dan Tunb.

Setiap hari sekitar 100 kapal tanki melintasi perairan sempit ini dengan selang antara 15 menit. Kalau berlayar berhati-hati dengan separuh kecepatan, ini adalah 5 sampai 10 knot. Kata orang, jarak berhenti bagi kapal-kapal besar itu, bahkan dalam panik, adalah sampai 5 mil pada kecepatan biasa; pada separuh kecepatan kurang dari itu. Jadi bayangkan sebuah kapal tanki besar yang sarat muatan, kapal mana saja dalam iring-iringan, yang pada malam hari ditemplei bahan peledak yang berkekuatan tinggi oleh pasukan katak secara diam-diam, dan kemudian diledakkan lewat alat radio oleh gerilyawan-gerilyawan. Pada waktu kapal itu mencapai bagian selat yang paling sempit, dari darat mereka meledakkan bahan peledak itu dengan perintah radio atau alat lain. Kapal ini, mungkin tanpa kekuatan atau kemudi, akan terus melaju karena momentum dan akhirnya berhenti terombang-ambing, sambil menghamburkan minyak dari sisi-sisinya yang menciptakan tekanan-tekanan yang dahsyat atas struktur kapal yang besar itu. Sebagai akibatnya kapal pecah dan mulai tenggelam bagian demi bagian, beberapa bagian tampak menjulang di atas air, tetapi kebanyakan lenyap di bawah permukaan air dan dibawa arus sehingga sulit diketahui letaknya.

Kapal tanki di belakangnya, dalam keadaan jaga dan waspada sepanjang selat, segera bertindak setelah melihat kehancuran beberapa mil di depannya. Dengan kecepatan 8 knot dan jarak pisah 15 menit, maka kapal itu berada sekitar 2 mil dari kapal yang sedang terbakar dan mulai tenggelam itu - dan terus mendekat. Dengan cepat kaptennya mengubah haluan dalam batas-batas selat dan jalur navigasi yang diwajibkan. Dia menyadari bahwa lalu lintas kapal-kapal tanki yang kosong dan karenanya berlayar lebih cepat menuju Teluk Parsi adalah di sebelah kirinya. Sambil mengubah haluan kapalnya,

kapten yang berhati-hati akan memerintahkan agar mesinnya dimatikan, biar pun sadar bahwa dengan kecepatan yang dikurangi atau nol dia menjadi permainan pasang surut air dan arus air yang biasanya lebih cepat dan kuat di tempat yang sempit. Pilihan-pilihannya terbatas: operasi-operasi penyelamatan atau buang sauh yang penuh bahaya. Selain itu dia tidak mengetahui dengan pasti tindakan-tindakannya yang akan diambil oleh kapten di belakangnya - mudah-mudahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelayaran yang berlaku (*Standing Operating Procedures*), yaitu melakukan manuver yang tepat dan berhasil untuk menghindari bahaya-bahaya yang dihadapinya, tetapi kapten di depan tetap ragu-ragu.

Dengan segala sarana yang tersedia baginya, kapten itu mengirimkan peringatan-peringatan internasional kepada para penguasa lalu lintas terusan ini dan juga kepada semua kapal yang berada di belakangnya maupun yang datang dari depan. Diharapkan para pelaku sabotase tidak mengganggu radio ataupun alat-alat elektronis lainnya dalam rangka operasi mereka.

Suara, CW, dan gelombang-gelombang radio teleks akan bertubi-tubi meminta konfirmasi atau tambahan informasi mengenai maksud kapal di depan dan mengenai transmisi awak kapal yang panik, yang menjadi kompleks akibat masalah-masalah bahasa yang tak bisa dihindari. Drama yang menyusul sebaiknya dibiarkan pada imajinasi masing-masing. Tetapi andaikata setiap pihak yang bersangkutan memberikan reaksi yang masuk akal dan setiap input alam menguntungkan, yang paling baik yang bisa diharapkan ialah jalur sebagian tertutup dengan lalu lintas yang berlangsung terus tetapi terbatas bagi kapal-kapal tanki yang vital. Yang paling buruk yang bisa terjadi ialah kekacauan, pertumpahan darah dan kerusakan yang memukau. Pukulan terhadap perekonomian Barat akan segera dirasakan karena gangguan-gangguan akan segera mulai, setelah pemerintah-pemerintah dan industri menyadari implikasi-implikasinya, dan memburuk dengan cepatnya.

Skenario tersebut di atas itu mungkin salah di sana sini, namun paling tidak dapat menjelaskan peringatan-peringatan yang sejauh ini kurang jelas mengenai tindakan-tindakan teroris yang bisa diarahkan terhadap selat ini. Tenggelamnya satu kapal mungkin buruk, tetapi kemungkinan-kemungkinan akibat domino yang mengakibatkan kecelakaan banyak kapal selalu ada.

Ketidakstabilan politik di kawasan ini dikipasi oleh Uni Soviet dengan mendukung pemberontakan dan kudeta. Negara ini mencapai beberapa keberhasilan dan mengalami beberapa kegagalan dalam usahanya untuk mencapai hegemoni di negara-negara di sekitarnya. Di propinsi barat daya Dhofar di Oman, yang berbatasan dengan Yaman Selatan, personal militer Inggris melatih, menasehati dan memimpin pasukan-pasukan bagi Sultan. Bersama-

sama dengan satu brigade tentara Iran, (kini telah ditarik mundur), mereka memukul mundur kaum revolusioner yang didukung oleh Republik Demokrasi Rakyat Yaman (Yaman Selatan) yang mendapat bantuan militer Uni Soviet dan Kuba. Strategi yang dianut Sultan ialah menugaskan para militernya untuk mengamankan propinsi demi pembangunan sipil. Menyusul keberhasilan di bidang militer, Sultan memperkuat kedudukannya sendiri dengan meniadakan *raison d'être* para pemberontak. Dia membangun jalan-jalan, menggali sumur-sumur air, dan secara demikian menciptakan pusat-pusat pemukiman penduduk dengan klinik, sekolah dan toko-toko. Strategi ini berhasil mencegah kaum komunis bercokol di salah satu negara kunci yang mengawal Selat Hormuz.¹

Di Laut Arab di lepas pantai Oman, Pulau Masirah terletak sekitar 300 mil atau 45 menit penerbangan dengan pesawat jet dari selat itu. Beberapa tahun yang lalu Inggris menempatkan pesawat-pesawat jet Angkatan Udaranya di situ untuk mendukung politik Timur Tengahnya. Kini kekuatannya telah mengecil. Pulau ini dapat menjadi pangkalan depan untuk memproyeksikan kekuatan Barat ke sekitar selat dan jalur pelayaran kapal-kapal tanki.

Berpaling ke Iran, kita berkesimpulan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu penyebab utama berhasilnya Revolusi Khomeini. Amerika Serikat menghentikan dukungannya bagi Shah, yang telah memajukan negara dan membawanya memasuki abad ke-20 dan merupakan sahabat Barat yang gigih, walaupun sebagai penguasa memang menindas rakyat. Syarat mutlak kebijaksanaan Amerika Serikat sehubungan dengan Iran kini ialah membina suatu rejim yang stabil yang bersedia menunjang kepentingan-kepentingan Barat dan terus berputarnya roda industri negara-negara Barat dengan bagian minyak mentah Iran. Di kawasan itu Iran merupakan satu-satunya negara yang mampu memiliki suatu angkatan perang yang bisa ikut menjamin (berkat jumlah penduduknya yang besar dan tingkat pendidikannya yang cukup tinggi) terus mengalirnya minyak mentah dari Teluk Parsi ke negara-negara Barat. Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab tidak mempunyai penduduk yang cocok bagi pertahanan militer kawasan dan Selat Hormuz. Rakyat negara-negara itu kebanyakan masih pengembara dan berdasarkan temperamen mereka tidak mudah menerima disiplin kemiliteran, kecuali jumlah-jumlah yang kecil.

Dengan menerima kenyataan-kenyataan orde baru di Iran, Amerika Serikat harus menilai dengan tepat sasaran-sasaran utamanya di Teluk Parsi. Mengatakan apa yang *bukan* sasaran-sasaran utama itu tidaklah biasa tetapi

1 Mayor Jenderal K. Perkins, "Oman 1975: The Year of Decision", *Royal United Services Institute Journal*, January 1979

penting. Sasaran utama Amerika Serikat di kawasan penghasil minyak ini *bukanlah* mengamankan hak-hak asasi rakyat setempat, walaupun hak-hak semacam itu dan kepekaan mereka terhadapnya tidak boleh diabaikan, melainkan mengamankan suplai minyak yang tetap dan memadai dari Teluk Parsi dan pengangkutannya ke Amerika Serikat demi perputaran roda industrinya *sampai* sumber-sumber energi alternatif berhasil dikembangkan dan disediakan secara komersial.

Guna mengamankan arus minyak yang mantab diperlukan langkah-langkah diplomasi, ekonomi dan militer dalam kerja sama dengan negara-negara sekutu nonkomunis, yang positif sifatnya dan langsung akibatnya. Suatu laporan dari Perpustakaan Kongres kepada Senat Amerika Serikat menegaskan: "Tetapi hasil-hasil laporan ini umumnya mendukung pandangan bahwa keterbatasan-keterbatasan praktis dan politik yang inheren pada apa yang dinamakan strategi ke depan (*forward strategy*) membatasi manfaatnya bagi Amerika Serikat dan bahwa bentuk-bentuk pengaruh yang lebih halus dan kurang menyolok lebih menunjang usaha mencapai sasaran-sasaran Amerika Serikat."¹ Laporan ini juga menyebutkan bahwa kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat terdiri atas suatu Kekuatan Timur Tengah tiga kapal (sekarang sudah diperkuat) yang jauh lebih halus dan kurang menyolok dibandingkan dengan kehadiran kapal-kapal perang Soviet di kawasan, yang jauh lebih besar jumlahnya. "Kehadiran Angkatan Laut Soviet itu kini meliputi suatu kekuatan yang bertugas setahun penuh secara terus menerus dengan satuan-satuan yang diganti atas dasar satu lawan satu. Satuan-satuan Eskader Samudera Hindia Soviet itu kini berjumlah antara 20 dan 22 kapal. Kekuatan ini biasanya meliputi satu atau dua kapal tempur besar, empat kapal tempur yang lebih kecil, satu atau dua satuan amfibi, satu kapal selam dan beberapa kapal pembantu, peneliti dan kapal yang berhubungan dengan program ruang angkasa. Kapal-kapal amfibi itu merupakan satu-satunya kekuatan infanteri angkatan laut yang selalu ditempatkan di Samudera Hindia" Dengan kata lain, marinir-marinir Soviet berada pada jarak serangan terhadap garis-garis komunikasi minyak Amerika Serikat, suatu ancaman yang persuasif dan tidak halus.

Sekarang ini negara-negara komunis sahabat Uni Soviet hanya dipisahkan oleh satu negara dari Selat Hormuz. Afghanistan di sebelah utara hanya dipisahkan dari selat oleh Negara Islam Iran yang baru, dan di sebelah timur oleh Pakistan. Karenanya Iran dan Pakistan harus segera dibina agar mau

1 *Op. cit.*, catatan 4, hal. 85, 91. Sejak pecahnya krisis Amerika Serikat—Iran dan invasi Soviet ke Afghanistan, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di perairan dekat Teluk Parsi. Kini kekuatan itu meliputi sekitar 30 kapal, termasuk 2 kapal induk dengan lebih dari 150 pesawat tempur. Lebih lanjut lihat karangan "Pertahanan Superpower di Timur Tengah" dalam nomor ini

menerima bantuan timbal balik di bidang ekonomi demi kepentingan mereka dan Amerika Serikat. Pangkalan-pangkalan militer di daerah-daerah yang dekat dengan selat ini harus dirundingkan pemakaiannya untuk operasi-operasi darurat dan kemudian untuk suatu kehadiran militer Amerika Serikat dalam waktu dekat ini. Kekuatan pelindung dari angkatan laut dan udara dengan pasukan tempur yang selalu siap siaga harus segera ditempatkan pada fasilitas-fasilitas yang ada seperti pangkalan laut dan pangkalan pesawat jet di Bandar Abbas serta Chah Bahar di Iran, dan di Karachi, Pakistan. Kekuatan ini pertama-tama harus terdiri atas personal Iran dan Pakistan dibantu oleh penasehat-penasehat Amerika, tetapi apabila personal setempat kurang ahli harus dikerahkan formasi-formasi Amerika Serikat. Pasukan-pasukan ini pertama-tama harus memiliki kemampuan untuk menyapu ranjau dan memberi pertolongan di laut dengan cepat, sehingga hambatan-hambatan lalu lintas dapat disingkirkan dengan cepat.

Di pantai selatan selat ini hanya Kesultanan Oman berada antara Republik Demokrasi Rakyat Yaman yang dikuasai Uni Soviet (Yaman Selatan) dan jalur pelayaran kapal-kapal tanki lewat selat yang sempit itu. Pangkalan-pangkalan komunis yang besar di Republik Demokrasi Rakyat Yaman terletak di kota Aden, bekas pangkalan Angkatan Laut Inggris, dan di Pulau Sokotra di Laut Arab. Kedua pangkalan itu menguasai jalur-jalur pelayaran kapal-kapal tanki menuju Suez. Republik Demokrasi Rakyat Yaman ini telah mengobarkan pemberontakan-pemberontakan dan melancarkan suatu invasi ke propinsi Dhofar di Oman dan baru-baru ini juga ke Republik Arab Yaman (Yaman Utara). Akan tetapi keduanya dapat dipukul mundur. Pemerintah Amerika Serikat dapat dipuji karena mengakui kepentingan-kepentingan Amerika dalam kasus Yaman Utara ini dan memberikan bantuan militer sejauh diijinkan oleh politik regional. Akan tetapi dalam memberikan bantuan itu Amerika Serikat sangat dihambat karena tiada pangkalan bagi pesawat-pesawat tanki yang digunakan untuk mengisi bahan bakar pesawat-pesawat dalam penerbangan dari Amerika ke Timur Tengah. Situasi semacam itu perlu segera diatasi.

Di Oman adalah Inggris yang secara tak langsung memberikan personal militer (pada intinya tentara bayaran), latihan militer dan pimpinan dalam perang 10 tahun, yang berakhir dengan kemenangan Oman pada tahun 1975. Kampanye ini sangat berhasil. Sultan yang baru, Sultan Qabus bin Said bin Taimur Al Bu Said, membangun sumur-sumur serta sekolah-sekolah dan menyediakan pelayanan-pelayanan pokok lain untuk meniadakan daya tarik revolusi. Amerika Serikat harus merundingkan suatu persetujuan dengan Sultan Qabus yang saling menguntungkan, di atas bantuan 15 juta dollar yang sekarang diberikan kepada Oman. Selanjutnya harus diusahakan agar Sultan mengijinkan penggunaan fasilitas-fasilitas pelabuhan dan pangkalan jet di

Masirah bagi Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Uni Emirat Arab hendaknya juga dibina untuk kerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lain dalam usaha mempertahankan Selat Hormuz. Dalam usaha ini Amerika Serikat harus mencari dukungan dan sumbangan Jepang. Jepang mengimpor 100% kebutuhan minyaknya dan sebagian besar minyak impornya itu berasal dari Teluk Parsi. Dengan demikian kepentingan vitalnya juga dalam taruhan.

John P. Roche, guru besar Universitas Tufts dan seorang kolumnis, mengatakan pada 22 Pebruari 1979:

"..... Seluruh dunia industri benar-benar berkepentingan dengan tetap terbukanya Selat Hormuz. Tetapi Amerika Serikat adalah satu-satunya bangsa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas itu. Tugas ini tidak dilaksanakan dengan sekedar mengirim satu batalyon Pasukan Perdamaian ke Oman, tetapi dengan benar-benar membangun suatu kekuatan militer di kawasan tersebut.

Kebutaan Amerika Serikat terhadap pentingnya perencanaan darurat di Timur Tengah mungkin adalah akibat kelumpuhan birokrasinya. Inggeris ahli dalam hal itu. Amerika Serikat harus belajar dari tahun 1967 ketika Inggeris mempunyai sebuah kapal induk *Hermes*, beberapa kapal frigat dan beberapa eskader penyapu ranjau di Aden."¹

Dari sudut pandangan Uni Soviet, terdapat alasan-alasan yang masuk akal untuk membangun pangkalan-pangkalan di pantai Afrika sepanjang rute Tanjung Harapan.² Baginya ini merupakan satu-satunya jalur pelayaran yang bebas es yang dapat digunakan untuk mendukung propinsi-propinsinya di Asia dari Rusia Eropa dan sebaliknya. Dengan alasan itu pula Uni Soviet dapat membela tuntutanannya untuk menempatkan Angkatan Lautnya di Samudera Hindia. Tetapi kalau pangkalan-pangkalan itu diubah fungsinya menjadi pangkalan kekuatan-kekuatan udara dan laut yang mengancam akan menghentikan pengiriman minyak mentah Teluk Parsi ke Barat, maka alasan-alasan Uni Soviet patut dicurigai.

Amerika Serikat mempunyai kepentingan vital di Samudera Hindia, yaitu untuk mengamankan pengangkutan minyak lewat ujung Samudera itu, yaitu Laut Arab beserta ujungnya, yaitu Teluk Oman. Amerika Serikat tidak boleh menyerah begitu saja kepada argumen manapun yang dapat merongrong keyakinan itu. Lalu lintas minyak yang aman ke Dunia Barat harus menjadi perhatian utama rencana Amerika Serikat, yaitu kebijaksanaan resminya. Semua langkah politik luar negeri dan diplomasinya harus bertitik tolak dari kebenaran itu. Resiko yang dihadapi Amerika Serikat dan Dunia Barat dalam

1 John P. Roche, "Strait of Hormuz: Cork in the Oil Line", *Birmingham News*, 22 Pebruari 1979

2 Karangan "Russia and the Cape Sea Route", dalam *South African Digest*, 3 Agustus 1979, hal. 6. Karangan ini lebih dahulu dimuat dalam *Paratus*, journal resmi Angkatan Pertahanan Afrika Selatan

menjalin hubungan-hubungan diplomasi, ekonomi dan militer yang lebih erat dengan negara-negara Teluk Parsi harus ditimbang dengan bahaya yang muncul akibat tiadanya kegiatan maupun bahaya-bahaya undangan konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Orang-orang Soviet tahu bahwa mereka dapat memperoleh lebih banyak minyak dan gas dari Teluk Parsi lewat pipa-pipa dan menyadari bahwa Amerika Serikat dan negara-negara Barat secara yang berbahaya bergantung pada terus berlangsungnya lalu lintas minyak secara bebas lewat Selat Hormuz.

Pemerintah Amerika Serikat harus segera mempertimbangkan secara serius bantuan untuk membangun pipa-pipa baru atau tambahan ke Laut Arab, Laut Tengah dan Laut Merah sebagai alternatif bagi Selat Hormuz. Perencanaan militer Amerika Serikat harus mencakup operasi-operasi, kekuatan dan struktur-struktur logistik penunjang untuk kejadian-kejadian yang dapat dibayangkan yang dapat menghentikan arus minyak lewat Selat Hormuz, kendatipun penghentian itu hanya berlangsung satu dua hari. Perencanaan ini juga harus mencakup satuan-satuan penolong dan penyapu ranjau Angkatan Laut Amerika Serikat yang mampu bertindak dengan cepat dan ditempatkan di depan. Sasaran utama rencana ini ialah membuka kembali selat ini secepat mungkin apabila tertutup dan mengalirkan minyak Teluk Parsi karena tanpa minyak ini Amerika Serikat sebagai mesin raksasa akan berhenti sehingga terjadi suatu bencana yang dahsyat.

Kalaupun inisiatif-inisiatif ini tidak akan begitu mudah diterima oleh negara-negara pantai selat, Amerika Serikat telah berhasil melakukan usaha-usaha diplomasi yang lebih sulit dan keharusan ekonomi tidak pernah lebih kuat. Amerika Serikat hendaknya belajar dari Raja Muda yang bijaksana, Alfonso de Albuquerque, dan mulai membangun benteng-benteng, pangkalan-pangkalan depan untuk operasi, dan pangkalan-pangkalan untuk pengisian bahan bakar di udara dan laut dalam rute ke tempat-tempat itu, dan suatu kehadiran militer Amerika Serikat sepanjang garis-garis suplai minyak yang vital dari Teluk Parsi.

Jalur minyak dan lebih-lebih Selat Hormuz harus tetap terbuka.

PERSEPSI REZIM IRAN MENGENAI PERANG IRAK—IRAN*

B. WIROGUNO

Pada waktu perang Irak-Iran berlangsung terus dan Irak gagal mencapai kemenangan yang menentukan di medan pertempuran, dimensi ideologi dalam sikap rezim Iran terhadap perang itu dan syarat-syarat untuk mengakhiri peperangan menjadi semakin menyolok. Pemimpin-pemimpin Iran membatasi perang itu dengan pengertian-pengertian dan istilah-istilah abstrak seperti "perang monotheisme melawan atheisme", "perang keadilan melawan pemerkosaan keadilan", atau "perang Islam melawan musuh Islam". Menurut mereka rezim Saddam Hussein adalah personifikasi musuh anti Islam dan likuidasinya menjadi tujuan Republik Islam. Mereka menolak segala kemungkinan penyelesaian dengan rezim Saddam Hussein, dan secara demikian menunda akhir peperangan untuk waktu tak terbatas, sehingga perang tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini. Sesuai dengan persepsi peperangan ini dan berpegangan pada kepercayaan bahwa rakyat Iran memiliki daya tahan yang besar, pemimpin-pemimpin Iran berpegang teguh pada syarat-syarat yang berat walaupun dapat diterima untuk mengakhiri peperangan. Bersamaan dengan itu mereka begitu saja menolak setiap gerak politik yang dimaksud untuk mengakhiri peperangan lewat perundingan - termasuk gencatan senjata, biarpun dapat menerima suatu penghentian sementara tembak' menembak atau kerja sama dengan para penengah.

Dalam tubuh rezim Iran terdapat bermacam-macam pendapat dan pernyataan-pernyataan anggota-anggotanya tidak ditandai suatu garis seragam dan koheren yang dapat dibatasi sebagai sikap resmi Iran. Orientasi-orientasi keagamaan Islam dan nasional terungkap dalam pernyataan-pernyataan mereka secara campur aduk. Perkembangan di medan pertempuran dan dalam perebutan kekuasaan dalam negeri mempengaruhi sikap-

* Pernah dimuat dalam *Suara Karya*, 7 April 1981

sikap, dan pendekatan ideologi terhadap perang jelas menjurus ke radikalisasi dan mengurangi kemungkinan berakhirnya perang lewat meja perundingan. Walaupun di sana sini muncul petunjuk-petunjuk adanya kesediaan untuk kompromi atau perundingan, trend dominan di Iran kini adalah trend penolakan yang tegas. Menurut para pemimpin Iran, perang dengan Irak seperti berlangsung sejauh ini dapat berlangsung terus untuk waktu lama dan dalam kenyataan memperkuat Revolusi Islam. Selama peperangan mengikuti pola sekarang ini, dan tidak terjadi pergantian pemerintah atau perubahan dalam negara, trend itu kiranya akan berlangsung terus.

CIRI-CIRI POSISI DASAR IRAN

Pada waktu Irak menyerbu Iran, pemimpin-pemimpin Iran tidak siap untuk konfrontasi serupa itu, baik dalam arti militer strategis maupun dalam arti ideologi. Mereka berusaha untuk menjembatani jurang kredibilitas yang lebar antara pretensi-pretensi muluk mereka dan suatu kenyataan yang mengandung kemungkinan lenyapnya eksistensi Republik Islam Iran. Dengan demikian *ofensif Irak itu dengan tajam menyoroti adanya kontradiksi antara nasionalisme Iran dan konsep Islam rejim Khomeini* (Pan Islam). Pada intinya konsep ini mengecam nasionalisme sebagai buah busuk kolonialisme Barat dan menyerukan persatuan Dunia Islam. Secara demikian pandangan pemimpin-pemimpin Iran mengenai perang itu diwarnai dua pandangan yang berlainan: pandangan keagamaan Islam dan pandangan nasionalis. Berbagai jurubicara dari waktu ke waktu mewakili pandangan yang satu atau yang lain, dan walaupun bertolak belakang satu sama lain kedua pandangan itu sering disuarakan oleh jurubicara yang sama. Khomeini sendiri membatasi perang sebagai "perang monotheisme melawan atheisme". Dalam pidatonya kepada pasukan-pasukan pada 21 Oktober 1980, Presiden Bani Sadr berkata: "Dalam Islam orang berperang untuk Allah dan oleh sebab itu tidak boleh ada konsesi sampai kemenangan akhir. Dengan demikian kata kekalahan tidak mempunyai arti. Muhammad berperang selama 12 tahun dan menghadapi hambatan-hambatan sampai kemenangan akhir Islam." Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Udara Islam, Javad Fakuri, melukiskan perang sebagai suatu pertarungan bukan antara dua tentara tetapi antara dua sistem: "yang satu bekerja untuk memajukan dan memperluas Islam dan yang lain untuk memblokir dan mencegah proses itu". Ungkapan sikap dengan mana pemimpin-pemimpin Iran berusaha meresapi rakyat diberikan oleh *Teheran Times*, 5 Oktober 1980, yang melukiskan perang Irak dan Iran sebagai "suatu perang keadilan lawan pemerkosaan keadilan". Bani Sadr *berusaha mempertemukan kontradiksi antara Pan Islam dan nasionalisme itu* ketika menyatakan pada pertengahan Oktober 1980: "Kita bertempur untuk negara dan iman kita; nasionalisme adalah bagian iman Islam kita."

Dua hal yang juga menjadi ciri posisi dasar Iran mengenai perang itu perlu dicatat. Pertama, dalam menyebutkan Irak pemimpin-pemimpin Iran jelas *membedakan Saddam Hussein beserta rezimnya dan rakyat Irak*. Sedangkan Rezim Baath, yang menantang Revolusi Islam, secara berangsur-angsur dijadikan sasaran kebencian dan serangan-serangan rezim Iran, rakyat Irak dilihat secara positif dan Khomeini berseru kepada mereka untuk memberontak melawan para penguasa mereka. Lukisan Saddam Hussein dan rejimnya sebagai anti Islam setiap kali muncul dalam pernyataan-pernyataan pemimpin-pemimpin Iran, dan oleh sebab itu harus dilancarkan Jihad terhadapnya. Untuk mengobarkan kembali semangat revolusioner rakyat yang menurun, harian Iran *Al Talaat* menggambarkan *rezim Saddam Hussein sebagai suatu rezim setan seperti rezim Shah*, dan oleh sebab itu ditolak sebagai sesuatu yang keji. Lebih dari satu kali pemimpin-pemimpin Iran menuntut agar Saddam Hussein diajukan ke depan sebuah mahkamah internasional untuk kejahatan-kejahatannya terhadap Iran.

Kedua, sambil menolak klaim Irak bahwa perang adalah antara bangsa Arab dan bangsa Parsi, pemimpin-pemimpin Iran dengan pedas *menyerang Partai Baath*. Dalam suatu karangan dalam harian *Inkilab-i-Islami*, 19 Oktober 1980 ditonjolkan bahwa Partai Baath didirikan oleh seorang kristen, Michel Aflaq; juga disebutkan dengan ejekan slogan-slogan Partai Baath yang berasal dari masa terbentuknya yang menyerukan persatuan Arab dan Arabisasi kawasan; dan diserukan agar kampanye melawan rezim Saddam Hussein dilakukan dengan semboyan "Jatuhkan Fasisme Baath".

CIRI-CIRI POSISI POLITIK IRAN

Dalam "perimbangan kelemahan" di mana Iran dan Irak kini berada di medan perang, kebiasaan pemimpin-pemimpin Iran untuk menyebutkan perang itu sebagai perang keadilan lawan perkosaan keadilan, monotheisme lawan atheisme, dan Islam lawan anti Islam, pada hakekatnya *memperkecil prospek Iran bersedia mengakhiri perang lewat perundingan dan menjurus pada syarat-syarat yang berat untuk mengakhiri pertempuran*. Dalam penolakan gagasan untuk mengadakan perundingan perdamaian dengan Irak, pada 25 September 1980 Khomeini mengatakan bahwa kemenangan dan kekalahan mempunyai suatu kriterium yang tidak berkaitan dengan hasil perang; mereka yang bertempur untuk Allah adalah pemenang dan mereka yang bertempur untuk setan menderita kekalahan. Karena -menurut dia- Iran adalah "wakil Allah di dunia", dia adalah pemenang dan tidak akan menyerah kalah bahkan kalau dia mengalami boikot ekonomi langsung maupun tak langsung dan invasi militer. Pada akhir Oktober Khomeini

mengatakan bahwa tidak ada gunanya berunding dengan Irak, sambil menandakan bahwa Islam tidak bisa berdamai dengan musuh Islam. Selain itu dia mengatakan bahwa *seperti tiada kemungkinan kompromi dengan Shah juga tiada kemungkinan kompromi dengan Saddam Hussein*. Sebagai tambahan, Ketua Majelis Rafsanjani menyatakan bahwa perang akan berlangsung terus sampai rezim Saddam Hussein jatuh. Presiden Bani Sadr mengatakan pada 19 Nopember 1980 bahwa kemenangan mutlak berarti digulingkannya rezim Saddam Hussein dan bahwa dicapainya sasaran itu lebih baik daripada kemenangan militer di medan pertempuran.

Sesuai dengan persepsi mereka bahwa kemenangan adalah digulingkannya rezim Saddam Hussein, pemimpin-pemimpin Iran mengajukan syarat-syarat perdamaian kepada Irak yang sulit dan bahkan tidak dapat diterima. Pertama, Khomeini *mengaitkan perubahan dalam posisi Iran dengan perubahan-perubahan dalam negeri Irak*, yaitu "hanya kalau Saddam Hussein mengundurkan diri dan menyatakan telah menjadi Muslim" dapat ada perdamaian dengan Irak.

Kedua, Ayatullah Ulama Yahya Nuri, salah satu pendukung Bani Sadr, dalam suatu wawancara dengan *Teheran Times*, 6 Oktober 1980, berseru kepada Irak agar *mengembalikan semua wilayah Iran kepada Iran*. Menurut dia semua buku geografi dan sejarah Islam membuktikan bahwa wilayah-wilayah Heere, Anbar, Medayen, Tesfoon, di mana kini terletak Bagdad, Mosul, Khanaqin dan Basra, dahulu adalah propinsi-propinsi Iran. Wilayah-wilayah itu adalah bagian integral Iran bahkan sebelum kedatangan Islam, dan menurut Nuri diterimanya Islam tidak dapat mengubah geografi atau hak-hak nasional. Oleh sebab itu keempat kota tersebut di atas masuk Iran, seperti halnya dengan ketiga pulau di Teluk.

Ketiga, sebagai syarat setiap perundingan, jurubicara-jurubicara Iran menuntut *penarikan semua pasukan Irak* dari wilayah Iran yang diserbu sejak 22 September 1980. Ali Shams Ardakani, utusan Bani Sadr ke Majelis Umum PBB, menyatakan di situ pada 14 Oktober 1980 bahwa negaranya tidak akan menyetujui gencatan senjata dan tidak akan mengadakan perundingan dengan Irak sampai negara ini menarik pasukan-pasukannya dari Iran. Ayatullah Beheshti juga menyatakan pada 15 Oktober 1980 bahwa perdamaian maupun kompromi dengan Irak tidak akan mungkin sampai penarikan semua pasukan Irak. Akhirnya PM Rajai mengatakan pada pertengahan Nopember 1980 bahwa tidak mungkin diadakan perundingan dengan Irak, bahkan kalau Irak menarik pasukan-pasukannya.

Di tingkat praktis dan kurang resmi kadang-kadang terungkap suatu posisi yang sedikit lebih luwes. Pertama, dalam suatu surat yang dikirimkan ke

Kedutaan Besar Irak di Teheran dan kepada Menteri Luar Negeri Irak, dan disebarluaskan sebagai lampiran suatu kertas kerja Dewan Keamanan pada 17 September 1980, sebagai tanggapan atas pembatalan persetujuan 1975 secara sepihak oleh Irak, Pemerintah Irak dituduh merugikan keamanan dalam negeri Iran dengan melanggar protokol yang termasuk persetujuan 1975 itu sehubungan dengan keamanan perbatasan bersama kedua negara. Dalam bagian kedua surat itu Iran mengatakan dengan nada moderat dan konsiliatoris bahwa "andaikata dari sudut pandangan Pemerintah Irak terdapat kesulitan-kesulitan sehubungan dengan penerapan dan penafsiran perjanjian itu dan persetujuan-persetujuan di dalamnya, seyogyanya diambil langkah-langkah sesuai dengan pasal 6 perjanjian dan lampiran 26 Desember 1975, di mana prosedur bagi penyelesaian sengketa-sengketa jelas digariskan...." Keluhan-keluhan serupa mengenai kegagalan mematuhi persetujuan 1975 juga dibuat oleh PM Rajai dalam wawancara dengan harian Libanon *Al Safir*, 8 Nopember 1980. Penggunaan istilah-istilah yang berlaku dalam hukum internasional dalam suatu dokumen resmi Iran, khususnya bila oleh seorang wakil kelompok radikal golongan agama, memberikan kesan keluwesan dan pragmatisme, dibandingkan dengan posisi tak kenal kompromi yang diambil oleh Khomeini dan lain-lain pemimpin.

Penyimpangan lain dari sikap tak kenal kompromi Iran yang menimbulkan kesan adanya kemungkinan kompromi juga terungkap dalam kata-kata Bani Sadr dalam suatu wawancara pada 11 Oktober 1980, ketika dia menyatakan bahwa sekalipun soal Shatt-al-Arab bukan bahan perundingan dengan Irak, *tuntutan penyesuaian perbatasan di sektor utara dapat dibicarakan*. Demikianpun komentar PM Rajai kepada Menlu India. Biarpun ini dimaksud sebagai suatu konsesi, perlu dicatat bahwa *menurut perjanjian 1975 suatu daerah perbatasan dekat Qasr Shirin harus diserahkan kepada kedaulatan Irak*, tetapi Iran tidak menghormati ketentuan ini dan perbatasan di sektor itu tetap tidak jelas. Juga seruan dalam perjanjian untuk membentuk suatu komisi yang akan menetapkan perbatasan permanen belum ditanggapi. Dengan demikian pernyataan-pernyataan di atas itu tidak banyak menyimpang dari pernyataan-pernyataan lain-lain pemimpin yang mematuhi perjanjian 1975 sebagai suatu dokumen yang mengikat. Cara rezim sekarang ini berpegang pada perjanjian 1975, yang ditandatangani di waktu Shah oleh wakil-wakil pemerintahnya, memberikan suatu tekanan ironis kepada kenyataan bahwa komponen nasionalis politik luar negeri Iran - yang menonjol di bawah Shah - sama sekali tidak lenyap dengan dibentuknya Republik Islam dan tetap penting bagi pemimpin-pemimpin sekarang ini.

Suatu penyimpangan yang jelas dari garis resmi pada 20 Nopember 1980 didengar dari PM Rajai itu sendiri, ketika menyusul pembicaraannya dengan utusan Sekjen PBB Palme, dia menyatakan *bersedia menerima suatu gencatan*

senjata segera setelah pasukan-pasukan Irak mulai ditarik mundur dari wilayah Iran. Akan tetapi terlalu pagi untuk mengetahui apakah kata-kata Rajai itu mengisyaratkan awal perlunakan sikap Khomeini atau merupakan retaknya konsensus mengenai soal gencatan senjata. Konsep perang pemimpin-pemimpin Iran mengandung penolakan gencatan senjata. Pernyataan-pernyataan Rajai sejak pecahnya perang, termasuk pidatonya di Dewan Keamanan PBB pada 18 Nopember 1980 dan pembicaraannya dengan utusan PM Indira Ghandi pada 2 Nopember 1980, jelas menunjukkan bahwa menurut dia setiap persetujuan gencatan senjata Iran akan berarti menerima situasi yang ada, yaitu kehadiran pasukan-pasukan Irak di bumi Iran, yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Iran. Perlu dicatat bahwa para pendukung Rajai, yang kini menguasai Departemen Luar Negeri Iran jelas bertanggung jawab untuk penerbitan komunike 4 Nopember 1980, yang sama sekali menolak segala usaha untuk mencapai gencatan senjata dengan alasan bahwa hal itu tidak akan membantu Iran dan tidak mempunyai arti sedikitpun bagi negara itu.

Sejak pecahnya perang berbagai lembaga internasional dan orang menawarkan jasa-jasa mereka sebagai perantara Irak dan Iran dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa mereka. Teheran tidak menutup pintu bagi para penengah, tetapi sejauh ini segala usaha penengahan gagal. Di antara mereka yang secara sia-sia berusaha sebagai penengah adalah Zia ul-Haq, Habib Shatti, utusan senior dari India, Kuba, Yugoslavia dan kemudian juga wakil Sekjen PBB, Olaf Palme. Biarpun Olaf Palme mengatakan berhasil mendapat sepakat kata Irak dan Iran untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Shatt-al-Arab, itu bukan soal baru di pihak Iran karena Bani Sadr sebelumnya telah mengumumkan kesediaan Iran untuk mengadakan gencatan senjata sementara (*truce*) untuk memungkinkan kapal-kapal yang terjebak dibebaskan. Gagasan dasar mengenai berbagai usaha penengahan itu dimuat dalam komunike Kementerian Luar Negeri 4 Nopember 1980, yang menyebutkan bahwa berbagai utusan itu dikirim untuk *mengumpulkan informasi dan bukan untuk menjadi penengah*, dan menasehatkan mereka untuk pergi ke daerah-daerah pertempuran untuk mengetahui sendiri besarnya kejahatan yang dilakukan Rezim Baath. Tetapi pada prinsipnya Bani Sadr tidak menolak kerja sama dengan para penengah khususnya PBB. Penunjukan Ali Shams Ardakani, seorang pendukung Bani Sadr, sebagai utusan khusus ke PBB bulan Oktober 1980, pada waktu itu diartikan sebagai suatu usaha untuk ke luar dari isolasi internasional yang menimpa Iran sejak revolusi. Tetapi kedatangan mendadak Rajai di Majelis Umum, jelas tanpa memberitahukan maksudnya lebih dahulu kepada Bani Sadr, menggagalkan usaha itu. Persetujuan Iran dengan kedatangan Olaf Palme sebagai utusan Sekjen PBB juga sesuai dengan arti yang diberikan kepada PBB oleh sementara pemimpin Iran, bahkan kalau untuk sementara hasil misinya tidak banyak berbeda dengan

hasil penengah-penengah lain. Ungkapan sikap dominan pemimpin-pemimpin Iran terhadap para penengah disuarakan oleh Rajai pada kunjungan Palme, ketika dia membatasi berbagai usaha penengahan itu sebagai *menyia-nyiakan waktu*.

PENUTUP

Pada waktu perang dengan Irak berlangsung terus dan belum kelihatan hasil yang menentukan, *intransigensi ideologi pemimpin-pemimpin Iran*, di bawah Khomeini, menjadi semakin kuat dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan pandangan mereka mengenai perang itu dan cara untuk mengakhiri-nya. Trend ini kiranya akan berlangsung terus di masa mendatang ini, karena masuk akal anggapan bahwa di mata pemimpin-pemimpin Iran hal itu menguntungkan bagi revolusi. Oleh sebab itu diperkirakan bahwa pemimpin-pemimpin seperti Bani Sadr dan mungkin juga Rajai, yang menunjukkan tanda-tanda bersedia untuk melihat kemungkinan mengakhiri peperangan lewat perundingan, akan terpaksa mengikuti garis yang ditetapkan kelompok radikal dalam pimpinan, walaupun hanya untuk tidak membahayakan kedudukan politik mereka. Usaha pemaduan konsep Pan Islam dengan konsep nasionalis Iran dalam pandangan pimpinan Iran mengenai perang, bersama-sama dengan perebutan kekuasaan di antara mereka, mengakibatkan *radikalisasi sikap pemimpin-pemimpin Iran, yang memperkecil kemungkinan segera dimulainya perundingan untuk mengakhiri perang*. Selama situasi di medan tempur tidak berubah, dan selama tiada pergantian rezim di Teheran, garis itu kiranya akan berlangsung terus.

SITUASI DALAM NEGERI IRAN SEBELUM PERANG DENGAN IRAK

B. WIROGUNO

Sekitar delapan belas bulan setelah mencapai kemenangan, Revolusi Iran mengalami kemacetan. Pemimpin karismatiknya Ayatullah Khomeini mengungkapkan situasi itu pada akhir Juni 1980 ketika dia melontarkan kecaman yang pedas terhadap cara kerja pimpinan Republik Islam Iran dan sangat menyesalkan situasi Iran. Dia mengecam kiri kanan unsur-unsur sayap kiri, petugas-petugas agama, kelompok-kelompok fanatik dan lain-lain yang disebutnya musuh-musuh revolusi yang berusaha merongrongnya secara terang-terangan atau dengan menyalahgunakan nama dan kekuasaannya. Dia menunjuk pada keadaan kacau di Iran, perpecahan front dalam negeri, bahaya kehancuran ekonomi dan meningkatnya ancaman dari luar negeri.

Biarpun rezim secara formal bergerak untuk memperkuat institusi-institusinya, dia kehilangan impetus politik dalam proses itu. Pimpinan negara pecah akibat pertengkaran dan perebutan kekuasaan yang semakin sengit dan sebagai akibatnya tiada konsistensi dalam kebijaksanaan, terjadi kesewenang-wenangan dan tindakan-tindakan ngawur. Ini berlaku untuk proses pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab kepemimpinan, dan garis-garis politik dalam maupun luar negeri. Perebutan kekuasaan itu berkisar pada usaha-usaha Partai Republik Islam pimpinan Ayatullah Beheshti untuk melumpuhkan Presiden Bani Sadr sama sekali. Pada waktu yang sama polaritas antara golongan agama di sayap kanan dan unsur-unsur kiri meningkat, dan orang dapat melihat suatu kampanye baru untuk menumpas golongan terakhir itu.

Dalam keadaan pimpinan yang lemah dan ketidakstabilan politik itu, kesulitan ekonomi meningkat sedangkan keresahan di kalangan minoritas berlangsung terus. Keadaan serupa itu memberi peluang kepada tetangga-tetangga utara dan barat Iran untuk memperluas daerah pengaruh mereka secara yang merugikan Iran (lihat peta). Kegiatan orang-orang Iran di penga-

IRAN



singan melawan rezim Khomeini juga meningkat. Dengan demikian Iran dalam bahaya jatuh dalam anarki. Ini dapat terjadi bahkan sebelum Khomeini meninggalkan panggung dan anarki itu akan menjadi lebih parah bila perebutan kekuasaan setelah Khomeini tiada meningkat.

Analisa ini membahas kekuatan-kekuatan dan proses yang berlangsung di gelanggang dalam negeri Iran sebelum pecah perang dengan Irak. Walaupun juga dapat terjadi perubahan-perubahan penting yang mempengaruhi gelanggang dalam negeri itu sebagai akibat perkembangan internasional, kita tidak akan membicarakannya di sini.

I. KEKUATAN-KEKUATAN DI GELANGGANG POLITIK

Tiga kelompok utama, di antaranya tiada yang monolitik, aktif di gelanggang politik Iran, yaitu kelompok agama Islam, kelompok sayap kiri, dan kelompok liberal-royalis.

Kelompok Islam

Republik Islam Iran dalam kenyataan diperintah oleh berbagai kelompok yang termasuk kelompok Islam yang besar dan dominan. Kelompok ini terutama disatukan kepemimpinan Ayatullah Khomeini yang karismatis dan berkuasa. Orang ini yang baru-baru ini berusia delapan puluh tahun masih memegang kendali politik tertinggi - maupun moral - di Iran. Dia membimbing langkah-langkah Revolusi Islam dan sejauh ini berhasil mempertahankan suatu kesatuan relatif dalam kelompok Islam.

Dalam kamp agama Islam ini terdapat empat pusat kekuasaan. Pertama, kelompok kecil yang terdiri dari keluarga dan teman-teman dekat Khomeini di bawah pimpinan putranya Ahmed dan menantu laki-lakinya, pejabat agama Ashraghi. Orang-orang ini mendapatkan kekuasaan mereka karena dekat dengan Imam, berkedudukan sebagai pengawalnya, dan dapat berbicara atas namanya dan tampil ke muka sebagai orang-orang pilihan yang dikuasakan oleh Khomeini secara eksplisit atau implisit.

Kedua, partai massa Partai Republik Islam yang di pusat kelompok Islam. Dengan puluhan gerakan satelitnya, partai ini mengatakan didukung oleh jutaan orang di seluruh Iran, dan fakta-fakta rupanya mendukung klaim ini. Walaupun Hassan Habibi, calon resmi partai dalam pemilihan presiden Januari 1980, menderita kekalahan besar, banyak calon partai mendapat kursi dalam

pemilihan Majelis pada musim semi dan mereka merupakan kelompok yang paling besar dalam parlemen. Juga dalam Dewan Revolusi partai ini mempunyai wakil-wakil terkemuka, terutama Ayatullah Beheshti, Ayatullah Rafsanjani, Ayatullah Khamenei, Ayatullah Ardabili dan Ayatullah Mehdi Karubi. Inilah partai yang menuliskan dalam programnya maksud untuk mendirikan suatu teokrasi yang terpusat di Iran. Dia meliputi suatu faksi tradisionalis-fundamentalis yang beranggotakan orang-orang seperti Ayatullah Montazeri dan Dr. Ayat, dan faksi-faksi yang lebih modernis dengan Beheshti sebagai wakil terkemukanya. Sementara orang Republik Islam yang lebih fanatik seperti Ayatullah Khomeini dengan gerakan Fedayin Islam yang mengikuti perintah-perintahnya juga mendapat tempat dalam partai ini. Partai juga memimpin kelompok-kelompok kasar, kelompok Hizballah, sebagai suatu kekuatan jalanan untuk mempertahankan suatu pemerintahan teror dan menumpas lawan-lawan politik.

Ketiga, suatu kelompok yang menempati kedudukan-kedudukan kunci tetapi tidak mempunyai organisasinya sendiri, terdiri atas orang-orang yang memimpin revolusi atau tampil ke muka selama revolusi itu. Yang terkemuka di antara mereka adalah Presiden Bani Sadr dan bekas Menteri Luar Negeri Ghotbzadeh. Tetapi terdapat lain-lain tokoh seperti bekas Perdana Menteri Bazargan, bekas Menteri Luar Negeri Yazdi dalam kelompok ini. Ciri pokok orang-orang ini adalah bahwa ortodoksi Islam mereka sering disertai suatu tekanan ideologi tambahan: mereka hampir semuanya kaum nasionalis Parsi, suatu tekanan yang kadang-kadang menambahkan pragmatisme kepada sikap mereka, yang sampai batas-batas tertentu memperlunak fanatisme keagamaan mereka.

Keempat, suatu kelompok pejabat-pejabat agama senior yang tidak begitu kompak, yang menentang konsep fundamentalis yang menginginkan agar negara merupakan suatu teokrasi di bawah penjabat-penjabat agama. Mereka adalah pejabat-pejabat agama yang masing-masing mempunyai banyak pengaruh di daerahnya seperti Ayatullah Shariat Madari, Ayatullah Golfaygani, Ayatullah Yahya Nuri, Ayatullah Qomi dan Ayatullah Shirazi. Mereka semua pernah mengemukakan Khomeini, jalan revolusinya dan Partai Republik Islam. Akan tetapi mereka tidak duduk dalam Dewan Revolusi dan oleh sebab itu tidak termasuk pimpinan politik tertinggi di Iran. Walaupun mempunyai wewenang keagamaan yang besar, pengaruh mereka atas pimpinan negara pada tahap ini terbatas.

Kelompok Sayap Kiri

Kelompok sayap kiri, seperti kelompok-kelompok lainnya, sama sekali bukan suatu entitas monolitik. Dia terdiri atas tiga faktor utama: Partai

Tudeh, Mujahidin Khalq dan Fedayin Khalq. Ketiga unsur ini mempunyai dua ciri yang sama. Pertama, politik Marxis, biarpun mungkin tidak eksklusif dan disatukan dengan lain-lain pandangan filsafat. Kedua, tidak ikut dalam Dewan Revolusi atau lembaga-lembaga tinggi pemerintahan. Karena di luar eselon atas pimpinan politik, mereka bisa menjadi oposisi terhadap pemerintah, dan juga membentuk suatu poros konfrontasi terhadap kelompok agama Islam.

Tidak ada di antara unsur-unsur yang disebutkan di bawah ini yang dapat dianggap suatu gerakan massa rakyat. Masing-masing paling banyak terdiri dari puluhan ribu orang. Tetapi bobot mereka sama sekali tidak ringan dan kejadian-kejadian bulan-bulan akhir ini menunjukkan bahwa mereka menjadi semakin kuat.

Pertama, Partai Tudeh yang dipimpin oleh Sekjen Kianori (mungkin juga ada alternatif pimpinan rahasia) adalah suatu partai komunis yang dibimbing Moskwa. Partai ini mempunyai organisasi baik dan ribuan kader serta puluhan ribu pendukung. Dia rupanya juga memiliki senjata. Partai mendukung Khomeini dan Partai Republik Islam (PRI), khususnya cabang fundamentalisnya dan menjauhkan diri dari Bani Sadr, Gotbzadeh dan lain-lain sebagainya. Politik partai ialah memperluas prasarana dukungan dan mengumpulkan kekuasaan politik yang lebih besar. Dengan maksud itu partai bersedia memberikan lip service kepada pejabat-pejabat agama, agar mereka tidak menghasut rakyat terhadapnya pada waktu dia masih lemah. Sementara itu Partai Tudeh memasukkan orang-orangnya ke dalam aparat pemerintah khususnya dalam angkatan darat dan administrasi secara diam-diam, dan ke dalam organisasi-organisasi sayap kiri dan komite-komite buruh; dia akan bersenang hati untuk menyatukan dirinya dengan pimpinan itu sendiri. Masalah-masalah pokok partai ialah kelemahan numeriknya, dan kenyataan bahwa dia tidak diajak ikut dalam pemerintahan; dalam kenyataan dia dicap sebagai Kain karena tunduk pada Moskwa dan tidak memainkan peranan yang penting dalam revolusi.

Kedua, kelompok Mujahidin Khalq adalah suatu entitas yang lebih spontan. Dalam gerakan ini ideologi Marxis digabungkan dengan pandangan hidup Islam. Guru-guru spiritualnya adalah mendiang Ali Shariati dan Ayatullah Talghani serta Bazargan. Gerakan ini sekarang dipimpin Mass'oud Rajawi dan Mariam Talghani, orang-orang militan muda yang mempunyai karisma. Perpaduan Islam dan Marxisme memberi gerakan ini sifat menarik khusus di antara mahasiswa dan kaum cendekiawan di kota-kota. Gerakan berhasil mendapatkan beberapa kursi dalam parlemen biarpun secara terus menerus diganggu oleh kelompok Hizballah. Anggotanya kini puluhan ribu dan pendukungnya lebih dari seratus ribu. Kegiatan pokok gerakan adalah

politik, dan pengaruh utamanya di panggung politik adalah pengaruh suatu katalisator yang bersemangat. Itulah peranannya selama revolusi dan itulah juga peranannya kini. Tetapi akibat kombinasi Islam dan Marxisme itu gerakan menjadi terombang-ambing: kadang-kadang dekat dengan kelompok agama, khususnya pemimpin-pemimpinnya yang kurang radikal - Banni Sadr dan Bazargan - dan kadang-kadang terlempar ke arah kelompok sayap kiri, akibat penindasan oleh kaum Hizballah dan permusuhan Khomeini dan pemimpin-pemimpin PRI.

Ketiga, kelompok Fedayin Khalq adalah suatu gerakan Marxis-Leninis bawah tanah tanpa warna Islam yang menonjol. Gerakan mempunyai suatu majalah, *Qor*, tetapi jalannya adalah jalan suatu badan rahasia dan pemimpin-pemimpinnya tidak membuka identitas mereka. Dia adalah suatu gerakan bawah tanah yang bertahun-tahun bertempur melawan Shah dan sasaran-sasaran Amerika yang anggota-anggotanya bersenjata baik, dan yang lebih dari setahun melakukan perang gerilya melawan rezim, khususnya di daerah-daerah minoritas. Anggota-anggotanya berjumlah puluhan ribu, biarpun tidak semua faksi rupanya menganut garis yang sama, tetapi sementara loyal kepada rezim Khomeini. Dia mempunyai ikatan dengan gerakan-gerakan di bawah tanah lain dan dengan unsur-unsur radikal di luar negeri, khususnya Yaman Selatan dan Front Demokrasi serta Front Rakyat dari PLO. Partai Tudeh rupanya berhasil memasuki gerakan ini yang mungkin di bawah pengaruh Soviet, biarpun tidak langsung.

Posisi Liberal-Royalis

Biarpun rezim Shah dan unsur-unsur politik yang tergabung diusir dari Iran, sisa-sisa mereka masih aktif di bidang politik Iran, khususnya di kalangan orang-orang Iran di pengasingan. Sudah barang tentu mereka dilawan dengan keras oleh rezim revolusi. Pemimpin-pemimpin kelompok itu di Eropa, tetapi sejak awal 1980 mereka berusaha mendapatkan suatu basis di Irak dari mana mereka melawan Khomeini lewat siaran-siaran propaganda sehubungan dengan minoritas-minoritas separatistis dan juga dengan mengirimkan kelompok-kelompok penyerang. Mereka dibagi dalam dua sub-kelompok.

Pertama, suatu kelompok royalis yang menginginkan agar Shah atau putranya ditempatkan kembali dalam kekuasaan sebagai bagian pembangunan suatu kerajaan konstitusional di Iran. Keluarga Shah, dengan sumber-sumber keuangan dan koneksi-koneksi politiknya, adalah sumber kekuasaan kelompok ini. Sangat aktif adalah saudara Shah Puteri Ashrah, yang putranya Shahriyar Shafiq berusaha menghimpun suatu kekuatan

militer untuk menumbangkan rezim Khomeini. Menyusul pembunuhan Shafiq, Jenderal Oveissi mengambil alih komando kelompok, biarpun dia menyembunyikan kenyataan bahwa dia dekat dengan keluarga Shah. Kelompok ini mempunyai sekutu-sekutu loyal di Iran, tetapi diragukan apakah banyak orang Iran menginginkan Shah berkuasa kembali.

Kedua, sekelompok negarawan liberal-nasionalis yang tidak mendapatkan tempat di Iran di bawah Khomeini dan yang merupakan oposisi aktif terhadap Imam. Inilah kelompok yang dipimpin bekas Perdana Menteri Shahpour Bakhtiar. Bakhtiar dan pengikut-pengikutnya mempunyai hubungan dengan lain-lain kelompok oposisi seperti Jenderal Palizban dan dengan simpatisan-simpatisan di Iran. Orang-orang seperti Oveissi juga mempertahankan suatu markas besar depan di Iran. Dalam kelompok ini juga termasuk kelompok-kelompok seperti kelompok Asdagan Jenderal Ariana, gerakan baru Hassan Nezia yang keduanya di pengasingan di Eropa, dan pendukung-pendukung Martin Daftari dan lain-lain bekas anggota Front Nasional di Iran. Kelompok-kelompok ini mempunyai kubu-kubu di kalangan cendekiawan Iran, tetapi Bakhtiar rupanya mempunyai paling banyak dukungan di kalangan ini.

II. PROSES-PROSES UTAMA DI PANGGUNG POLITIK

Faktor utama meningkatnya ketidakstabilan dan kekerasan di Iran, krisis kepemimpinan yang berlangsung dan anarki di seluruh negeri, adalah meningkatnya ketegangan dan perebutan kekuasaan pada tiga poros utama: dalam kelompok agama yang berkuasa, khususnya antara Bani Sadr dan anggota-anggota PRI; antara kelompok agama dan sayap kiri; dan antara kelompok Khomeini dan oposisi di pengasingan, khususnya kelompok Bakhtiar dan Oveissi.

Pertarungan pada Eselon Politik Teratas

Yang paling penting dari pertarungan-pertarungan politik yang memecah belah Iran adalah pertarungan yang berlangsung dalam kelompok agama itu sendiri. Seperti diutarakan di atas, adalah Khomeini yang sejauh ini berhasil mencegah kelompok itu pecah dalam faksi-faksi yang bertarung satu sama lain. Akan tetapi akibat usia dan kesehatannya yang tidak mantap pertarungan-pertarungan menjadi lebih parah, karena masing-masing faksi berusaha mengumpulkan kekuasaan dan pengaruh dalam negara, yang akan berguna bila diperlukan, yaitu apabila Khomeini meninggalkan gelanggang. Sementara ini Khomeini dan keluarganya merupakan suatu faktor kekuasaan

yang mempengaruhi perimbangan kekuatan antara faksi-faksi. Kalau pada awal tahun 1980 Khomeini menarik dirinya hampir sepenuhnya dari kegiatan karena kesehatannya, beberapa bulan kemudian dia melibatkan diri lagi dalam percaturan politik, dan mengerahkan seluruh kewibawaannya dalam perdebatan dalam negeri. Selama mampu dia kiranya akan bertindak sebagai faktor pemersatu di gelanggang politik Iran. Tetapi kalau kesehatannya menjadi buruk, dan keterlibatan politiknya harus dibatasi, perang suksesi akan meningkat.

Dua orang dalam kelompok agama yang berambisi untuk menggantikan Khomeini dalam peranannya sebagai kekuasaan agama yang tertinggi (Faqih) Republik Islam adalah Ayatullah Montazeri, yang kini berfungsi sebagai Imam Jemaah Qom, dan yang lebih disukai oleh Khomeini, dan Ayatullah Beheshti, Sekretaris Jenderal Dewan Revolusi, Ketua Mahkamah dan pemimpin PRI.

Menurut penilaian kami Iran tidak mempunyai seorang pengganti Khomeini sebagai satu-satunya orang yang memancarkan jenis karismanya, dan dalam waktu dekat ini kiranya juga tidak ada seorang serupa itu. Seperti diutarakan, Montazeri mendapat dukungan Khomeini tetapi status merdekanya tidak jelas dan tampak sebagai seorang tanpa warna, sedangkan Beheshti mempunyai saingan-saingan. Menurut konstitusi, kalau tiada seorang Faqih yang memiliki keutamaan-keutamaan Khomeini, Iran akan dipimpin oleh suatu Dewan Pengawal Konstitusi. Dalam keadaan serupa itu, bobot yang lebih besar akan dibawa oleh kelompok pejabat agama seperti Golfaygani, Shariat-Madari dan Yahya Nuri, yang menentang keterlibatan pejabat-pejabat agama yang terlalu besar dalam pemerintahan negara.

Akan tetapi pertarungan politik utama di Iran dewasa ini bukanlah mengenai kursi Faqih, tetapi mengenai pimpinan negara. Ini adalah karena Khomeini tidak memainkan peranan yang aktif dalam pemerintahan sekarang ini. Kelompok-kelompok saingan dalam pertarungan ini adalah kelompok pendukung Bani Sadr di satu pihak dan pengikut Beheshti di lain pihak. Kalau kekuasaan politik Beheshti didasarkan atas PRI, Bani Sadr tidak mempunyai organisasi sumber kekuasaan politik. Sebagian besar dia mengandalkan dukungan Khomeini dan keluarganya yang tidak menentu. Walaupun presiden mempunyai hubungan dengan berbagai kelompok seperti Mujahidin Khalq, bekas-bekas anggota Front Nasional dan lain-lain, dia tidak dapat mengandalkan kelompok satupun yang hanya loyal kepadanya. Beheshti ingin mengosongi kepresidenan dari segala kekuasaan eksekutif dan secara demikian mengurangi pengaruh Bani Sadr. Karena PRI mempunyai suatu blok besar dalam Majelis, partai ini mampu mencegah Bani Sadr membentuk suatu kabinet sesuai dengan keinginannya, dan menjamin agar dia tidak men-

dapatkan dukungan parlemen yang dibutuhkannya. Khomeini melakukan manuver-manuver antara saingan-saingan, dan tidaklah mungkin mengatakan ke mana pilihannya akan jatuh, dan dalam kenyataan dia rupanya berusaha mempertahankan konsensus dalam rezim revolusioner sejauh hal itu mungkin.

Pertarungan pada pucuk pimpinan itu memecah belah pemerintahan menjadi faksi-faksi dan melumpuhkan sistem pemerintahan. Perubahan-perubahan arah dalam menangani masalah sandera Amerika banyak mengungkapkan lumpuhnya Pemerintah Iran, tiadanya konsistensi dalam pengambilan keputusan, dan ketidakmampuan Dewan Revolusi untuk melaksanakan keputusan-keputusannya. Biarpun dilakukan usaha-usaha untuk menyatukan aparat dan mengurangi duplikasi-duplikasi, pemerintahan menderita akibat terpecahnya kekuasaan, banyaknya pusat kekuasaan, kurangnya pengalaman politik dan administratif di pihak pejabat-pejabat agama untuk mengelola suatu negara modern, dan suatu brain drain di kalangan kelas menengah ke Barat. Semuanya itu mengganggu berfungsinya administrasi di segala sektor kepemimpinan dan kegiatan ekonomi. Dalam kenyataan orang dapat membedakan tiga kompleks kepemimpinan di Iran sekarang ini yang berfungsi di tingkat-tingkat yang sejalan dan tumpang tindih: (1) kompleks administrasi kementerian yang meliputi kementerian-kementerian, peradilan, pemerintahan daerah, angkatan bersenjata, polisi dan gendarmeri; (2) institusi-institusi Republik Islam, yaitu Faqih Agung, Dewan Pengawal Konstitusi, presiden, Majelis, pemerintah; dan (3) badan-badan revolusi seperti Dewan Revolusi, bermacam-macam komite revolusi, pengawal revolusi (Pasdaran), dan pengadilan-pengadilan revolusi.

Banyaknya pusat kekuasaan dan cabang kepemimpinan sudah barang tentu merupakan akibat langsung perebutan kekuasaan dalam kelompok keagamaan. Sebagai akibat pertengkaran-pertengkaran antar faksi sering terjadi reshuffle bahkan dalam badan-badan revolusi itu sendiri karena persaingan pribadi memecah belahkan badan-badan itu. Pengunduran diri Abu Sherif, kepala Pengawal Revolusi dan Taqi Farrahi, Direktur Otoritas Radio dan Televisi, dapat dilacak keperpecahan-perpecahan ini. Sampai pertarungan-pertarungan ini diselesaikan, diragukan bahwa duplikasi-duplikasi itu dapat ditiadakan. Beheshti misalnya berkepentingan untuk mempertahankan Dewan Revolusi bahkan setelah dibentuk pemerintah baru, sedangkan Bani Sadr menginginkan agar badan itu secara otomatis dibubarkan. Sementara itu badan-badan ini beroperasi bersama-sama, bergesekan satu sama lain dan mengganggu kegiatan kepemimpinan sama sekali. Pada waktu yang sama pertarungan-pertarungan di eselon atas pimpinan menjadi lebih intensif, dan pada saat itu seluruh negara mirip dengan suatu gudang intrik. Komplotan Dr. Ayat, seorang fundamentalis dari PRI, yang gagal melawan Bani Sadr hanya merupakan suatu simptom suasana itu. Dapat diperkirakan bahwa cepat atau

lambat pertarungan antara Bani Sadr dan pejabat-pejabat agama akan berakhir dengan kemenangan salah satu pihak. Kalau Bani Sadr terus menduduki jabatannya, dan mampu melaksanakan suatu kebijaksanaan sesuai dengan keyakinannya, fundamentalisme Islam Iran lambat laun mungkin akan menjadi lebih lunak dan secara berangsur-angsur berkembang menjadi suatu negara di mana Islam dan nasionalisme Iran akan dominan.

Konfrontasi Kelompok Agama - Sayap Kiri

Sejak Khomeini kembali di Iran, ada usaha dari pihak kelompok agama pimpinan PRI dan rupanya di bawah ilham Khomeini untuk secara berangsur-angsur menggeser lain-lain komponen koalisi revolusioner yang menumbangkan rezim Shah. Sasaran terakhir serangan-serangan kelompok agama ialah organisasi Mujahidin Khalq. Pada 25 Juni 1980 Khomeini menyerang kelompok-kelompok sayap kiri yang menurut dia berusaha merongrong rezim dengan kedok untuk mendukungnya dan menggunakan namanya tanpa ijin. Pada musim panas 1979 Khomeini secara terbuka menyerang unsur-unsur sayap kiri, termasuk Partai Tudeh. Markas Besar, cabang-cabang dan lembaga-lembaganya ditutup. Kemudian, khususnya ketika krisis Amerika—Iran meningkat akibat penahanan sandera-sandera, pembatasan-pembatasan terhadap golongan kiri dikurangi dan terjadi suatu konvergensi kepentingan antara amarah anti Amerika kelompok agama dan sikap prinsipial anti Amerika unsur-unsur sayap kiri. Bulan-bulan itu sayap kiri rupanya mengumpulkan kekuasaan: Rajawi tampil sebagai calon presiden dan seperti diutarakan di atas sementara calon Mujahidin terpilih dalam parlemen. Tetapi dalam kampanye pemilihan parlemen itu terjadi lagi bentrokan-bentrokan antara para pendukung sayap kiri dan kelompok Hizballah yang dihasut melawan sayap kiri oleh pemimpin-pemimpin PRI. Kelompok Mujahidin juga menuduh pekerja-pekerja PRI memalsukan penghitungan suara sehingga wakil-wakil mereka tidak terpilih.

Pada pertengahan 1980 konfrontasi antara sayap kiri dan kelompok agama meningkat. Semuanya itu terjadi dengan latar belakang meningkatnya kekerasan dalam negeri: jumlah dan kecepatan eksekusi-eksekusi melebihi pembersihan besar-besaran pada bulan-bulan pertama menyusul jatuhnya Shah, dan pertarungan di jalanan antara pengikut sayap kiri dan anggota kelompok agama berkali-kali menjadi pertumpahan darah. Para pengkotbah di Teheran dan Qom mengulangi ucapan-ucapan Khomeini yang menyerang kelompok Mujahidin dan Fedayin Khalq serta menyerukan agar kegiatan mereka dihentikan. Sebaliknya unsur-unsur kiri tidak begitu getol untuk bentrok karena menyadari bahwa perimbangan kekuatan tidak menguntungkan

mereka dan Pengawal Revolusi kiranya tidak akan membantu mereka tetapi kemungkinan lebih besar akan membantu secara tidak langsung lawan-lawan mereka. Secara paradoksal kampanye melawan sayap kiri itu, kalau mendapat momentum, pada waktu yang sama bisa memperlemah dan memperkuat kelompok kiri. Memperlemahnya dalam jangka pendek kalau seluruh bobot kelompok agama dikerahkan untuk menumpas kelompok kiri yang jumlahnya lebih kecil. Tetapi untuk jangka panjang, kampanye melawan kaum Mujahidin bisa mendorongnya menjadi oposisi dan bekerjasama lebih erat dengan kelompok Fedayin Khalq dan Partai Tudeh. Sejauh ini tiadanya persatuan pada sayap kiri merupakan kelemahannya yang menyolok. Sebaliknya kelompok agama berusaha menarik massa ke panji-panjinya dengan membakar semangat, khususnya melawan faktor luar (Amerika Serikat, Irak, Israel dan di masa mendatang mungkin juga Uni Soviet) atau melawan sementara faktor Iran (sayap kiri, minoritas Kurdi dan di masa depan mungkin juga orang-orang Yahudi). Kalau kelompok agama gagal mengerahkan massa dan ketidakpuasan dengan rezim Khomeini meningkat, sayap kiri pasti akan merupakan pihak yang beruntung.

Lebih lanjut perlu diperhatikan bahwa pertarungan itu berlangsung pada eselon atas rezim dan konfrontasi antara kelompok agama dan sementara unsur kiri juga mempunyai suatu dimensi sosial yang memotong kerangka-kerangka politik. Kelompok revolusioner yang pecah dalam komponen-komponen politiknya juga pecah dalam komponen-komponen sosialnya. Keberhasilan revolusi juga dimungkinkan oleh kerja sama antara kelas menengah dan kelas-kelas rendah di pinggir kota-kota besar. Kini mereka berebut untuk menjadi pemimpin Revolusi Iran. Lapisan-lapisan rakyat, proletariat dari bagian selatan Teheran yang menyediakan calon-calon bagi kelompok Hizballah dan Pasdaran, merupakan sumber kekuatan dan basis kekuasaan kelompok agama yang radikal di bawah pimpinan Khomeini, Montazeri dan Beheshti. Revolusi yang mendatangkan perubahan dalam tata sosial di Iran dalam kenyataan mengubah lapisan-lapisan rakyat menjadi faktor politik dan sosial yang dominan dalam negara, yang tidak akan melepaskan kekuasaannya dengan mudah dan cepat. Presiden Bani Sadr, biarpun termasuk eselon atas rezim yang berorientasi keagamaan, dalam kenyataan mewakili kelas menengah perkotaan, para pegawai kantor, cendekiawan, pedagang, kalangan universitas dan perwira-perwira angkatan darat. Wakil politik orang-orang itu kini adalah Partai Kebebasan Iran Mehdi Bazargan dan pecahan-pecahan Front Nasional dalam diri Karim Sanjabi, Laksamana Ahmed Madani dan pembantu pribadi Bani Sadr, Ahmed Salmatian. Yang sekali lagi harus dicatat ialah sangat dekatnya Presiden Bani Sadr dengan organisasi Mujahidin Khalq dan pemimpinnya Mass'oud Rajawi. Kendati warna progresifnya, basis kekuatannya tidak terletak di perkampungan-perkampungan perkotaan tetapi di kalangan mahasiswa universitas,

cendekiawan perkotaan dan pegawai negeri. Kecamatan yang baru-baru ini sering dilontarkan oleh Khomeini terhadap organisasi-organisasi sayap kiri, presiden dan pegawai negeri, kampanye islamisasi gaya hidup dan pendidikan, dan Revolusi Kebudayaan yang begitu sering diumumkan, undang-undang yang mewajibkan wanita mematuhi perintah-perintah Islam, semuanya itu merupakan bagian rangkaian tindakan tambahan yang menunjukkan maksud lembaga keagamaan radikal untuk menyerang kelas menengah dan kaum cendekiawan. Tindakan-tindakan itu baru-baru ini meliputi perubahan-perubahan di kantor-kantor Perusahaan Minyak Nasional, sistem pendidikan dan universitas-universitas. Pembersihan-pembersihan itu kiranya akan meluas ke lain-lain kantor pemerintah.

Kegiatan Oposisi di Pengasingan Meningkat

Rezim pada tahun 1980 semakin kuatir dengan kegiatan oposisi. Dalam kenyataan hanya sedikit orang di antara seperempat juta orang Iran yang meninggalkan negara mereka bergabung dengan kelompok-kelompok oposisi. Dua kelompok dihimpun tahun yang lalu tanpa menunjukkan kegiatan yang terarah: kelompok Bakhtiar yang kegiatannya semata-mata bersifat politik/propaganda, dan kelompok Shahriyar Shafiq yang berusaha membentuk suatu cabang bersenjata. Sejak akhir 1979 dan awal 1980 gambarannya berubah: (1) Shahriyar Shafiq dibunuh; (2) Jenderal Oveissi rupanya menggantikan Shafiq menghimpun suatu oposisi militer yang aktif; (3) Irak bekerjasama dengan Bakhtiar maupun Oveissi; dan (4) muncul lain-lain kelompok oposisi, termasuk kelompok Jenderal Ariana dan Hassan Nezis.

Kesediaan Irak untuk membantu Bakhtiar dan Oveissi membulatkan tekad kedua kelompok ini. Sejak hubungan Irak dan Iran memburuk, gerakan-gerakan di bawah tanah menerima bantuan dari Irak dan melakukan kegiatan sabotase serta menyiarkan propaganda dari wilayah Irak ke Iran. Pada pertengahan Juni 1980 beberapa puluh perwira ditahan di Kurdistan atas tuduhan berkomplot untuk menumbangkan rezim, dan menurut Prokuratur Jenderal para anggota komplotan itu bergerak dalam kerja sama dengan Partai Demokrasi Kurdi (PDK), golongan Fedayin Khalq, organisasi Comele Kurdi, Pemerintah Irak dan kelompok-kelompok Bakhtiar, Oveissi dan Palizban. Penahanan kelompok-kelompok itu mengungkapkan meningkatnya kegiatan oposisi dan kelemahan faktor-faktor itu. Karena kelompok-kelompok oposisi itu menghadapi hambatan-hambatan berat, mereka tidak mempunyai tempat berpijak yang baik di Iran. Kebanyakan disusupi agen-agen rezim; sementara menderita kesulitan keuangan dan kekurangan orang serta senjata untuk bergerak secara besar-besaran; mereka sulit bekerjasama satu sama lain.

Dukungan Irak untuk organisasi-organisasi oposisi adalah sekaligus sumber kekuatan dan titik kelemahan; karena mereka tak lain ialah alat di tangan Irak melawan Iran, dan tingkat dukungan Irak bergantung pada hubungan antara kedua negara itu.

Mula-mula kegiatan kelompok-kelompok itu tidak melebihi gangguan, salah satu gangguan, untuk rezim Khomeini. Tetapi kemudian pemimpin-pemimpin Iran kelibatan makin prihatin dengan kegiatan itu. Ini adalah akibat terus berlangsungnya ketegangan dengan Irak dan bantuan yang diberikan negara ini kepada Bakhtiar dan Oveissi, dan juga karena usaha penyelamatan Amerika menunjukkan kerawanan Iran terhadap serangan dari luar, dan bahwa Amerika mempunyai banyak agen di Iran sehingga mampu mengandalkan mereka dalam operasi penyelamatan itu.

Sesuatu yang bisa merupakan titik lemah rezim maupun sasaran penting oposisi di pengasingan adalah angkatan darat. Karena di sini dapat ditemukan dukungan untuk rezim Shah, kalau ada, dan dia juga merupakan suatu kekuatan yang dapat menghadapi Pengawal Revolusi dalam perebutan kekuasaan. Sejauh ini angkatan darat tidak mengambil bagian aktif dalam perebutan kekuasaan intern. Namun dan kendati kelemahannya akibat banyaknya desersi dan pembersihan komandan-komandannya, angkatan darat tetap merupakan suatu unsur yang bisa berbahaya di mata rezim. Terdapat semakin banyak petunjuk adanya kantong-kantong pembangkangan dalam angkatan darat dan penyusunan komplotan-komplotan melawan rezim. Rupanya sebagian pembersihan yang sering dilakukan dan pergantian yang banyak dilakukan pada eselon-eselon perwira senior berakar pada kekuatiran rezim bahwa angkatan darat mungkin akan berusaha merebut kekuasaan. Rezim berusaha untuk melumpuhkan angkatan darat sebagai suatu kekuatan politik, antara lain dengan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mengubahnya menjadi suatu tentara rakyat (dengan memasukkan satuan-satuan Pasdaran ke dalamnya) dan menempatkan satuan-satuan di bawah kekuasaan badan-badan pimpinan revolusi seperti komite-komite revolusi dan para inspektur, yaitu pejabat-pejabat agama yang ditunjuk oleh Khomeini. Kendati pengawasan ini, dan sampai batas-batas tertentu sebagai akibatnya keresahan di kalangan militer meningkat. Tidak boleh diabaikan adanya kemungkinan bahwa korps perwira juga akan ikut dalam perebutan kekuasaan negara. Ini bisa terjadi lewat komplotan perwira-perwira yang mereka pikirkan sendiri atau bersama-sama dengan badan-badan oposisi di Iran dan di luar negeri, atau berkat munculnya seorang pemimpin militer kuat yang secara berangsur-angsur, seperti pernah dilakukan Reza Shah, akan mengambil alih kendali kekuasaan. Pergantian yang sering terjadi di markas besar, dan penahanan Panglima Angkatan Udara Bakri dan Panglima Angkatan Laut Alawi atas tuduhan mengadakan kontak dengan Amerika

Serikat, mengungkapkan bahwa rezim semakin kuatir bahwa akan terjadi suatu kudeta militer. Dalam hubungan ini perlu diingat kembali bahwa Laksamana Madani, yang pernah menjabat sebagai Panglima Angkatan Laut, Gubernur Khuzestan dan seorang calon presiden dan perdana menteri disebutkan sebagai seorang yang bisa ditahan atas tuduhan berkomplot dengan musuh-musuh rezim. Dapat diduga bahwa selama oposisi di pengasingan aktif, ia akan mencari sekutu-sekutu dalam angkatan darat dan kiranya akan menemukan mereka, dan secara demikian ikut merongrong gelanggang politik Iran, bahkan kalau ia tidak berhasil menumbangkan dan menggantikan rezim.

Pengaruh Kelemahan Rezim

Sebagai akibat kelemahan rezim dan perpecahannya dalam faksi-faksi keadaan memburuk di dua bidang pokok dan ini mengungkapkan dan merugikan kestabilan rezim, yaitu ekonomi dan minoritas-minoritas.

Lebih dari setahun ekonomi Iran berfungsi pada tingkat kegiatan yang rendah, dan hal ini telah menjadi rutin. Sektor yang paling kurang rawan adalah sektor pertanian dan pangan. Panenan adalah lumayan karena hujan banyak turun tahun 1980 tetapi 30% pangan diimpor dari luar negeri. Dalam bidang ini rezim kelihatan sangat sensitif, khususnya karena sanksi-sanksi Barat kiranya akan ditingkatkan. Kegiatan industri berjalan 30-40% kemampuan sebelumnya karena kekurangan suku cadang dan bahan mentah, dan karena terdapat keresahan yang antara lain disebabkan campur tangan komite-komite revolusi dalam manajemen. Angka pengangguran diperkirakan sekitar 3 juta dan setengah pengangguran sangat tersebar luas, biarpun perlu dicatat bahwa kebanyakan penganggur mendapat tunjangan dari pemerintah. Laju inflasi rata-rata adalah di atas 25%, tetapi sementara komoditi mengalami 80% kenaikan harga setahun. Dalam sektor minyak yang sangat penting keadaannya memburuk dan ini secara langsung mempengaruhi pendapatan negara dan kemampuannya untuk menangkis tekanan-tekanan dari luar. Iran bergantung pada pendapatan minyak dan penurunan produksi dari 4,5 juta barrel sehari tahun 1979 menjadi kurang dari 1,5 juta barrel sehari tahun 1980 memaksa suatu defisit anggaran. Anggaran terakhir yang disusun dilukiskan sebagai suatu anggaran darurat dan tingkat pendapatan minyak yang diperhitungkan adalah kurang dari separuh pendapatan minyak tahun 1980 dan dari apa yang diantisipasi hanya sebulan sebelumnya. Sebagai akibatnya, rezim sudah terpaksa menurunkan upah pekerja, suatu langkah yang pasti akan meningkatkan ketidakpuasan. Biarpun keadaan ekonomi Iran jelas menjadi lebih buruk daripada di bawah pemerintahan Shah, dan perkembangan

ekonomi jelas negatif dari sudut pandangan negara, sulit menentukan di mana presis letak garis merah, di bawah mana memburuknya ekonomi akan mempunyai pengaruh yang menentukan atas rezim. Kesulitan ini adalah akibat beberapa hal. Pertama, pejabat-pejabat agama dalam pemerintahan tidak mempunyai pandangan yang suram mengenai kesulitan ekonomi Iran. Kedua, tahun 1980 negara masih mempunyai cadangan valuta asing sebesar US\$ 15 milyar biarpun separuhnya dibekukan oleh Amerika Serikat, sehingga rezim mempunyai kemampuan terbatas untuk menghadapi sanksi-sanksi ekonomi. Ketiga, situasi ekonomi yang buruk itu rupanya tidak menimbulkan kegetiran di kalangan massa.

Adalah wajar bahwa kelemahan pemerintah pusat memungkinkan unsur-unsur separatis bangkit kembali dan bahwa keresahan di antara kelompok-kelompok non-Shia meningkat. Suatu otonomi de facto telah terdapat di Kurdistan di mana Irak membantu kaum separatis Kurdi. Di Khuzestan serangan-serangan terhadap instalasi-instalasi minyak berlangsung terus, dan orang-orang Arab daerah itu membantu subversi Irak. Baluchistan, menurut berbagai laporan, terbuka untuk kegiatan subversi Soviet, khususnya sejak invasi ke Afghanistan. Pengaruh Soviet juga cukup besar di Azerbaijan di mana Uni Soviet sejak lama mempunyai kedudukan yang baik. Ada tanda-tanda seolah-olah rezim membiarkan manifestasi-manifestasi keresahan dan kegemparan di antara minoritas-minoritas sebagai suatu gejala yang permanen, yang kadang-kadang menunjang perjuangan kohesi nasional dengan membangkitkan perasaan nasionalis. Tetapi dalam kenyataan, pemimpin-pemimpin negara menyadari bahwa berlanjutnya proses separatisme di antara minoritas-minoritas merupakan ancaman terhadap keutuhan wilayah Iran, dan oleh sebab itu harus diambil tindakan-tindakan untuk mencapai ketenangan di daerah-daerah itu, yang harus dibuat tunduk pada pemerintah pusat.

Prospek

Revolusi Iran rupanya tidak akan mampu ke luar dari kesulitan-kesulitan sekarang ini di waktu dekat. Pejabat-pejabat agama berusaha mendapatkan kekuasaan penuh atas negara dan menyingkirkan Bani Sadr. Kelompok agama sebagai keseluruhan kiranya juga akan meningkatkan kampanyenya melawan organisasi-organisasi sayap kiri, mungkin juga melawan Partai Tudeh, dan menumpas mereka. Sampai dicapai hasil yang menentukan dalam pertarungan intern itu, Iran tidak akan mengenal perdamaian. Terus berlangsungnya pertarungan itu hanya akan meningkatkan kelumpuhan kepemimpinan, kekerasan, kekacauan sosial, kesulitan ekonomi, dan pergolakan di antara minoritas-minoritas. Dengan demikian lebih besarlah

kemungkinan Iran mengalami suatu era anarki kekerasan, walaupun hanya jangka pendek, daripada kemungkinan rezim mengkonsolidasikan dirinya dan memulihkan ketertiban. Itu akan terjadi bahkan selagi Khomeini masih hidup, dan setelah dia meninggal, sekali pertarungan mengenai penggantinya meningkat, keadaan hanya akan menjadi lebih buruk.

Pecahnya perang Irak-Iran pada 22 September 1980 bukan saja menimbulkan banyak kerusakan pada ladang-ladang dan instalasi-instalasi minyak Iran sehingga pendapatan minyak sangat menurun dan kesulitan-kesulitan ekonomi meningkat, tetapi juga tidak berhasil menghentikan perebutan kekuasaan tersebut. Akan tetapi akibat perang itu terjadi suatu pergeseran penting dalam perimbangan kekuatan. Berkat peranannya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata kedudukan Presiden Bani Sadr menjadi lebih kuat, khususnya karena angkatan bersenjata yang menjadi terhormat lagi dan muncul sebagai suatu kekuatan politik berada di belakangnya. Sebagai akibat perkembangan ini perebutan kekuasaan antara kelompok Bani Sadr dan kelompok Islam fundamentalis kiranya akan menjadi lebih keras, tetapi kemungkinan Bani Sadr akan ke luar sebagai pemenang menjadi lebih besar.

